



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH FAKTOR KETIDAKMATANGAN KONFLIK  
TERHADAP KEGAGALAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN  
GENCATAN SENJATA LUSAKA (1998-2003)**

**SKRIPSI**

**AHMAD NAUFAL DA'I**

**0706291174**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**DEPOK**

**JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH FAKTOR KETIDAKMATANGAN KONFLIK  
TERHADAP KEGAGALAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN  
GENCATAN SENJATA LUSAKA (1998-2003)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial Pada Program Studi Hubungan Internasional**

**Ahmad Naufal Da'i**

**0706291174**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**DEPOK**

**JANUARI 2012**

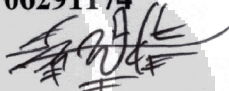
## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah penulis nyatakan dengan benar.**

**Nama : Ahmad Naufal Da'i**

**NPM : 0706291174**

**Tanda Tangan:**



**Tanggal : 25 Desember 2011**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Ahmad Naufal Da'i  
NPM : 0706291174  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : **Pengaruh Faktor Ketidakmatangan Konflik Terhadap Kegagalan Implementasi Perjanjian Gencatan Senjata Lusaka (1998 – 2003)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Broto Wardoyo, M.A (.....)  
Penguji : Artanti Wardhani, M.Phill (.....)  
Ketua Sidang : Andi Widjajanto, M.Sc, MS (.....)  
Sekretaris Sidang : Aninda R. Tirtawinata, M.Litt (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME dan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang terkadang terasa berat dan sulit pada masa pengerjaannya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Penulis tertarik untuk membahas mengenai resolusi konflik di Republik Demokrasi Kongo, khususnya terkait dengan pengimplementasian *Lusaka Ceasefire Agreement* karena penulis merasa suatu kesepakatan damai bukanlah menjadi jaminan berhasilnya sebuah upaya resolusi konflik. Hal ini disebabkan banyak perjanjian damai yang kandas ditengah jalan diakibatkan banyaknya faktor yang tidak sempat diperhitungkan oleh mediator dan juga pihak-pihak yang bertikai. Kegagalan yang bilamana terjadi tidak hanya membuat waktu dan tenaga yang telah dikorbankan untuk mencapai perjanjian damai tersebut sia-sia namun juga seringkali hilangnya ratusan dan bahkan ribuan nyawa penduduk sipil yang harus terjebak dalam lingkaran kekerasan yang bukan merupakan menjadi pilihan mereka samasekali pada awalnya.

Republik Demokratik Kongo adalah gambaran nyata terhadap situasi diatas. Sejak penandatangananannya pada bulan Agustus 1999, tingkat kekerasan di RDK baik yang dilakukan diantara pasukan bersenjata maupun terhadap rakyat sipil masih sangat tinggi. 'Kurang lebih selama tiga tahun berjalannya implementasi perjanjian gencatan senjata Lusaka, proses perdamaian Kongo tidak membuah hasil selain angka kematian sebesar 3,2 juta jiwa dan balkanisasi' wilayah dimana masing-masing aktor dalam konflik Kongo berlomba-lomba untuk mengeruk kekayaan demi kepentingan peperangannya dan menyisakan sedikit sekali bagi kesejahteraan rakyat Kongo. Berangkat dari situasi inilah penulis berharap mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap berbagai upaya resolusi konflik yang ada saat ini, setidaknya untuk menyadarkan penulis akan tragedi kemanusiaan bernama perang dan keharusan untuk mencegahnya.

Perjanjian Gencatan Senjata Lusaka sendiri merupakan sebuah produk yang unik dari konflik di Afrika. Bukan saja perjanjian ini dibuat untuk menyelesaikan konflik terbesar dan yang paling memilukan dari semua konflik yang pernah ada di Afrika modern tetapi juga perjanjian ini merupakan perjanjian pertama yang proses negosiasi dan perumusannya dilakukan oleh putra-putri benua hitam tersebut. Dalam penulisan skripsi ini saya menyangkan kenyataan bahwa ‘African solution for African problem’ ini gagal memenuhi harapan optimis bagi para mediator dan terutama sekali penduduk Republik Demokrasi Kongo yang sama sekali tidak seharusnya hidup dalam mimpi buruk tragedi kemanusiaan terbesar setelah perang dunia ini.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dan kelemahan yang penulis lakukan selama dalam pembuatan skripsi ini secara teknis dan substansi. Oleh karena hal itulah penulis sangat terbuka untuk berbagai saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi memperkaya skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Terakhir, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak di kemudian hari.

Depok, 25 Desember 2011

**Ahmad Naufal Da'i**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri teladan umatnya dalam menjalani kehidupan di dunia. Penulis menyadari benar bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Broto Wardhoyo, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan penuh perhatian bersedia membimbing penulis di tengah kesibukannya, sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini. Terimakasih mas Itok, atas semua masukan, koreksi, kuliah tambahan di jurusan, kesabaran, dan motivasi 'skripsi sambil pacaran' yang terbukti berpengaruh secara positif bagi penulis.
2. Kepada panitia siding skripsi penulis: Artanti Wardhani M.Phil., selaku penguji ahli, Andi Widjajanto, Ph. D selaku Ketua Sidang, Aninda R. Tirtawinata M. Litt., sebagai sekretaris sidang.
3. Dwi Ardhanariswari, M. Phil selaku dosen SPM yang telah dengan sabar membantu penulis dalam merangkai Bab I sehingga akhirnya dapat lolos dalam sidang proposal. Penulis sangat berterima kasih atas kritikan dan sekaligus motivasi beliau yang mendorong penulis untuk tetap berusaha mengejar kelulusan pada semester ganjil tahun ini.
4. Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh dosen-dosen jurusan ilmu hubungan internasional yang telah mencerahkan ilmunya yang sangat berharga dan juga dalam membantu penulis untuk senantiasa berlatih agar dapat bekerja lembur sesuai dengan tenggat waktu tugas yang menunggu di masa yang akan datang.
5. Pak Budi, Mas Andre, Mas Roni, dan Pak Dahlan selaku karyawan Departemen HI, Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan

selama empat tahun ini, sehingga penulis tidak mengalami kesulitan ataupun rasa minder ketika harus berkunjung ke Jurusan dan UPDHI.

6. Asrining Tyas dan Priliantina Bebasari, atas dukungan, motivasi dan bantuan yang sangat instrumental dalam penyelesaian tulisan ini.
7. Keluarga penulis, Lilik Prayitno (alm) & Emi Sukaemi atas kepercayaannya terhadap anak yang keras kepala ingin mengenyam pendidikan di pulau Jawa terlepas dari keterbatasan dukungan finansial yang ada. Penulis ingin menyatakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, kasih sayang dan dukungan moral mereka yang sangat berarti. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua adik kandung penulis, Ahmad Burhannudin Haris dan Bunga Indah Pramita Sari yang selalu memberikan keceriaan dan arah tujuan hidup bagi penulis selama ini.
8. Keluarga besar EDS UI yang kontribusinya terhadap masa empat tahun kehidupan penulis sangatlah besar baik dalam memberikan begitu banyak, diantaranya: pembelajaran hidup yang sangat berharga mengenai keberanian menerima pendapat yang berbeda; beberapa piala dan penghargaan; tiket gratis ke Cancun, Botswana, Dundee dan Filipina; dan terakhir, sebuah keluarga.
9. Sponsor pendidikan penulis, Ibu Siska Utoyo dan Sinar Mas Grup yang tanpa bantuan mereka maka sulit untuk membayangkan penulis dapat menikmati kesempatan untuk belajar di Universitas Indonesia ini.
10. Terakhir, dan yang paling penting, untuk teman-teman seperjuangan HI 2007 yang telah membantu penulis menjalani suka-duka masa-masa pendidikan di UI: Amri, Rain, Gabby, Muti, Rindo, Fauzan, Adina, Adyani, Naufal, Ais, Lala, Anne, Jora, Dian, Dhacil, Erika, Dhaba, Aji, Zahro, Hani, Irene, Keken, Laras, Maria, Tasha, Prili, Resi, Rifki, Riris, Joan, Frisca, Tabhita, Tangguh, Teguh, Theo, Sarkotri, Winda, Dito, Yudha VBT, dan Yandri. Semoga kita dapat kembali merasakan perasaan yang sama ketika diterima di jurusan HI UI di kehidupan paska kampus kita nantinya.

Depok, 25 Desember 2011



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Naufal Da'i  
NPM : 0706291174  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Departemen : Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pengaruh Faktor Ketidakmatangan Konflik Terhadap Kegagalan  
Implementasi Perjanjian Gencatan Senjata Lusaka (1998 – 2003)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 25 Desember 2011  
Yang menyatakan



( Ahmad Naufal Dai'i)

## ABSTRAK

Nama : Ahmad Naufal Da'i

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul :

**Pengaruh Faktor Ketidakmatangan Konflik Terhadap Kegagalan  
Implementasi Perjanjian Gencatan Senjata Lusaka (1998 – 2003)**

---

Skripsi ini bertujuan menganalisa penyebab kegagalan implementasi perjanjian gencatan senjata Lusaka (LCA) di Republik Demokrasi Kongo yang disetujui pada 10 Juli 1999. LCA disepakati untuk mengakhiri Perang Kongo II yang merupakan konflik terbesar di Afrika, melibatkan sembilan negara Afrika pada puncaknya, dan memiliki skala konflik dan korban jiwa terbesar sejak perang dunia kedua. LCA awalnya diharapkan mampu meredakan Perang Kongo II, yang memiliki karakter Perang sipil namun mengalami internasionalisasi dikarenakan berbagai kepentingan negara tetangga. Namun LCA terus dikritik karena kontribusinya yang minimal terhadap upaya resolusi konflik Kongo II sebelum akhirnya digantikan persetujuan-persetujuan lain yang lahir dari proses negosiasi paska LCA. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif eksplanatif yang menggunakan studi dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian gencatan senjata Lusaka dibuat dalam situasi konflik yang belum matang dimana potensi tinggi terhadap eskalasi konflik paska penandatanganan, membuat perjanjian ini sulit diimplementasikan dan menjadi tidak lagi relevan bagi berbagai pihak yang bertikai serta bagi proses resolusi konflik di Republik Demokrasi Kongo.

*Kata Kunci: Perjanjian Gencatan Senjata Lusaka (LCA), kematangan Perang, Perang Kongo II, implementasi damai, resolusi Perang.*

## ABSTRACT

Name : Ahmad Naufal Da'i

Study Program: Ilmu Hubungan Internasional

Title :

**The Influence of Conflict Ripeness Factor in the Failed implementation of  
Lusaka Ceasefire Agreement (1998-2003)**

---

This undergraduate thesis seeks to analyze the cause of failure in implementation of Lusaka Ceasefire Agreement (LCA) in the Democratic Republic of Congo which was agreed in July 1999 to end the second Congo conflict, the largest conflict in Africa involving nine countries in its apex with the worst record of violence and casualties which is only surpassed by the second world war. LCA is intended to resolve the second Congo war which has the character of a local conflict being internationalized due to myriads of interest from its neighboring countries. However is often criticized for its lack of contribution due to its slow and almost non-existent implementation efforts done by both the belligerent parties and the international society. This research is done in a quantitative method using literature and document examinations. The result of this research shows that when the Lusaka Ceasefire Agreement was made, conflict in Congo had not reached its ripe moment. Therefore, rendering the implementation of the treaties, making it especially hard to be implemented and thus becoming more and more irrelevant for the disputed parties and for conflict resolution process in the Democratic Republic of Congo.

*Keyword: Lusaka Ceasefire Agreement (LCA), ripeness of conflict, Second Congo War, implementation of peace agreement, conflict resolution.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SKEMA .....	xiv
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.....	Latar
Belakang.....	1
1.2.....	Permas
alahan.....	3
1.3.....	Kajian
Pustaka ( <i>Literature Review</i> ) .....	4
1.3.1 Pengaruh Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Kongo Kedua .....	5
1.3.2 Pengaruh Faktor Keseimbangan Kekuatan Sistemik dan Regional Terhadap Terhambatnya Upada Perdamaian di Kongo .....	7
1.3.3 Faktor Pengaruh Sifat Ketentuan Dalam Persetujuan Gencatan Senjata Terhadap Terhambatnya Proses Perdamaian di Kongo.....	8
1.4.....	Kerang
ka Pemikiran.....	9
1.4.1 Definisi Konseptual: Konsep Resolusi Konflik .....	9
1.4.2 Teori tentang Kematangan Konflik yang Mempengaruhi ImplementasiPerjanjian Damai dalam Konflik Sipil.....	12
1.5.....	Metodo
logi Penelitian.....	17

1.6.....	O
perasionalisasi Konsep .....	18
1.7.....	Model
Analisa.....	19
1.8.....	Hipotesis dan Asumsi Penelitian
1.8.1 Hipotesis.....	20
1.8.2 .....	Asumsi penelitian
penelitian .....	20
1.9.....	Rencana Pembabakan Skripsi
a Pembabakan Skripsi .....	21
1.10.....	Tujuan dan Signifikansi Penelitian
dan Signifikansi Penelitian .....	21

## **BAB II**

### **KONFLIK KONGO II DAN DINAMIKA SEPUTAR IMPLEMENTASI**

<b>LUSAKA CEASEFIRE AGREEMENT</b> .....	23
2.1 Latar Belakang dan Kronologis Konflik Kongo II .....	23
2.1.1 Profil dan Sejarah Singkat Republik Demokrasi Kongo Sebelum Perang Kongo Kedua .....	23
2.1.2 Meletusnya Perang Kongo II (Pemberontakan Terhadap Lauren Kabila) .....	28
2.2 Negosiasi dan Intisari <i>Lusaka Ceasefire Agreement</i> .....	33
2.2.1 Proses Negosiasi dan Mediasi Menuju LCA.....	33
2.2.2 Rangkuman Terhadap Isi dan Proses Pengimplementasian <i>Lusaka Ceasefire Agreement</i> .....	36
2.3. Kegagalan <i>Lusaka Ceasefire Agreement</i> dalam Menciptakan Sebuah Resolusi Konflik .....	38
2.3.1 Kegagalan Upaya <i>Conflict Containment</i> dalam Implementasi LCA .....	39
2.3.2. Gagalnya Upaya <i>Conflict Settlement</i> Paska LCA .....	44
2.3.3 Gagalnya Upaya <i>Conflict Transformation</i> Paska LCA. ....	48

## **BAB III**

### **ANALISIS FAKTOR YANG MENYEBABKAN KETIDAKMATANGAN KONFLIK DALAM PENANDATANGAN LCA** .....

3.1 Ketidakmatangan Konflik Dalam Penandatanganan LCA .....	53
3.2 Analisis Mengenai Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ketidakmatangan Konflik dalam Penandatanganan Perjanjian Gencatan Senjata Lusaka (LCA) .....	55
3.2.1 Tidak Terciptanya <i>Mutually Hurting Stalemate</i> dalam Penandatanganan LCA Analisis Faktor Kematangan Konflik .....	77
3.2.2 Belum Adanya Redefinisi Kepentingan Pihak Yang Bertikai Terhadap Konvergensi Sikap Yang Mendukung Upaya Perdamaian .....	67
3.2.3 Tidak Adanya Konsensus Pihak-Pihak Yang Bertikai Terhadap Mekanisme dan Proses Perdamaian Dalam Implementasi LCA.....	74

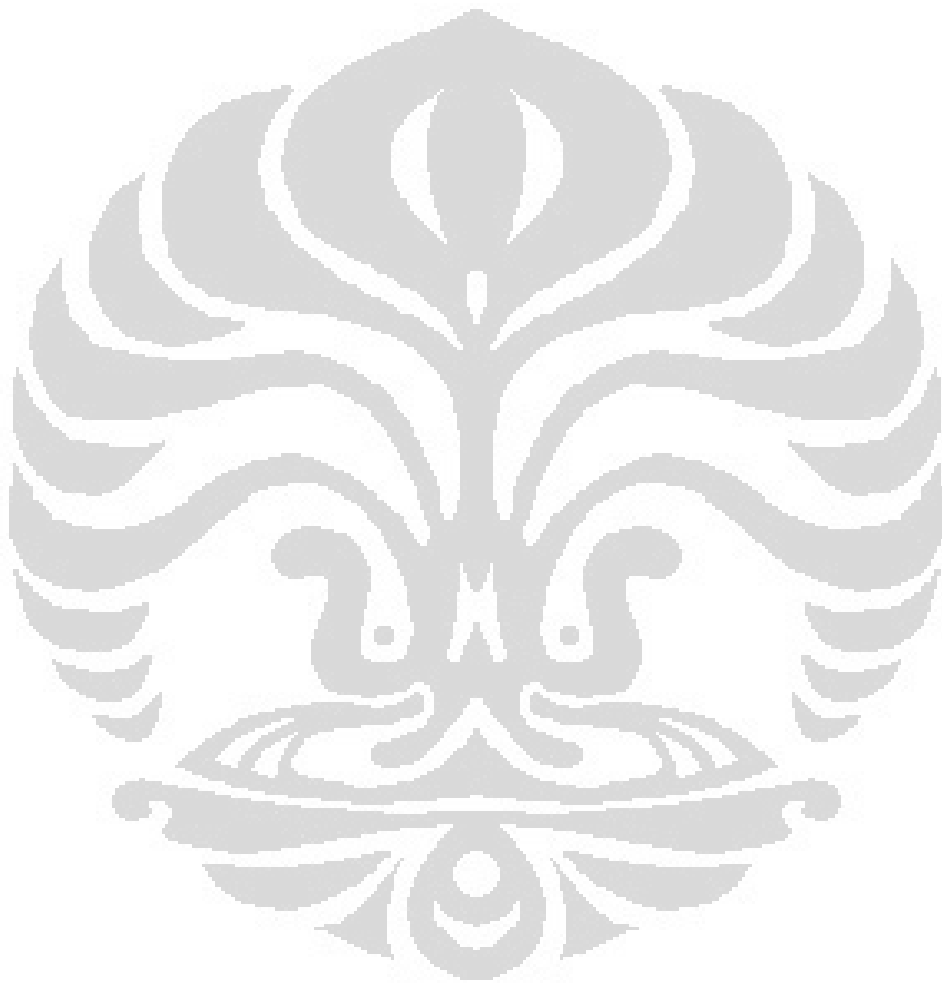
## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN KETIDAKMATANGAN KONFLIK KONGO TERHADAP KEGAGALAN IMPLEMENTASI LCA**.....

4.1. Analisis mengenai Intensitas Konflik di RDK Terkait Dengan Implementasi Perjanjian Gencatan Senjata Lusaka (LCA) .....	80
4.2. Analisis Terhadap Hubungan Ketidakmatangan Konflik Dengan Kegagalan Implementasi Perjanjian Lusaka .....	91

## **BAB V**

<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel Independen Penelitian.....	18
Tabel 1.2Operasionalisasi Variabel Dependen Penelitian .....	19
Tabel 2.1 Daftar Pihak yang Terlibat dalam Konflik Kongo II .....	32
Tabel 2.2 Perkiraan Jumlah Korban Jiwa di RDK.....	44
Tabel 3.1 Kematangan Konflik Paska Perjanjian Lusaka.....	54
Tabel 3.2 Meningkatnya Perdagangan Mineral Rwanda dan Uganda Akibat Konflik Kongo II.....	62
Tabel 4.1 Periodisasi Konflik di RDK.....	81

## DAFTAR SKEMA

Skema 1.1 Model Analisa .....	19
Skema 3.1 Tingkat Kematangan Konflik Periode Paska Perjanjian Lusaka ...	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1Sembilan Fase Konflik menurut Ramsbotham, Woodhouse &Miall.....	11
Gambar 2.1 Peta Wilayah Republik Demokrasi Kongo .....	23
Gambar 2.2 <i>Front</i> pertempuran pada periode paska LCA .....	40

## DAFTAR SINGKATAN

ADF	<i>Allied Democratic Forces</i>
AFDL	<i>Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération</i>
ALiR	<i>Armée de Libération du Rwanda</i>
DDRRR	<i>Disarmament, Demobilisation, Repatriation, Reintegration, and Resettlement</i>
DDR	<i>Disarmament, Demobilization and Repatriation</i>
DK PBB	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa
EU	<i>European Union</i>
FAA	<i>Angolan Armed Force</i>
FAC	<i>Forces Armées Congolaises</i> (Congolese Armed Forces)
Ex-FAR	<i>Former Rwandan Armed Forces</i>
FAP	<i>Forces d'Autodéfense Populaire</i>
FAZ	<i>Forces Armées Zairoises</i>
FDD	<i>Forces for the Defence of Democracy of Burundi</i>
ICD	<i>Inter-Congolese Dialogue</i>
ICG	<i>International Crisis Group</i>
IRC	<i>International Rescue Committee</i>
JMC	<i>Joint Military Committee</i>
LCA	<i>Lusaka Ceasefire Agreement</i>
LRA	<i>Lord's Resistance Army</i>
MHS	<i>Mutually Hurting Stalemate</i>
MNC/L	<i>Mouvement Nationaliste du Congo/Lumumbiste</i>
MLC	<i>Mouvement pour la Libération du Congo</i> (Movement for the Liberation of Congo)
MPLA	<i>Movimento Popular de Libertação de Angola</i>
MONUC	<i>Mission de l' Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo</i>
NALU	<i>National Army for the Liberation of Uganda</i>
NATO	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NRA	<i>National Resistance Army</i>



NRM	<i>National Resistance Movement</i>
OAU	<i>Organisation for African Unity</i>
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
RCD	<i>Rassemblement Congolaise pour la Democratie.</i> (Rally for the Congolese Democracy).
RCD-Goma	<i>Congolese Assembly for Democracy - Goma</i>
RCD-ML	<i>Congolese Assembly for Democracy - Mouvement de Liberation</i>
RDK	Republik Demokratik Kongo
RPA	<i>Armee Patriotique Rwandaise.</i> (Rwanda Patriotic Army)
RPF	<i>Rwanda Patriotic Front</i>
SADC	<i>South African Development Community</i>
SPLA	<i>Sudanese People's Liberation Army</i>
UNITA	<i>Union for the Total Independence of Angola</i>
UPDF	<i>Uganda People's Defence Forces</i>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Studi perdamaian merupakan salah satu kajian dalam studi keamanan dalam lingkup ilmu hubungan internasional yang lahir diantara dekade 60 – 70-an. Studi ini muncul sebagai kritik atas studi keamanan pada era sebelumnya yang hanya menilai perdamaian sebagai kondisi ketiadaan perang (*absence of war*) semata. Studi ini menguat terutama sejak berakhirnya perang dingin, dikarenakan ranah politik internasional mengalami peningkatan jumlah konflik intra-negara (*intrastate wars*), serta kondisi *war-torn states and societies* semakin sulit dijelaskan oleh perspektif kajian keamanan konvensional<sup>1</sup>. Studi ini mengalami perkembangan pesat terutama sejak tahun 90-an, dimana banyak konflik yang tidak berujung pada kemenangan salah satu pihak dan masih berstatus *stalemate*. Kondisi ini mengharuskan dilakukannya upaya transformatif yang berbentuk tindakan kolektif dan komprehensif untuk meredam potensi eskalasi konflik dan berusaha menyelesaikan pertikaian yang sudah terjadi. Upaya-upaya ini dikenal dengan istilah resolusi konflik (*conflict Resolution*)<sup>2</sup>.

Salah satu upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh dunia internasional adalah upaya implementasi perjanjian gencatan senjata Lusaka yang bertujuan untuk mentransformasikan konflik Kongo II yang sangat kompleks. Karakteristik konflik Kongo ialah terlibatnya banyak aktor serta tingkat kekerasannya yang mencengangkan dengan jumlah korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar; bahkan jika dibandingkan dengan konflik-konflik lain yang terjadi di benua Afrika. Konflik Kongo II yang juga dikenal dengan nama ‘perang kongo yang

---

<sup>1</sup>Jack S. Levy, *Theories of Interstate and Intrastate War: A Level of Analysis Approach*, dalam Chester A. Crocker, et al., *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflicts*, (Washington: United States Institute of Peace, 2001), hlm. 3 – 5.

<sup>2</sup>Oliver Ramsbotham, Hugh Miall & Tom Woodhouse, *Introduction to Conflict Resolution: Concepts and Definition*, dalam *Contemporary Conflict Resolution*, (Great Britain: MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall), hlm. 27.

kedua' (*The Second Congo War*) atau perang dunia Afrika (*Africa's World War*) ini dimulai pada tanggal 2 Agustus 1998 yang bermula dari munculnya kembali gerakan pemberontakan untuk menjatuhkan pemimpin Kongo yang baru, presiden Laurent-Desire Kabila yang sebelumnya meraih kekuasaan dengan menjatuhkan diktator Mobutu Sese Seko.<sup>3</sup> Konflik Kongo II mendapatkan nama 'perang dunia Afrika' (*Africa's World War*) karena perang tersebut menghasilkan korban jiwa sebesar 5,4 juta jiwa terhitung sampai hari ini, serta kehancuran ekonomi yang sangat parah di Kongo sampai menjadikannya salah satu negara termiskin di dunia.<sup>4</sup> Pada dasarnya perkiraan mengenai jumlah korban jiwa total yang dihasilkan oleh perang Kongo kedua sulit ditentukan karena sulitnya mengakses informasi dari pihak-pihak yang bertikai dan diperparah dengan minimnya infrastruktur informasi untuk memantau keseluruhan area konflik di negara yang sangat luas tersebut.<sup>5</sup> Namun, beberapa laporan awal dari LSM internasional di Kongo memperkirakan dua tahun paska penandatanganan LCA kematian sebesar 1,7 juta jiwa akibat konflik Kongo dengan rincian perkiraan 200.000-300.000 kematian disebabkan langsung oleh konflik dan sisanya secara tidak langsung disebabkan hancurnya infrastruktur kesehatan dan kelangkaan pangan bagi penduduk sipil Kongo. Konflik ini juga merupakan contoh dari konflik sipil yang mengalami internasionalisasi dikarenakan keterlibatan sembilan negara Afrika dalam puncak konflik ini yang diiringi terbentuknya berbagai faksi militer sebagai kepanjangan dari kepentingan politik negara-negara tersebut.<sup>6</sup>

Karena besarnya skala konflik Kongo dan potensi acamannya terhadap

---

<sup>3</sup>Thomas Turner, *Congo Wars: Conflicts, Myth and Reality*, (London: Zed Books., 2007), hlm. 5.

<sup>4</sup> Jeanne M. Haskin, *the Tragic State of Congo: From Decolonization to Dictatorship*, (New York: Algora Publishing), hlm. 6.

<sup>5</sup> Chris McGreal, *Huge Death Toll in Congo*, The Guardian edisi 30 Juli 2001, diakses dari <http://www.guardian.co.uk/world/2001/jul/31/chrismcgreall?INTCMP=SRCH> pada 12 November 2011 pukul 11.33 WIB.

<sup>6</sup> International Crisis Group, *Conflict in Congo*, diakses dari <http://www.crisisgroup.org/en/key-issues/conflict-in-congo.aspx> pada 11 September 2011 pukul 07.22 WIB.

stabilitas kawasan danau besar (*Great Lake Region*) maka Konflik Kongo menarik perhatian banya pihak baik dari negara-negara barat, PBB dan juga dari negara-negara di kawasan Afrika pada khususnya<sup>7</sup>. Lewat berbagai proses mediasi dan negosiasi, akhirnya lahirlah Perjanjian Gencatan Senjata Lusaka (*Lusaka Ceasefire Agreement*, selanjutnya akan disingkat menjadi LCA) yang ditandatangani oleh negara-negara dan kelompok-kelompok militer non-negara yang bertikai. LCA diharapkan mampu mentransformasikan konflik Kongo dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Kongo. Oleh karena itu perjanjian ini kemudian berfokus untuk membahas empat hal yakni upaya penghentian konflik terbuka dengan gencatan senjata, upaya melucuti persenjataan dan demobilisasi pihak yang bertikai terutama milisi bersenjata yang berkeliaran dengan bebas di RDK, upaya menggelar *peacekeeping* troops untuk memonitor jalannya upaya penciptaan perdamaian, dan terakhir, upaya memulai dialog nasional bagi segenap pihak yang berkepentingan di Kongo demi rekonsiliasi nasional.

## 1.2. Permasalahan

Perjanjian LCA banyak dikritik karena dianggap tidak berkontribusi secara signifikan terhadap upaya penciptaan kedamaian di Kongo. Banyak pihak yang menyatakan bahwa meskipun memiliki mandate komprehensif yang meliputi segenap dasar konflik yang terjadi, namun LCA tidak berhasil diimplementasikan. Hal ini menyebabkan LCA tidak lagi dianggap relevan hanya dalam hitungan beberapa bulan setelah penandatanganannya<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ian Fisher, *Chaos in Congo: A Primer*, The New York Times edisi 6 Februari 2000, diakses dari <http://www.nytimes.com/2000/02/06/world/chaos-congo-primer-many-armies-ravage-rich-land-first-world-war-africa.html?scp=3&sq=Congo+War&st=nyt>, pada 13 Desember 2011 pukul 02.17 WIB.

<sup>8</sup>Phillip Roessler & John Pandergast, Democratic Republic of Congo, dalam William J. Durch ed., *Twenty First Century Peace Operations*, (Washington, USA: *United States Institute of Peace*, 2006), hlm. 248-9.

LCA diharapkan mampu menjadi dasar bagi upaya perdamaian yang diarahkan untuk penghentian kekerasan di RDK sekaligus memperbaiki permasalahan politik dan struktural yang menjadi penyebab awal pecahnya perang Kongo kedua. Akan tetapi, faktanya banyak terjadi pelanggaran dalam implementasi perjanjian Lusaka, diantaranya:

- Pertempuran terus berlangsung baik antara pasukan pemerintah melawan pasukan pemberontak, maupun antar pasukan pemberontak sendiri; walau LCA memiliki ketentuan penciptaan gencatan senjata.
- Komitmen dan keterlibatan dari pihak-pihak yang terkait langsung pada konflik Kongo untuk melanjutkan upaya perdamaian sesuai perjanjian gencatan senjata Lusaka semakin menghilang dalam mengimplementasikan LCA. Hal ini terlihat dari terhambatnya misi perdamaian digelar di RDK dan penolakan berbagai kelompok bersenjata untuk melucuti senjata mereka dan menarik diri dari wilayah RDK.
- Penyelenggaraan ICD sendiri tidak mencapai apa-apa semasa L.D. Kabila berkuasa. Pemerintah Kongo terus melakukan taktik menunda jalannya perjanjian dengan menambahkan klausul yang tidak termasuk dalam LCA dan mempertanyakan kredibilitas fasilitator ICD, mantan presiden Botswana, Ketumile Masire. Hal yang sama juga terjadi disisi pasukan pemberontak yang bersikeras mereduksi legitimasi pemerintah RDK dengan berbagai taktik yang justru mempersulit jalannya ICD mencapai hasil yang positif.
- Misi PBB yang seharusnya bisa berjalan sebagai pengawasan dan fasilitasi pihak ketiga juga kurang optimal. Penggelaran pasukan PBB beserta instrument mengalami berbagai hambatan.

Didorong oleh permasalahan-permasalahan tersebut, penulis ingin

mengajukan pertanyaan permasalahan dalam tulisan ini yang terkait dengan kegagalan implementasi perjanjian gencatan senjata Lusaka:

***Bagaimanakah Pengaruh Ketidakmatangan Konflik Terhadap Kegagalan  
Pengimplementasian Lusaka Ceasefire Agreement (LCA) di Republik  
Demokrasi Kongo (1999 – 2003)?***

### **1.3. Kajian Pustaka (*Literature Review*)**

Penulisan makalah ini akan berfokus dalam membahas variabel kedua dari teori Hampson, mengenai pengaruh kematangan konflik yang selanjutnya. Berikut akan penulis paparkan beberapa penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan mengenai implementasi perjanjian Lusaka di Kongo dari kacamata tiga variabel lain yang digagas oleh Hampson.

#### **1.3.1. Pengaruh Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Kongo Kedua**

Penelitian Stefan Smis dan Wamu Oyatambe membahas mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam konflik Kongo dengan menggunakan studi dokumen mengenai posisi negara-negara barat (NATO, AS) dalam meja diplomasi dan pemberitaan di media. Dalam tulisannya, Smis dan Oyatambe menilai keenganan pihak barat untuk terlibat dan menyurutnya dukungan terhadap misi perdamaian di Kongo diakibatkan oleh<sup>9</sup>: (a) persepsi konflik Kongo sebagai konflik yang kompleks dan terlalu beresiko (*complex political emergencies*); (b) adanya perbedaan kepentingan diantara negara barat (AS, Belgia, Perancis dan EU/Nato); dan (c) ketidaksukaan negara barat terhadap L.D. Kabila. Sedangkan kawasan Afrika sendiri sulit menjadi *driving force* bagi perdamaian dikarenakan:

---

<sup>9</sup>Stevan Smis dan Wamu Oyatambe, *Political Emergencies, the International Community & the Congo Conflict*, dalam *Review of African Political Economy*, Vol. 29, No. 93/94, *State Failure in the Congo: Perceptions & Realities (Le Congo entre Crise et Régénération)*, (Taylor & Francis Ltd, 2002), hlm. 411-430.

(a) kurangnya persatuan diantara negara-negara yang tergabung dalam institusi regional yg berperan paling penting di Kongo, SADC; serta (b) sangat minimnya kemampuan finansial, militer dan teknis yang dimiliki organisasi regional di Afrika untuk menjalankan program perdamaian dengan skala Kongo (OAU).

Thomas Turner melihat keengganan pihak ketiga, dalam hal ini negara-negara anggota DK PBB untuk terlibat secara aktif dan penuh di Kongo bersumber dari rasa kecemasan terhadap perkembangan situasi di Kongo yang sulit diprediksi karena kompleksitas konflik serta karakter Laurent-Desire Kabila yang cenderung antipati terhadap keterlibatan asing, terutama negara-negara barat<sup>10</sup>. Kabila senior tidak menyukai negara barat karena melihat sejarah Kongo yang dipenuhi perpecahan dan penderitaan akibat pengaruh negara-negara Eropa. Terutama sekali, menurut Turner, hal ini kentara dalam cara pandang Kabila melihat keterlibatan negara barat pada masa lalu, ketika Mobutu menggulingkan Patrice Lumumba, perdana menteri Kongo yang terpilih secara demokratis pada tahun 60-an. Sikap Amerika Serikat yang terus berupaya mempertahankan Mobutu yang opresif karena kepentingan perang dingin juga memperparah sentimen ini. Inilah salah satu faktor menurut Turner yang mendorong Mobutu lebih cenderung mengandalkan aliansinya di kawasan daripada ikut serta dalam upaya perdamaian yang banyak melibatkan pihak luar. Pandangan ini pada akhirnya mempersulit keterlibatan pihak ketiga, dalam hal ini PBB dan negara-negara barat, secara lebih intensif.

Dito Kristiosis dan Malcom D. Evan mengkaji minimnya keterlibatan fungsi yudikatif, dalam hal ini ICC, dalam membantu penyelesaian konflik Kongo II<sup>11</sup>. Dalam studi mereka terhadap putusan ICC, ditemukan bahwa pada 23 Juni 1999 RDK menuntut Uganda untuk menarik pasukannya dari wilayah Kongo

---

<sup>10</sup> Thomas Turner, *op.cit.*, hlm. 70.

<sup>11</sup> Dito Kristiosis & Malcom D. Evan, *Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda): Provisional Measures*, dalam *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 50, No. 3, (Juli, 2001), hlm. 662-670.

melalui ICC. Namun hal ini direspon oleh Uganda dan diafirmasi oleh ICC sebagai invalid karena sudah ada perjanjian Lusaka yang sedang berada dalam proses implementasi, sedangkan ICC dan DK PBB dianggap dapat melengkapi satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan konflik Kongo menjadi sepenuhnya bergantung pada implementasi perjanjian Lusaka dan keterlibatan DK PBB; dimana pada akhirnya keduanya pun tidak berfungsi terlalu baik dalam meredakan konflik Kongo II.

Ola Ollson dan Heather Congdon Fors mencoba melihat peran negara-negara tetangga Kongo di kawasan untuk terlibat didalam konflik Kongo II dalam konteks motivasi *greed-grievance* yang melatarbelakangi perilaku negara. Dengan menggunakan metode Kuantitatif berdasarkan model *predatory conflict* yang mereka buat, disimpulkan bahwa keterlibatan langsung berbagai negara tetangga Kongo terutama Rwanda, Uganda dan, dalam tingkatan yang lebih kecil, Burundi, dalam perang Kongo II, awalnya dilatarbelakangi faktor *grievances* akibat trauma genosida Rwanda, serta berbagai tindakan Mobutu yang menampung berbagai gerakan separatis yang memusuhi negara tetangganya. Namun seiring berjalannya waktu, motivasi tersebut berubah menjadi *greed* dimana keterlibatan di Kongo menjadi sebuah kesempatan tersendiri bagi negara-negara tetangga Kongo untuk mendapatkan akses terhadap kekayaan alam Kongo<sup>12</sup>. Lebih jauhnya, Ollson dan Congdon menggunakan temuan ini untuk menjelaskan kenapa dukungan negara tetangga Kongo terhadap upaya perdamaian akan tetap rendah, bahkan mereka akan cenderung melupakan motivasi awal *grievances* mereka. Hal ini terbukti dari upaya beberapa negara untuk mempertahankan keberadaan militer mereka di Kongo untuk memudahkan aksi penjarahan dilakukan demi kepentingan mereka masing-masing.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ola Olson & Heather Congdon Fors, *Congo: The Price of Predation*, dalam *Journal of Peace Research*, vol. 41, no. 3, 2004, hlm. 322 – 323.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 327.



### **1.3.2. Pengaruh Faktor Keseimbangan Kekuatan Sistemik dan Regional Terhadap Terhambatnya Upada Perdamaian di Kongo**

James Baxter menilai bahwa keterlibatan aktif negara-negara tetangga Kongo dalam konflik yang terjadi, maupun kecenderungan untuk memberikan komitmen perdamaian yang lemah, dapat diatributkan kepada kekayaan alam Kongo yang begitu banyak. Terminasi konflik dipersulit oleh kepentingan ekonomi beberapa negara yang menjadi semakin bergantung pada Kongo demi memenuhi kebutuhan perekonomian yang menjadi mandat mereka.<sup>14</sup>

Adapun Liisa Lakso dan Harri Hinkannen berpendapat bahwa krisis di Kongo sulit diatasi karena adanya persaingan antar blok kekuatan di Kongo; (terutama antara timur dan selatan). Perpecahan diantara negara anggota masing-masing blok kawasan ini terjadi sedikit banyak dipengaruhi oleh kekayaan alam Kongo yang melimpah ruah. Oleh karenanya, muncul perbedaan pendekatan pemecahan konflik antara Afrika Selatan dengan Zimbabwe (di bagian selatan) serta persetujuan antara Rwanda dan Uganda di bagian timur. Perpecahan dan persaingan antar blok ini ini misalnya terjadi antara Afrika selatan yang mendukung solusi diplomatik dalam konflik Kongo, melawan kelompok yang mendukung solusi militer (Zimbabwe, Angola dan Namibia). Pertentangan ini memiliki nuansa politis berupa kedekatan Afrika Selatan dengan AS; yang dalam hal ini cenderung mendukung Rwanda dan Uganda, ataupun ambisi pribadi Robert Mugabe untuk dilihat sebagai pemimpin yang berpengaruh di kawasan.

Tantiana Carayannis mengemukakan pendapat yang sama dalam tulisannya, dimana ia menilai aktor-aktor di kawasan Afrika Timur dan Selatan terpecah dan memiliki kepentingan masing-masing diluar implementasi usaha perdamaian. Hal itu bukan saja mempersulit proses terbentuknya LCA, namun juga memperparah proses implementasi; khususnya pada poin penarikan mundur pasukan asing dan implementasi dialog nasional di Kongo yang menurutnya sarat

---

<sup>14</sup> James Baxter, *The Business of War*, The World Today, Vol. 57, No. 2 (Feb., 2001), pp. 16-17

akan persaingan pengaruh negara-negara di kawasan. Hal ini terbukti mempersulit tercapainya kesepakatan baru mengenai pemerintahan transisi pada tahun 2002, terlambat 2,5 tahun dari tenggat waktu yang diharapkan.

### **1.3.3. Faktor Pengaruh Sifat Ketentuan Dalam Persetujuan Gencatan Senjata Terhadap Terhambatnya Proses Perdamaian di Kongo**

Patricia Daley dalam penelitiannya menemukan bahwa konsep persetujuan perdamaian yang diadvokasikan di RDK walau telah mengakui melibatkan adanya kekerasan struktural di tiga konflik besar di kawasan danau besar Afrika (Rwanada, Burundi dan Kongo), namun masih mengalami banyak hambatan. Hal ini disebabkan oleh perjanjian yang terlalu berpatokan pada prinsip liberal barat dengan penitikberatan pada kekuasaan politik aktor yang berkonflik semata<sup>15</sup>. Hal ini yang menyebabkan solusi perdamaian di Afrika terhambat, padahal seharusnya dinamika konflik lokal lebih dipertimbangkan serta partisipasi yang lebih luas dari konstituen dari wilayah konflik harus diikutsertakan. Pada negosiasi Lusaka misalnya, Daley berpendapat bahwa tidak dilibatkannya anggota masyarakat sipil yang tidak bersenjata justru memudahkan kooptasi dan manipulasi dari pemerintahan Kabila dan kelompok pemberontak dalam proses dialog nasional Kongo. Dalam pelaksanaannya, pemerintah seringkali menunjuk kelompok yang pro-pemerintah dan tidak begitu representatif terhadap masyarakat Kongo; demikian pula dengan kelompok pemberontak.

Adapun Swart Gerry dan Hussein Solomon berpendapat, bahwa kegagalan perjanjian Lusaka disebabkan dua hal:<sup>16</sup> (a) perjanjian Lusaka sendiri sifatnya terlalu idealis dan tidak realistis targetnya; dan (b) kurang terkoordinasinya implementasi ICD dengan operasi perdamaian PBB di RDK (selanjutnya

---

<sup>15</sup> Patricia Daley, *Challenges to Peace: Conflict Resolution in the Great Lakes Region of Africa*, dalam jurnal *Third World Quarterly*, Vol. 27, No. 2 (2006), pp. 303-319

<sup>16</sup>Swart Gerry & Hussein Solomon, *A Critical Assessment Whether Lusaka Ceasefire Agreement Has Been A Success* dalam *Centre for International Political Studies*.

disingkat sebagai MONUC), dimana kegagalan dalam memberikan jaminan *power sharing* dan keamanan membuat pihak yang berkonflik terust erjebak dalam lingkaran kekerasan sehingga gagal memanfaatkan potensi stalemate yang ada.

## 1.4. Kerangka Pemikiran

### 1.4.1. Definisi Konseptual: Konsep Resolusi Konflik

Wallensteen mendefinisikan Konflik sebagai situasi ketidakstabilan sosial yang terdiri dari minimal dua aktor atau pihak yang berusaha untuk mencapai kepentingannya masing-masing dalam waktu yang sama atas ketersediaan serangkaian sumber daya yang langka<sup>17</sup>. Pemikiran resolusi konflik berangkat dari keyakinan bahwa konflik dapat dicegah dan diselesaikan melalui berbagai strategi yang diarahkan pada faktor-faktor penyebabnya. Terminologi resolusi Konflik yang digunakan dalam tulisan ini mengacu pada tulisan Ramsbotham, Woodhouse dan Miall yang memilih menggunakan istilah ini dibandingkan istilah lainnya (*conflict management, conflict regulation*) dan juga memasukan *conflict transformation* sebagai bagian dari konsep resolusi konflik.<sup>18</sup> Pada dasarnya Resolusi konflik berbeda dengan manajemen konflik ataupun *conflict termination* yang berfokus pada upaya untuk meredam konflik semata. Resolusi konflik hadir sebagai jembatan antara konsep yang sempit tentang perdamaian berupa ketiadaan perang, dan perdamaian yang lebih luas sebagai upaya memperbaiki ketidakadilan sosial (*social injustice*) yang kerap menjadi sumber munculnya konflik. Resolusi konflik sendiri pada dasarnya adalah kajian yang didasarkan pada pemikiran bahwa penyelesaian konflik membutuhkan proses penciptaan struktur baru yang kondusif bagi tercapainya kebutuhan dasar manusia, yang bila tidak tercapai,

---

<sup>17</sup>Peter Wallensteen, *Understanding Conflict Resolution*, dalam *Understanding Conflict Resolution: War, Peace, and The Global System*, (London: Sage Publication, 2002), hlm. 16.

<sup>18</sup>Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse & Hugh Miall, *Op.cit.*, hlm. 8 – 9.

seringkali menjadi akar penyebab pecahnya konflik.<sup>19</sup>

Charless Hauss menjelaskan ada 4 siklus (*life cycle*) dalam sebuah konflik internasional yakni<sup>20</sup>: (a) terciptanya krisis (*crisis creation*) dimana ketegangan semakin mendalam sampai titik dimana kekerasan menjadi opsional bagi pihak-pihak yang terlibat; (b) perubahan menjadi perang (*turning to war*) dimana eskalasi kekerasan berubah menjadi konflik terbuka dalam skala yang bisa dikategorikan sebagai perang; (c) fase penghentian pertikaian (*stopping the fighting*) yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kekerasan yang seringkali diasosiasikan dengan kondisi konflik yang mencapai *hurting stalemate* dimana intervensi konstruktif pihak ketiga untuk membantu jalannya perdamaian menjadi dimungkinkan; dan (d) fase upaya membangun perdamaian yang stabil (*building a stable peace*) dimana semua pihak, baik yang bertikai maupun berlaku sebagai penengah menciptakan kembali baik dengan demokratisasi ataupun *statebuilding*.

Mirip namun tidak seluruhnya sama Ramsbotham, Miall & Woodhouse memberikan konseptualisasi sembilan macam fase konflik yang berbentuk kurva parabola terbalik, kemudian mereka memberikan tiga macam strategi resolusi konflik, yakni<sup>21</sup>: (a) *conflict transformation*, untuk merespon situasi awal eskalasi konflik dan membantu mempercepat fase de-eskalasi konflik, (b) *conflict settlement*, untuk menjembatani polarisasi kepentingan dan mengurangi faktor-faktor struktural yang berpotensi menimbulkan konflik atau menyebabkannya kembali muncul, dan (c) *conflict containment* yang merupakan upaya meredam konflik yang telah atau hampir mencapai status perang. Berikut adalah gambar yang menunjukkan konseptualisasi Ramsbotham, Woodhouse & Miall.<sup>22</sup>

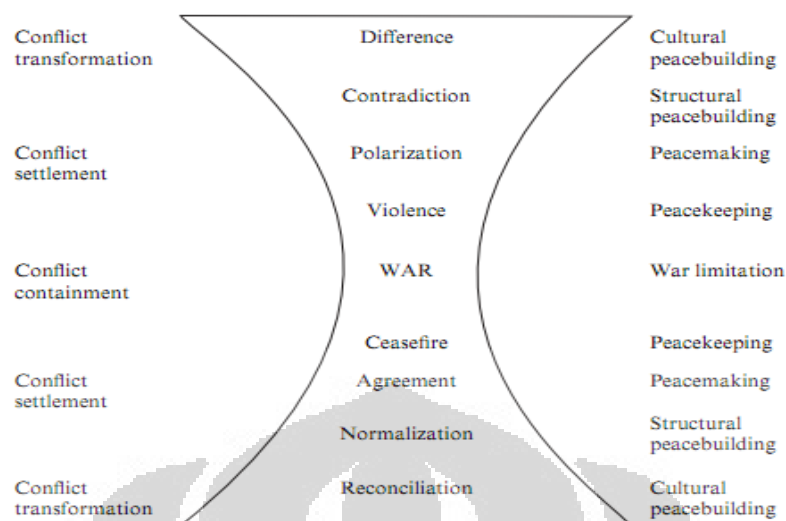
---

<sup>19</sup> John W. Burton, *Conflict: Resolution and Prevention*, (London: Macmillan, 1990), hlm. 36-48.

<sup>20</sup> Charless Hauss, *International Conflict Resolution*, (Great Britain: Biddles Ltd, Guildford & King's Lynn, 2001), hlm. 25 – 29.

<sup>21</sup> Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse & Hugh Miall, *Op. cit.*, hlm. 12.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 12.



*Peace Agreement* atau persetujuan damai merupakan kesepakatan yang mencakup ketentuan-ketentuan yang akan mengatur target apa yang akan diupayakan dan ketentuan prosedural tata cara implementasi sebuah upaya perdamaian<sup>23</sup>. Perjanjian damai sendiri merupakan bagian yang integral dengan resolusi konflik yang berfungsi sebagai fondasi awal upaya resolusi konflik. Namun, *Peace Agreement* sendiri belum tentu dapat mewujudkan sebuah kondisi perdamaian karena diperlukan implementasi konkret dan ideal sebagai tindak lanjutnya. Dalam aspek normatifnya, suatu persetujuan menurut Galtung, dapat membantu transformasi konflik dari pengalaman yang destruktif, memecah belah, menuju suatu keadaan yang konstruktif dengan adanya upaya kolektif.<sup>24</sup> Oleh karenanya, hubungan konsep resolusi konflik dan perjanjian damai dalam tulisan ini dapat dilihat dalam pengertian resolusi konflik sebagai upaya penyelesaian dari pihak-pihak yang berkonflik dengan mengadakan perjanjian untuk mengatasi inti ketidaksesuaiannya, menerima keberlanjutan eksistensi pihak lain, dan menghentikan segala tindak kekerasan satu sama lain, dalam sebuah implementasi

<sup>23</sup>Jullian Oullet, *Procedural Components of Peace Agreements*, diakses dari [http://crinfo.beyondintractability.org/essay/procedural\\_peace\\_agree/?nid=1397](http://crinfo.beyondintractability.org/essay/procedural_peace_agree/?nid=1397), pada 10 Oktober 2011 pukul 03.41 WIB.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 36.

perjanjian gencatan senjata.<sup>25</sup>

#### 1.4.2 Teori tentang Kematangan Konflik yang Mempengaruhi Implementasi Perjanjian Damai dalam Konflik Sipil

Fen Osler Hampson menilai proses implementasi sebuah perjanjian damai mempengaruhi tercapainya penyelesaian damai yang *sustainable*<sup>26</sup>. Fokus dalam kajian Hampson adalah proses pencapaian damai yang telah dinegosiasikan untuk masalah subnegara atau konflik interkomunal, yang melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini PBB, yang telah secara aktif terlibat tidak hanya dalam proses *peacemaking*, namun juga *post-conflict peacebuilding*. Menurut Hampson, tantangan utama dalam mengelola proses perdamaian di konflik sipil intranegara adalah kesulitan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan semua pihak, serta dalam menjaga pihak yang bertikai melanjutkan keterlibatannya dalam proses perdamaian yang telah disetujui. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengimplementasian persetujuan damai, diantaranya dalam tulisan Hampson dapat terdiri dari<sup>27</sup>: keterlibatan pihak ketiga; kematangan konflik; keseimbangan sistemik dan regional; dan sifat substansi dari persetujuan damai itu sendiri.

Adapun penelitian ini akan berfokus pada faktor kedua saja dikarenakan dua hal, yakni: (a) sudah ada banyak kajian dilakukan untuk membahas kegagalan implementasi perjanjian Lusaka dengan menggunakan analisis faktor-faktor yang telah diungkapkan Hampson, kecuali pada bagian kematangan konflik yang biasanya menjadi bagian minor; (b) penulis tertarik untuk membahas hubungan yang ditimbulkan antara kekayaan alam, kompleksitas aliansi yang terus berubah dan personifikasi konflik di RDK untuk dikaitkan dengan konsep

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>26</sup> Fen Osler Hampson, "What Makes A Peace Settlement Stick?" dalam *Nurturing Peace: Why Peace Settlements Succeed or Fail*, (Washington: United States Institute of Peace, 1996), hlm. 12.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 8

ketidakmatangan konflik karena hal ini berpotensi untuk memberikan eksplorasi lebih menyeluruh terhadap sisi internal perang Kongo kedua dan permasalahan-permasalahan yang meliputi usaha pengimplementasian LCA sendiri.

Konsep kematangan konflik sebagai sebuah analisa akademis terhadap kajian mengenai upaya perdamaian, lahir dalam tradisi berpikir *soft realism*. Pemikir aliran ini menilai bahwa keterlibatan pihak ketiga hanyalah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jalannya upaya perdamaian (dalam konteks upaya implementasi kesepakatan perdamaian), berbeda dengan cara pandang para pemikir *hard realist* yang kerap memberi penekanan yang kuat terhadap keterlibatan pihak ketiga dalam konflik yang terbatas cakupannya hanya kepada negara *superpower* ataupun *regional power broker* di kawasan.<sup>28</sup>

Kematangan konflik dikatakan mempengaruhi jalannya proses implementasi persetujuan damai dikarenakan dinamika konflik sangatlah penting dalam mempengaruhi terhadap kondusivitas lingkungan konflik dan tingkah laku dari pihak-pihak yang bertikai<sup>29</sup>. Ketika kondisi lingkungan memungkinkan penggunaan kekerasan yang rasional dalam kalkulasi strategis pihak-pihak yang bertikai maka hal tersebut secara langsung mengurangi kredibilitas dan efektivitas pelaksanaan implementasi perjanjian damai dan upaya resolusi konflik lainnya. Pada titik inilah I. William Zartman melihat bahwa bahwa konflik harus mencapai level *hurting stalemate*, untuk mencapai situasi dimana konflik menjadi '*ripe for resolution*' dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak lagi merasa mereka dapat melanjutkan pertikaian dengan menggunakan kekuatan semata untuk meraih keuntungan unilateral dari pertikaian mereka.<sup>30</sup> Hampson berpendapat bahwa

---

<sup>28</sup> Fen Osler Hampson, *Parent, Midwife or Accidental Executioner?: The Role of Third Parties in Ending Violent Conflict* dalam *Turbulent Peace: The Challenge of Managing Violent Conflicts*, (Washington: United States Institute of Peace, 2001), hlm. 390-391.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 391.

<sup>30</sup>Sadia Touval & I. William Zartman, *International Mediation in The Post-Cold War Era*, dalam Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson & Pamela Aal, *Turbulent Peace: The Challenge of Managing Violent Conflicts*, (Washington: United States Institute of Peace, 2001), hlm. 433-434.

dalam situasi tersebutlah implementasi perdamaian menjadi mungkin untuk dicapai, karena pihak-pihak yang bertikai mendapati diri mereka menjajaki opsi alternatif terhadap solusi militer untuk memenangkan konflik, dalam hal ini: koeksistensi dan rekonsiliasi.<sup>31</sup>

Lebih lanjutnya Zartman menggagas dua syarat bagi terciptanya kematangan konflik: adanya deadline terhadap krisis dan terciptanya situasi *Mutually Hurting Stalemate* (MHS). Idealnya MHS tercipta ketika pihak-pihak yang terlibat dalam konflik merasakan tidak nyaman dikarenakan kebuntuan konflik yang mahal (*uncomfortable in the costly dead end*). Situasi ini tercipta dari tingginya biaya untuk melanjutkan konflik sangat memberatkan dibandingkan dengan biaya untuk mencapai dan menjalankan sebuah persetujuan damai entah itu karena disebabkan kemungkinan kalah jika melanjutkan konflik, korban jiwa yang sudah terlalu besar ataupun karena semakin menguatnya tekanan politik baik yang berasal dari konstituen domestik maupun dari masyarakat internasional terhadap pihak-pihak yang bertikai<sup>32</sup>. Selanjutnya Zartman menilai dalam implementasi ataupun mediasi konflik, peranan tenggat waktu (*deadline*) menjadi penting karena mediator dapat menggunakan hal tersebut sebagai katalis dalam penyelesaian konflik baik secara persuasif maupun koersif.<sup>33</sup> Kombinasi keberadaan tenggat waktu dan MHS menurut Zartman dapat dijadikan amunisi bagi mediator untuk mendorong implementasi perjanjian damai ataupun negosiasi dengan menciptakan adanya persepsi urgensi terhadap *'intolerable situation'* bagi pihak-pihak yang bertikai untuk merubah *combative mentality* mereka menjadi *conciliatory mentality*<sup>34</sup>. Zartman juga kemudian menambahkan faktor munculnya bencana besar, adanya pengakuan, dan upaya yang melibatkan perwakilan dari pihak yang bertikai untuk ikut serta dalam upaya penyelesaian konflik dan

---

<sup>31</sup>Fen Osler Hampson, *Op.Cit*, hlm.14

<sup>32</sup>Sadia Touval dan I. William Zartman, *Op.cit.*, hlm. 434.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 434.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 435.



munculnya jalan keluar dari konflik (*exit strategy*) dalam komposisi faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya MHS.<sup>35</sup>

Pemikir lain, Richard N. Haass menyatakan kondisi konflik yang matang sebagai kondisi yang menghendaki penyelesaian secara diplomatik atau keadaan yang kondusif untuk dilaksanakannya solusi atau negosiasi. Keadaan yang dimaksud Haass, diantaranya: adanya persepsi bersama untuk menyepakati suatu perjanjian, keinginan untuk berkompromi, formulasi kepentingan dari masing-masing pihak berkonflik terlindungi, dan penyelesaian yang diupayakan dapat diterima oleh masing-masing pihak yang berkonflik.<sup>36</sup>

Hampson sendiri menyatakan bahwa kematangan konflik akan semakin mudah tercapai apabila faktor-faktor sebagai berikut muncul:<sup>37</sup> *pertama*, pihak yang bertikai telah meredefinisikan kepentingannya yang dapat disebabkan adanya perubahan kepemimpinan, tekanan dari konstituen yang tidak lagi menginginkan status quo konflik, dan perubahan kalkulasi strategis;<sup>38</sup> *kedua*, norma yang lama dan pola tingkah lakunya telah tergantikan dengan norma baru yang memungkinkan adanya kompromi untuk mencapai penyelesaian; *ketiga*, pihak yang bertikai secara bersama-sama mempersepsikan suatu persetujuan damai yang dikehendaki dalam upaya menyelesaikan perseteruan; *keempat*, pihak-pihak yang bertikai telah setuju atas proses yang menghubungkan penyelesaian perbedaan; *kelima*, adanya rumusan yang memberi kesempatan untuk bernegosiasi untuk mengakhiri permusuhan. Hampson menekankan bahwa mediasi yang dilakukan dalam kondisi yang tidak matang dapat membawa persetujuan damai dan implementasinya menjadi tidak produktif.

<sup>35</sup>I. William Zartman, "Ripening Conflict, Ripe Moment, Formula, and Mediation, dalam *Perspective on Negotiation*, (Washington DC: US Dept. Of State, 1986), hlm. 217-218.

<sup>36</sup> Richard N. Haass, *Conflict Unending The United States and Regional Disputes*, (New Haven: Yale University Press, 1990), hlm. 6, 27 dan 28.

<sup>37</sup>Fen Osler Hampson, *Parent, Midwife or Accidental Executioner?: The Role of Third Parties in Ending Violent Conflict*, *op.cit.*, hlm. 392

<sup>38</sup> Janice Gross Stein, "Getting To The Table, Triggers, Stages, Functions, and Consequences, of Pre-negotiation", dalam *International Journal* 42, no 2 (Spring 1989), hlm. 475-502.

Dengan menarik garis penghubung dari faktor-faktor yang disampaikan oleh berbagai pemikir di atas, dapat disimpulkan empat faktor yang mempengaruhi terciptanya kematangan konflik, yakni: (a) terciptanya situasi *Mutually Hurting Stalemate* (MHS); (b) adanya pergantian cara berpikir dan perilaku pihak yang berkonflik dalam menyikapi kepentingannya masing-masing yang berubah menjadi kesamaan cara pandang terhadap kebutuhan untuk menyelesaikan konflik melalui cara berdamai; dan (c) adanya asumsi dasar, proses dan mekanisme penciptaan perdamaian yang dapat disetujui pihak yang berkonflik.

### 1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini akan dilakukan secara kuantitatif, yang berusaha mencari kebenaran berdasarkan deskripsi mengenai suatu variabel dan hubungan antarvariabel, dengan daya generalisasinya. Penelitian ini bertujuan untuk membangun validitas internal dan eksternal, yaitu keakuratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dan generalisasi yang baik berlaku dalam konteks lain dari hubungan variabel tersebut.<sup>39</sup> Penelitian kuantitatif dalam tulisan ini tidak akan banyak berisikan angka dan uraian statistik namun lebih mengacu kepada keakuratan deskripsi setiap variabel dan keakuratan deskripsi hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya<sup>40</sup>. Alur berpikir yang digunakan adalah alur berpikir deduktif, yaitu:

**Pengamatan→Hipotesis→Pengumpulan data→Pengujian**  
**Hipotesis→Kesimpulan**

Data yang akan secara ekstensif digunakan dalam penelitian ini adalah tipe data kuantitatif yang didapatkan melalui dua cara: *Pertama*, data akan disadur dari studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai perjanjian gencatan senjata Lusaka dan proses implementasinya. Studi kepustakaan dalam penelitian ini akan didasari

<sup>39</sup>Dr. Prasetya Irawan, M.Sc, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Depok: Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI, 2006), hlm. 102-103.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 101.

oleh tulisan-tulisan yang terdapat pada tesis skripsi, buku dan jurnal ilmiah ataupun artikel berita dari internet.

Analisa dalam tulisan ini akan menggunakan metode kuantitatif-deduktif, dimana teori akan dipakai pada awal rencana penelitian sebagai pedoman analisa<sup>41</sup>. Pada dasarnya tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menguji atau membuktikan sebuah teori dan bukan dipakai untuk mengembangkan teori.<sup>42</sup>Oleh karena itu sesuai dengan prinsip penelitian kuantitatif, analisa data yang digunakan dalam penelitian ini akan berpatokan pada teori, sehingga operasionalisasi data dan variabel hanya akan diperuntukkan bagi data dan variabel yang berkaitan dengan teori yang digunakan.

#### **1.6. Operasionalisasi Konsep**

Penelitian ini adalah penelitian yang berbasiskan teori bahwa kematangan konflik dapat mempengaruhi jalannya implementasi *peace agreement*. Penelitian ini akan memiliki satu variabel dependen dan satu variabel independen yang akan dikaji hubungan relasionalnya.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kegagalan upaya resolusi konflik melalui LCA di RDK. Variabel ini memiliki tiga faktor yang mempengaruhinya, yakni: (a) ada atau tidaknya penambahan jumlah dan skala kekerasan secara signifikan paska gencatan senjata (*ceasefire*) yang menandakan kegagalan fungsi *conflict containment*; (b) berjalannya upaya bersama untuk menanggulangi potensi konflik akibat permasalahan struktural di RDK sebagai fungsi *conflict settlement*; dan (c) adanya proses rekonsiliasi nasional pihak-pihak bertikai yang diarahkan menuju terciptanya dispensasi politik baru di RDK sebagai bentuk upaya sebagai fungsi *conflict transformation*.

---

<sup>41</sup> John W. Cresswell, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches; Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif, 2<sup>nd</sup> ed.*, (Jakarta: KIK Press, 2003), hlm 84

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 99.

Masing-masing faktor memiliki dua indikator yang akan menghasilkan dua kategorisasi hasil observasi untuk selanjutnya dikonversikan menjadi nilai penyusun bobot variabel kegagalan resolusi konflik dalam tulisan ini. Pengukuran yang akan dilakukan terhadap *conflict containment* akan didasarkan pada faktor keberhasilan melakukan pembatasan secara geografis (*geographical constraint*) pada konflik dan keberhasilan melakukan upaya mitigasi dan pengurangan tingkat kekerasan dan frekuensi dari konflik yang terjadi paska penandatanganan Lusaka.<sup>43</sup> Adapun pengukuran terhadap upaya *conflict settlement* akan dilakukan terhadap jalannya proses dialog nasional Kongo (ICD) yang akan didasarkan pada indikator adanya pernyataan rekonsiliasi (*stated reconciliation*) yang diumumkan oleh pihak-pihak yang bertikai di RDK dan adanya perubahan nyata dalam perilaku pihak-pihak yang berkonflik menjadi lebih positif terhadap prospek koeksistensi.<sup>44</sup> Dan terakhir faktor *conflict transformation* akan dinilai dari indikator keberhasilan upaya tersebut menciptakan transformasi terhadap faktor-faktor struktural yang dapat mendorong kembali terciptanya konflik.<sup>45</sup>

Berikut adalah tabel 1.1 yang menggambarkan operasionalisasi variabel terikat dalam penelitian ini:

Operasionalisasi Variabel Dependen: Kegagalan Resolusi Konflik			
Dimensi	Indikator	Kategori	Nilai
<i>(Conflict containment)</i> Apakah tidak terjadi pengurangan tingkat konflik paska LCA? <i>(Geographical constraint) &amp; (Violence Minimization)</i>	Geografis	Sempit	1
		Luas	2
	Korban Jiwa	Sedikit	1
		Banyak	2
<i>Conflict transformation)</i> Apakah muncul upaya bersama untuk	Pernyataan	Banyak	1
		Sedikit	2

<sup>43</sup> Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse & Hugh Miall, *Op.cit.*, hlm. 29.

<sup>44</sup> Felicity Olson, *Beyond Conflict Settlement: Peacebuilding in the Pacific*, Thesis Untuk Program Master of Arts Ilmu Politik Universitas Canterbury tahun 2010, diakses dari [http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/5015/1/thesis\\_fulltext.pdf](http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/5015/1/thesis_fulltext.pdf), pada 20 Desember 2011 pukul 12.33 WIB.

<sup>45</sup> Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse & Hugh Miall, *Op.cit.*, hlm. 29

menanggulangi faktor-faktor struktural penyebab konflik dengan komitmen bersama terhadap <i>statebuilding</i> ? Semakin sedikit kemajuan positif yang terjadi semakin besar nilai indikator dimensi ini.	Tindakan	Banyak	1
		Sedikit	2
<i>(Conflict Settlement)</i> Apakah terjadi upaya bersama untuk menciptakan proses rekonsiliasi nasional dan terciptanya dispensasi politik baru di RDK? Semakin sedikit kemajuan positif yang terjadi semakin besar nilai indikator dimensi ini.	Pernyataan	Banyak	1
		Sedikit	2
	Tindakan	Banyak	1
		Sedikit	2

Oleh karenanya, secara sederhana operasionalisasi variabel terikat tulisan ini berupaya menjumlahkan faktor-faktor yang terkait dapat dirumuskan menjadi:

$$VT = RK = \sum CC+CS+CT \quad (1.1)$$

Adapun persamaan tersebut dijabarkan sebagai berikut: RK = Resolusi konflik; CC = *Conflict Containment*; CS = *Conflict Settlement*; CT = *Conflict Transformation*.

Masing masing dari faktor-faktor yang menyusun persamaan resolusi konflik ini memiliki dua kategori: rendah (dengan nilai 1) dan tinggi (dengan kategori 2). Oleh karenanya nilai total dari persamaan ini memiliki nilai terendah 6 dan nilai maksimal 12.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kematangan konflik (*conflict ripeness*) yang dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni: (a) ada tidaknya *Mutually Hurting Stalemate*; (b) redefinisi kepentingan oleh aktor yang berkonflik menuju konvergensi persepsi terhadap kebutuhan untuk berdamai; dan (c) Adanya proses dan mekanisme yang disetujui untuk menciptakan perdamaian oleh pihak-pihak yang bertikai.

Faktor MHS akan dibagi menjadi dua yakni dilihat dari pertimbangan politik dan militer untuk melanjutkan atau menghentikan konflik yang merupakan turunan dari ‘faktor politik’ semata. Faktor redefinisi kepentingan (*conflict redefinition* sendiri akan diturunkan menjadi dua indikator dasar yakni adanya pernyataan yang menunjukkan tahap perubahan kepentingan pihak-pihak yang bertikai dari sikap bermusuhan menjadi akomodatif terhadap proses perdamaian dan adanya tindakan yang menunjukkan konfirmasi terhadap sikap tersebut. Adapun

faktor ketiga diperhitungkan sama dengan faktor yang kedua dengan juga melihat pernyataan pihak tertentu yang bertikai di media atau forum negosiasi sebagai sebuah awal dari perubahan postur strategi politik yang berujung pada tindakan nyata yang merupakan materialisasi terhadap perubahan tersebut.

Berikut adalah tabel 1.2 sebagai operasionalisasi variabel dependen penelitian ini:

Operasionalisasi Variabel Independen: Kematangan Konflik			
Dimensi	Indikator	Kategori	Nilai
Apakah tercipta kondisi <i>Mutually Hurting Stalemate</i> dari pihak-pihak yang bertikai?	Militer	Sempit	1
		Luas	2
	Ekonomi	Sedikit	1
		Banyak	2
Apakah terjadi redefinisi kepentingan dari pihak-pihak yang bertikai terhadap konvergensi sikap mendukung upaya perdamaian?	Pernyataan	Banyak	1
		Sedikit	2
	Tindakan	Banyak	1
		Sedikit	2
Adakah proses dan mekanisme yang disetujui oleh segenap pihak untuk berdamai?	Pernyataan	Banyak	1
		Sedikit	2
	Tindakan	Banyak	1
		Sedikit	2

Oleh karenanya, secara sederhana operasionalisasi variabel bebas tulisan ini dapat dirumuskan menjadi:

$$VI = KK = \sum MHS + CR + CP \quad (1.2)$$

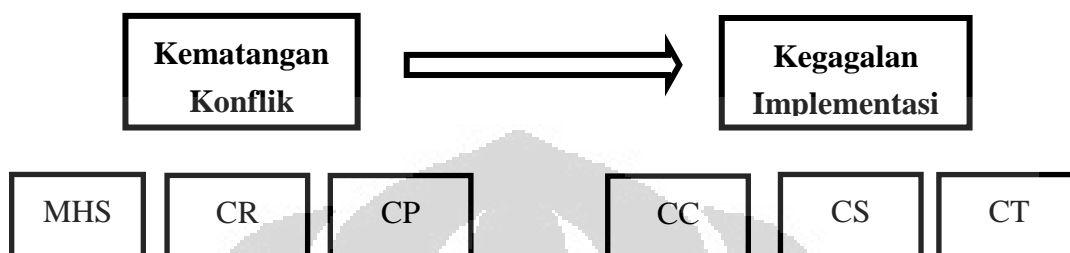
Persamaan bagi variabel independen ini sendiri dapat dijabarkan sebagai berikut: KK = kematangan konflik (*conflict ripeness*); MHS = *Mutually Hurting Stalemate*; CR: *Conflict Redefinition*; dan CP = *Consent on Peace Process*.

Mirip dengan variabel terikat, masing masing faktor dari variabel yang menyusun persamaan resolusi konflik ini memiliki dua kategori: rendah (dengan nilai 1) dan tinggi (dengan kategori 2). Oleh karenanya nilai total dari persamaan ini memiliki nilai terendah 6 dan nilai maksimal 12 yang menjadikannya berada di kisaran nilai yang sama dengan variabel dependen penelitian ini.

## 1.7. Model Analisa Sederhana

Secara sederhana hubungan kedua variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema 1.1 berikut:

Skema 1.1 Model Analisa Sederhana



## 1.8. Hipotesa dan Asumsi Penelitian

### 1.8.1. Hipotesa

Hipotesa yang dapat ditarik dan akan dibuktikan melalui penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengimplementasian Perjanjian Damai Lusaka dalam konflik di Republik Demokrasi Kongo terhambat karena faktor faktor konflik yang belum matang.
2. Ketidakmatangan konflik Kongo II disebabkan belum adanya *mutually hurting stalemate* bagi pihak-pihak yang bertikai.
3. Ketidakmatangan konflik Kongo II disebabkan belum adanya redefinisi kepentingan oleh pihak-pihak yang bertikai untuk mendukung upaya perdamaian yang dilakukan.
4. Ketidakmatangan konflik Kongo II disebabkan belum proses perdamaian yang disetujui oleh segenap pihak yang bertikai di konflik Kongo II.

### 1.8.2 Asumsi

Berdasarkan permasalahan dan operasionalisasi konsep yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti mengemukakan beberapa asumsi,:

1. Kondisi lingkungan pengimplementasian suatu kesepakatan damai dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kesiapan pihak yang bertikai untuk berdamai dengan mengacu pada persepsi mereka terhadap kematangan konflik.
2. Semakin sulitnya upaya melanjutkan konflik yang dihasilkan dari situasi kebuntuan dalam konflik yang merugikan maka pihak yang bertikai akan cenderung melakukan kalkulasi rasional yang menghasilkan dukungan terhadap implementasi perjanjian damai.
3. Ketika setiap aktor yang berkonflik cenderung merubah persepsi kepentingannya dan cenderung mencapai konvergensi kepentingan maka hal tersebut mempermudah proses implementasi perjanjian damai di suatu area konflik.
4. Disepakatinya suatu proses dan mekanisme untuk menciptakan perdamaian secara internal dari masing-masing pihak yang bertikai akan mempermudah proses implementasi perjanjian damai.

### **1.9. Rencana Pembabakan Skripsi**

Penelitian dengan permasalahan dan model analisa di atas akan disusun ke dalam lima bab. Bab I adalah bagian pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, pertanyaan permasalahan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, dan sistematika penelitian. Bab II akan menjelaskan kegagalan implementasi LCA di Republik Demokrasi Kongo yang menyebabkan terhambatnya upaya resolusi konflik yang ada sehingga mengharuskan digantinya LCA oleh beberapa perjanjian lain yang lebih relevan. Bab III akan menjelaskan variabel independen yang terkait dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmatangan konflik di Kongo sewaktu LCA ditandatangani. Bab IV penelitian ini akan membahas hubungan faktor-faktor yang menciptakan ketidakmatangan konflik sewaktu



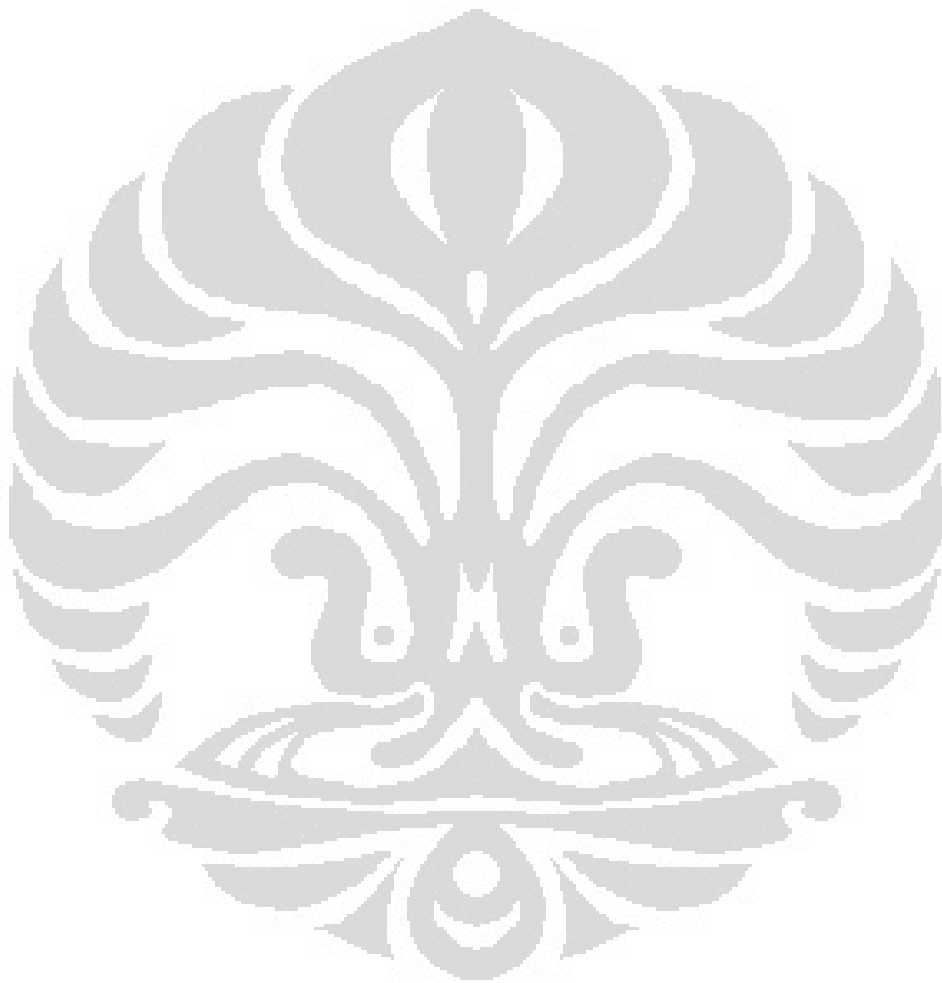
penandatanganan LCA di Kongo dan kegagalan upaya resolusi konflik Kongo kedua melalui implementasi LCA. Dan terakhir, Bab V akan menutup penelitian ini dengan penjabaran kesimpulan sekaligus rekomendasi dan usulan dari hasil temuan penulis untuk penelitian berikutnya.

#### **1.10. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari kegagalan implementasi LCA di Republik Demokrasi Kongo dengan konsep ketidakmatangan konflik. Upaya resolusi konflik sendiri sering dikatakan harus sangat memperhatikan berbagai elemen partikularistik konflik tersebut yang kerap memberikan dimensi tantangan tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah upaya penciptaan perdamaian. Konflik Kongo dalam konteks ini memiliki karakteristik yang sangat spesial sebagai konflik yang memiliki elemen multi-aktor, multi-etnis dan ekonomi didalamnya; yang kolaborasinya menambahkan nuansa baru dari sisi internal konflik ini sendiri. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan analisis mengenai kemungkinan adanya hubungan kegagalan LCA sebagai sebuah upaya resolusi konflik dengan mengkaji kemungkinan ketidakmatangan konflik itu sendiri sewaktu LCA ditandatangani.

Dengan mengambil fokus dalam membahas unsur ketidakmatangan konflik, signifikansi dari penelitian ini adalah untuk memberikan arah kajian yang relatif jarang ditulis terkait terhadap faktor-faktor yang memungkinkan terhambatnya implementasi sebuah persetujuan damai dalam sebuah upaya resolusi konflik yang biasanya terfokus pada kajian mengenai keterlibatan pihak ketiga, pengaruh negara-negara di kawasan konflik ataupun aspek legal normatif dari perjanjian itu sendiri. Adapun dengan mengambil contoh studi kasus perjanjian gencatan senjata Lusaka dan konflik Kongo yang kompleks dan memiliki jumlah korban jiwa yang terbesar setelah perang dunia kedua, penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademis terhadap studi perdamaian dalam

hubungan internasional dan sekaligus kajian mengenai kawasan Afrika.



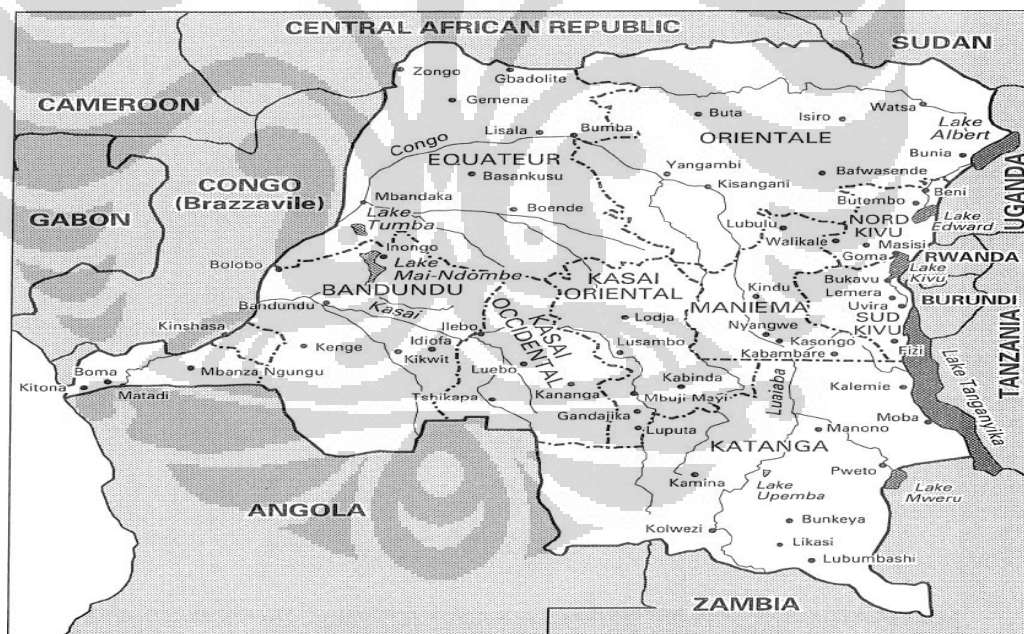
## BAB II

### KONFLIK KONGO KEDUA DAN DINAMIKA SEPUTAR IMPLEMENTASI *LUSAKA CEASEFIRE AGREEMENT*

#### 2.1 Latar Belakang dan Kronologis Konflik Kongo II

##### 2.1.1. Profil dan Sejarah Singkat Republik Demokrasi Kongo Sebelum Perang Kongo Kedua

Republik Demokrasi Kongo (dalam bahasa perancis bernama: *République démocratique du Congo*) adalah nama baru dari negara yang dulunya bernama Republik Zaire pada masa kekuasaan diktator Mobutu Sese Seko. Negara ini terletak di kawasan Afrika tengah dengan wilayah seluas 2,345,409 km atau kira-kira sama luasnya dengan 2/3 dari kawasan Eropa barat.<sup>46</sup> Dibawah ini adalah peta wilayah Republik Demokrasi Kongo<sup>47</sup>:



*Democratic Republic of the Congo*

<sup>46</sup> CIA World Fact Book, *Congo, Democratic Republic of*, diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html> pada 17 November 2011.

<sup>47</sup> Peta diambil dari *The International Relations Class 4701, Beyond The Heart of Darkness: A Diagnosis of a Failed State and Recommendations for Reform in the Democratic Republic of Congo*, (Canada: The University of Western Ontario, 2011) hlm 3.

RDK memiliki kekayaan alam berlimpah; simpanan deposit mineral langka seperti berlian dan coltan, tanah yang sangat subur untuk kawasan perkebunan dengan sumber air di daerah lembah sungai kongo seluas 3 juta mil persegi dan juga kepemilikan terhadap salah satu keragaman biodiversitas terbesar di dunia.<sup>48</sup> Namun RDK menjadi salah satu negara termiskin di dunia dengan pendapatan nasional per kapita hanya sebesar US\$320.<sup>49</sup> Kondisi tersebut disebabkan oleh terjadinya 11 konflik di wilayah RDK diantara tahun 1960-2010.<sup>50</sup>

Oleh karenanya, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa sejarah Kongo senantiasa diwarnai oleh turbulensi politik akibat pengaruh pihak eksternal. Bermula pada era kekuasaan raja Leopold II dari Belgia yang menjadikan Kongo sebagai milik pribadinya dengan nama *The Congo Free State*, penduduk asli Kongo telah menjadi korban dari sistem kapitalisme barat yang menerapkan sistem kerja paksa, perbudakan dan pembunuhan terhadap beribu-ribu penduduk asli Kongo demi kepentingan untuk mencukupi kebutuhan akan pekerja di lahan-lahan perkebunan di Kongo.<sup>51</sup>

Selain itu wilayah Kongo modern merupakan hasil penarikan batas wilayah yang arbitrer dari penguasa kolonial dulu yang sama sekali tidak memperhitungkan kondisi demografi dan terutama permasalahan etnisitas yang menjadi tema besar dalam konflik Kongo moderen.<sup>52</sup> Bahkan, paska kemerdekaan Kongo di tahun 1960, Belgia tetap ikut campur dalam polemik kekuasaan di Kongo ketika ia mendukung pasukan pemberontakan di Katanga (area yang kaya

---

<sup>48</sup> Patricia Daley, *Op.cit.*, hlm. 305

<sup>49</sup> Bureau of African Affairs, *Background Note of Democratic Republic of Congo*, US Department of State diakses dari <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2823.htm> pada 21 November 2011.

<sup>50</sup> Patricia Daley, *Op. Cit.*, hlm. 306.

<sup>51</sup> Yale University, *Belgian Congo*, Yale's Genocide Studies Program diakses dari [http://www.yale.edu/gsp/colonial/belgian\\_congo/index.html](http://www.yale.edu/gsp/colonial/belgian_congo/index.html) pada 1 Desember 2011 pukul 01.45 WIB.

<sup>52</sup> Jeanne M. Haskin, *Op.Cit.* hlm. 9 – 10.

dengan mineral di Kongo) sehingga menciptakan perang sipil yang memaksa PBB untuk menggelar operasi perdamaian (ONUC) untuk menyelesaikannya.<sup>53</sup>

Persaingan perang dingin ikut mempengaruhi perpolitikan Kongo baik dalam menciptakan pertentangan di kalangan elit politik Kongo dan terutama dalam terbunuhnya perdana menteri Patrice Lumumba yang terpilih secara demokratis di Kongo.<sup>54</sup> Peranan negatif dari barat juga dapat dilihat maupun dalam rezim otoriter pimpinan Mobutu Sese Seko yang menerima banyak sekali bantuan militer dari AS yang baru dihentikan paska runtuhnya Uni Soviet.<sup>55</sup>

Kekuasaan Mobutu Sese Seko menurut Jeanne, diwarnai oleh upaya sentralistik untuk memperkaya kantong pribadi presiden dan para kroni pendukungnya.<sup>56</sup> Upaya presiden Mobutu untuk mempertahankan kekuasaan dan mengamankan dirinya sendiri membawa efek buruk terhadap tentara nasional Kongo yang menjadi lebih terbiasa dan terlatih untuk meredam gejolak sosial yang menantang kekuasaan Mobutu dibandingkan dengan mempertahankan diri dari ancaman pasukan konvensional dari luar kongo.

Adapun perang Kongo kedua sendiri sangat terkait dengan perang kongo pertama yang kejadiannya hanya terpaut waktu dua tahun. Kedua konflik tersebut dipengaruhi elemen permusuhan etnisitas Tutsi – Hutu yang juga menjadi tema besar perang sipil Rwanda, Burundi dan Uganda. Sebenarnya baik etnis Tutsi maupun Hutu bukanlah etnis dominan dalam komposisi demografis RDK, namun negara ini terpengaruh efek *spillover conflict* dari Rwanda dikarenakan lemahnya penjagaan perbatasan di kawasan timur dan keputusan ceroboh dari presiden Mobutu yang memperparah kondisi ketidakstabilan di kawasan danau besar

<sup>53</sup> Phillip Roesler dan John Prendergast, *Op.cit.*, hlm. 230.

<sup>54</sup> Martin Kettle, *President 'Ordered Murde' of Congo Leader*, The Guardian edisi 10 Agustus 200, diakses dari <http://www.guardian.co.uk/world/2000/aug/10/martinkettle?INTCMP=SRCH> pada 13 Desember 2011 pukul 11.54 WIB.

<sup>55</sup> Emmanuel Ksiangani, "*Conflict in the Democratic Republic of Kongo: political abd Profut Interest*", diambil dari Jurnal *Accord*, edition 2000, diakses dari [http://www.accord.org.za/downloads/ct/ct\\_2000\\_1.pdf](http://www.accord.org.za/downloads/ct/ct_2000_1.pdf) hlm. 40

<sup>56</sup> Jeanne M. Haskin, *Op.Cit.*, 73 – 74.

Afrika. Adapun Turner mengatakan bahwa pada dasarnya tragedi di Kongo merupakan bagian dari *convergent catastrophes* dimana PBB memainkan peran yang cukup besar didalamnya.<sup>57</sup> Hal ini awalnya disebabkan kegagalan PBB dalam mencegah genosida di Rwanda yang bukan saja menciptakan tragedi kemanusiaan namun juga perasaan trauma penduduk etnis Tutsi Rwanda dan pemerintahan RPF (pemberontak Tutsi yang berhasil mengalahkan rezim mayoritas Hutu pada perang sipil paska genosida Rwanda). Kegagalan itu semakin diperparah ketika PBB tidak mampu menghentikan potensi meluasnya konflik ketika terjadi eksodus besar-besaran etnis Hutu ke wilayah timur Kongo (pada masa itu masih dipanggil Zaire), termasuk didalamnya kelompok milisi Hutu ekstrimis yang terlibat dalam genosida Rwanda. Kemudian sisa-sisa milisi Hutu melakukan konsolidasi dan melakukan berbagai serangan sporadis ke Rwanda (yang paska kemenangan RPF didominasi etnis Tutsi) dan etnis Banyamulenge (penduduk Kongo beretnis Tutsi yang sudah menetap di Kongo sejak era colonial Belgia) PBB pun gagal merespon keluhan Rwanda sehingga memberinya dorongan dan justifikasi untuk memulai agenda intervensinya di Kongo.<sup>58</sup> *Casus Belli* Pemerintah Rwanda menjadi semakin kuat ketika Mobutu memanfaatkan milisi Hutu ekstrimis untuk menekan perlawanan dan ketidakpuasan rakyat di bagian timur Kongo yang memiliki porsi etnis Tutsi yang cukup substansial (etnis Banyamulenge dan Kinyarwanda (untuk memudahkan identifikasi semua penduduk Tutsi Kongo akan disebut sebagai Banyamulenge)).<sup>59</sup> Akibat 'penerimaan Mobutu', milisi *interahamwe* dan ex-FAR dengan bebas melakukan konsolidasi kekuatan dan kemudian merongrong keamanan Rwanda (rezim pemerintahan baru yang pada saat itu didominasi etnis Tutsi akibat kemenangan RPF). Hal ini diperparah dengan tindakan Mobutu yang secara terang-terangan

<sup>57</sup> Thomas Turner, *Op.cit.*, hlm. 163 – 164.

<sup>58</sup> Emmanuel Ksiangani, *Op.cit.*, hlm. 41.

<sup>59</sup> BBC News Africa, *Q&A: Democratic Republic of Congo Conflict*, diakses dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11108589> pada 21 September 2011 pada pukul 12.22 WIB.



memusuhi etnis Tutsi yang telah lama menempati wilayah timur di Kongo dengan mengeluarkan kebijakan mencabut kewarganegaraan mereka.

Ancaman keamanan inilah yang memberikan insentif bagi Rwanda dan juga Uganda (yang mengalami nasib serupa Rwanda dengan bebasnya kelompok pemberontak dan separatis keluar masuk perbatasan Kongo untuk menyerang negara mereka) untuk menggalang kekuatan demi menyingkirkan Mobutu<sup>60</sup> Kedua negara ini dengan ‘dukungan kekuatan barat’ kemudian melancarkan pemberontakan dengan nama pasukan demokratis pembebasan Kongo (*Alliance Forces for Democratic Liberation of the Congo*, AFDL) untuk menggulingkan pemerintahan Mobutu yang dipimpin oleh Laurent Desire Kabila (selanjutnya akan disingkat menjadi L.D. Kabila atau Kabila Senior).<sup>61</sup> Serangan awal AFDL diiringi dengan berbagai pelanggaran HAM yang skalanya mengejutkan masyarakat internasional seperti tercermin dalam laporan perwakilan PBB untuk isu HAM, Chilean Roberto Garreton yang mengindikasikan adanya ‘*trail of blood*’ yang diakibatkan oleh pembantaian sistematis dari pasukan AFDL di kamp-kamp pengungsi Hutu dengan target para pelaku genosida Rwanda; namun tidak jarang mengorbankan pengungsi warga sipil Rwanda, dan bahkan penduduk Kongo provinsi Kivu selatan.<sup>62</sup> Awalnya tujuan utama dari partisipasi RPF adalah untuk memicu ekodus balik para pengungsi dan mantan tentara FAR dan milisi *Interahamwe* ke wilayah Rwanda dan mengakhiri permasalahan keamanan berlaru-larut yang dialaminya. Namun, ketidakpastian nasib yang menunggu para mantan pelaku genosida dan ketidakpercayaan yang mendalam di kalangan

---

<sup>60</sup>Ibrahim Agboola Gambari, *Perspectives on The Current Conflict in Africa: Verifying The Sepcial Nature of Today's African Conflict(Democratic Republic of Congo and Conflicts in Central Africa)*, dalam *The Symposium on Africa* yang diselenggarakan oleh *Japan Institute of International Affairs*, Tokyo 15 – 16 Februari 2001, hlm 2.

<sup>61</sup> \_\_\_\_, *Congo Civil War*, dalam *GlobalSecurity.org*, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/congo.htm> pada 1 November 2011 pukul 11.38 WIB.

<sup>62</sup> Francois Ngolet, *Crisis in Rwanda: The Rise and Fall of Laurent Kabila*, (AS: Palgrave Macmillan Ltd., 2011), hlm. 4

pengungsi Hutu justru membuat mereka lari ke barat semakin jauh memasuki wilayah hutan hujan tropis di Kongo.<sup>63</sup> Hal inilah yang menjadi awal mula permasalahan berkepanjangan di RDK dimana para milisi *Interahamwe* dan mantan tentara FAR melakukan perang gerilya melawan pasukan AFDL dan penggantinya nanti, RCD.

Adapun pada akhirnya AFDL dengan mudahnya memasuki ibukota Kongo diakibatkan dua faktor spesifik: *pertama*, karena adanya dukungan Rwanda dan Uganda secara ekstensif dan *kedua*, dikarenakan lemahnya pasukan nasional Kongo yang selama bertahun-tahun tidak terurus oleh kekuasaan pusat pemerintahan Mobutu.<sup>64</sup> Harapan terakhir Mobutu akan adanya bantuan eksternal pun sirna ketika Perancis gagal memprakarsai intervensi humaniter di Kongo sementara AS memilih untuk berperan pasif dalam menyikapi perkembangan situasi negara mantan partner terbesarnya di Afrika semasa perang dingin.<sup>65</sup>

### **2.1.2 Meletusnya Perang Kongo II (Pemberontakan Terhadap Laurent Kabila)**

Walaupun koalisi AFDL berhasil mengusir Mobutu dan mendirikan pemerintahan baru di RDK, Kabila senior segera saja mengalami tantangan legitimasi domestik karena sifat pemerintahannya yang mirip dengan Mobutu yang bersifat otoriter dan personalistik sehingga membuat popularitasnya berkurang di kalangan rakyat Kongo.<sup>66</sup> Kabila senior bukan saja mengalienasikan

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>64</sup> Anup Shah, *The Democratic Republic of Congo*, dalam *Global Issues*, pada 21 Agustus 2010, diakses dari <http://www.globalissues.org/article/87/the-democratic-republic-of-congo> pada 18 September 2011 pukul 11. 54 WIB.

<sup>65</sup> Howard W. French, *As Zaire Splits History Repeats Itself*, dipublikasikan oleh New York Times pada 11 November 1996. Diakses dari <http://www.nytimes.com/1996/11/11/world/as-zaire-splits-history-repeats-itself.html?ref=congothedemocraticrepublicof> pada 19 November 2011 pukul 14.22 WIB.

<sup>66</sup> International Crisis Group, *How kabila Lost His Way: The Performance of Laurent Desire Kabila Government*, Background Paper ICG DRC Report edisi 21 Mei 1999, hlm. 10 – 12.



pendukung domestiknya di AFDL dengan menolak revitalisasi demokrasi di Kongo, tetapi juga melakukan blunder politik dengan langsung mengusir penasihat militer dan tentara Rwanda dan Uganda dari Kongo yang merupakan upaya pemutusan hubungan sepihak Kabila terhadap mereka yang berjasa membantunya meraih kekuasaan.<sup>67</sup> Motivasi tindakan Kabila tersebut didasarkan pada semakin tidak puasnya rakyat Kongo terhadap struktur kekuasaan baru Kabila yang banyak diisi oleh ‘wakil Rwanda’ dan ‘etnis Tutsi’ yang diperparah dengan munculnya berbagai kekerasan antar etnis di bagian timur terutama di wilayah Bukavu dan Kivu terhadap etnis Tutsi Banyamulenge yang merupakan minoritas yang tiba-tiba memegang banyak sekali pucuk kekuasaan sebagai hasil kemenangan AFDL yang didominasi etnis Tutsi.<sup>68</sup> Kabila senior sempat berusaha meredakan potensi kerusuhan etnis yang ada dengan mengirim FAC (tentara nasional Kongo) ke wilayah timur Kongo yang kemudian terlibat dalam beberapa pertempuran dengan milisi Mayi-Mayi dan otoritas local. Namun keterbatasan sumber daya dan kesulitan membedakan milisi dan penduduk sipil menghalangi kesuksesan upaya tersebut.<sup>69</sup>

Pada tanggal 2 Agustus 1998, dilatarbelakangi kecurigaan dan keraguan terhadap kemampuan Kabila untuk melindungi etnis Tutsi ditambah perlakuannya yang semakin condong memusuhi pengaruh Rwanda dan Uganda, lahirlah pemberontakan etnis Tutsi Banyamulenge baru dengan nama RCD (*Rassemblement Congolaise pour la Democratie*) yang didukung oleh Rwanda dan Uganda secara diam-diam.<sup>70</sup> Pertempuran awal dalam pemberontakan ini terjadi di daerah timur Kongo, di kota Bukavu dimana pasukan pemberontak menyerbu penjara setempat untuk membebaskan para tahanan Tutsi yang ditahan

---

<sup>67</sup> Chris McGreal, *Congo's Saviour Brought Only Bloodshed*, The Guardian edisi 17 Januari 2001, diakses dari <http://www.guardian.co.uk/world/2001/jan/17/chrismcgreal1> pada 11 Desember 2011 pada pukul 18.22 WIB.

<sup>68</sup> Francois Ngolet, *Op.cit.*, hlm. 18

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 19 – 20.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 21.

akibat pembangkangan mereka terhadap pemerintah pusat. Segera saja beberapa figur politik dan militer beretnis Tutsi di pemerintahan Kongo langsung bergabung dengan pihak pemberontak yang terus bergerak ke arah barat menuju ibukota Kinshasa dan terus menguasai berbagai kota di provinsi Katanga dan Bukavu.<sup>71</sup>

Pemerintah Kabila senior yang kelabakan menghadapi serangan pasukan pemberontak langsung mengumumkan panggilan mobilisasi umum kepada segenap rakyat RDK melalui radio televisi nasional Kongo untuk membantu pemerintah menghadapi pemberontak, berikut adalah kutipan salah satu siaran berita pada saat itu<sup>72</sup>: “*arm yourselves with machetes, spears, arrows, hoes, spades, rake nails, truncheons, irons, barbed wires, and the like to kill advancing Rwandan – Tutsi*”. Situasi menjadi semakin gawat bagi Kabila ketika salah seorang Komandan pasukan pemberontak, James Kabarebe membajak penerbangan domestik Kongo untuk menerbangkan pasukan pemberontak ke wilayah barat, tepatnya kota Kitonga di provinsi Bas-Kongo yang secara efektif membuka *frontier* baru dalam perang Kongo kedua dan sekaligus mengepung Kabila.<sup>73</sup>

Keadaan baru mulai berbalik bagi kubu pemerintah setelah upaya diplomatik presiden Kabila senior terbukti efektif memenangkan kawan aliansi baru. Kedatangan pasukan Zimbabwe, Angola dan Namibia pada 18 Agustus 1998 terbukti mampu memukul mundur pasukan pemberontak di pertempuran-pertempuran yang terjadi di front barat dan mengakibatkan kematian dan kerugian yang signifikan bagi koalisi pasukan pemberontak yang sebelumnya meraih kemenangan besar di kota Kitona, Banana, Muanda dan Boma.<sup>74</sup> Kekuatan pasukan pro Kabila juga bertambah dengan masuknya beberapa faksi militer

---

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm. 22.

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm 23.

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm. 22.

<sup>74</sup> Emmanuel Ksiangani, *Op.cit.*, hlm. 41

mantan tentara Zaire (pasukan pro-Mobutu), milisi AliR (*Armee de Liberation du Rwanda*, mantan anggota Interahamwe dan FAR) dan milisi Mayi-Mayi (*traditional warrior* dari wilayah RDK).<sup>75</sup>

Kabila senior yang tidak mau membuang momentum yang ada langsung mempersiapkan serbuan ke front timur yang awalnya kurang direspon dengan antusias oleh Zimbabwe, Namibia dan Angola namun mendapatkan dukungan dari Sudan, Chad, Libya dan beberapa kelompok pemberontak yang memusuhi Uganda dan Rwanda seperti milisi *interahamwe*, mantan tentara Rwanda Hutu, milisi Mayi-Mayi, LRA (*Lord's Resistance Army*) dan ADF (*Allied Democratic Forces*).<sup>76</sup> Namun sampai tanggal 28 September 1998, pertahanan dan kegigihan tentara pemberontak RCD dan munculnya gerakan pemberontakan baru MLC di provinsi Equateur terus memaksa upaya ofensif pasukan pemerintah mengalami rangkaian kegagalan.<sup>77</sup> Adapun terlepas dari rangkaian kemenangan yang terus ia raih, mendekati awal tahun 1999 laju kampanye pasukan pemberontak semakin lambat dikarenakan munculnya persetujuan Rwanda-Uganda dan semakin meningkatnya perlawanan pasukan pro-pemerintah akibat dukungan negara-negara koalisi.<sup>78</sup> Banyak pihak yang melihat kondisi kebuntuan militer (*military stalemate*) mulai tercipta menjelang ditandatanganinya LCA pada pertengahan tahun 1999.

Konflik ini berubah menjadi perang melibatkan lebih dari setengah lusin negara dan kelompok bersenjata non-negara yang berujung pada tewasnya jutaan penduduk sipil dan kehancuran besar-besaran infrastruktur dan perekonomian Kongo. Informasi lengkap mengenai daftar pihak yang berkonflik di Kongo dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>79</sup>

<sup>75</sup> Francois Ngolet, *Op.cit.*, hlm. 24 – 25.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 27 – 28.

<sup>77</sup> Jeaene M. Haskin, *Op.Cit.* hlm. 92

<sup>78</sup> Francois Ngolet, *Op.Cit.*, hlm. 33 – 36.

<sup>79</sup> Tabel mengenai informasi pihak-pihak yang bertikai merupakan kumpulan dari berbagai sumber data yang mengalami proses simplifikasi dan penggabungan informasi.

Tabel 2.1 Daftar pihak yang terlibat dalam konflik Kongo II

<b>Koalisi Pro-Pasukan Pemerintah</b>					
No	Aktor	Pemimpin	Basis massa	Affiliasi	Estimasi kekuatan
1	RDK (FAC, <i>Congolese Armed Forces</i> )	Laurent Kabila, Joseph Kabila	Government, ex-AFDL	Pasukan Koalisi Pro-Kabila	60000
2	ex- FAR+Interahamwe	Andre Bizimungu	Extrimis Hutu	FAC, DRC,	15000 - 25000
3	Mayi-Mayi	<i>Tetua Adat dan para ksatria Tradisional</i>	Kivu utara, Banande, Batembo, Banyanga dan Hunde (Kivu selatan)	RDK	20000 - 30000 (terpecah)
4	Angola (FAA, <i>Angolan Armed Force</i> )	Jose Eduardo Dos Santos	Pemerintah Angola, MPLA (Luanda, Kimbundu, Mesticos)	RDK, Zimbabwe, Namibia	9000, 5000, 2500
5	Zimbabwe	Robert Mugabe	Pemerintah Zimbabwe		7000 - 13000
6	Namibia	Sam Nujoma	Namibia	Angola, SADC, Zimbabwe, RDK	2000
7	Sudan	Omar al-Bashir	Penduduk mayoritas Muslim Sudan utara	RDK, LRA,	<1000
8	ADF ( <i>Allied Democratic Forces</i> , Gerakan Pemberontak Anti- Uganda)	Jamin Mukulu	Extrimis Tabliq Moslem, NALU	Sudan, ex-FAR, ex-FAZ	<5000
9	Chad	Idriss Debby	Penduduk Chad	RDK, Perancis	2000
<b>Koalisi Pasukan Pemberontak</b>					
No	Aktor	Pemimpin	Basis massa	Affiliasi	Estimasi kekuatan
1	Rwanda (RPA, <i>Armee Patriotique Rwandaise</i> )	Paul Kagame	Pemerintah Rwanda, diaspora etnis Tutsi	RCD-Goma	23400
2	RCD-Goma ( <i>Congolese Assembly for Democracy - Goma faction</i> )	Emile Ilunga	Ex-Banyamulenge (Kivu selatan), tentara Rwanda	RPA	10000 – 15000
3	MLC ( <i>Congolese Liberation Movement</i> )	Jean-Pierre Bemba	Provinsi Equateur dan Orientale	Uganda	10000
4	RCD-ML ( <i>Congolese Assembly for Democracy - Mouvement de Liberation faction</i> )	Wamba Dia Wamba	Ex-Mobutist, Penduduk di provinsi Kivu selatan, tentara Uganda	Uganda	3500 – 4000
5	Uganda (NRA, Uganda National Army)	Yoweri Museveni	Pemerintah Uganda	MLC, RCD- K/ML	8000 – 10000
6	Burundi	Pierre Buyoya	Tutsi Burundi	Rwanda, Uganda	<3000
7	Pemberontak Sudan	SPLA ( <i>Sudanese People's Liberation Army</i> )	Penduduk Kristen Sudan Selatan	Uganda	1000 – 2500
8	UNITA	Uniao Nacional para	Angola: Ovimbudu, dataran tinggi tengah	Uganda	3500

Perang Kongo II secara resmi berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata di Lusaka, ibu kota Zambia pada Agustus 1999. Namun berbagai pertempuran dan tindak kekerasan terhadap rakyat sipil masih terus berlangsung di RDK dan baru mulai mereda dengan dibentuknya pemerintahan transisi yang memberi kekuasaan kepada pemimpin-pemimpin dari faksi pemberontak sebagai hasil dari kesepakatan di Afrika selatan menjelang akhir tahun 2002.

## 2.2 Negosiasi dan Intisari *Lusaka Ceasefire Agreement*

### 2.2.1. Proses Negosiasi dan Mediasi Menuju LCA

Pada dasarnya, tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kongo dan skala kerusakan yang menyertainya mendorong munculnya banyak *peace initiative* untuk menyelesaikan konflik tersebut<sup>80</sup>. Diawali pada tanggal 13 – 4 September 1998, dilangsungkan pertemuan pemimpin-pemimpin Afrika untuk membahas isu seputar konflik di RDK di daerah *Victoria Falls, Zimbabwe*.<sup>81</sup> Setelah itu ada hampir dua lusin upaya perdamaian yang berusaha digagas untuk meredakan konflik Kongo II dan berujung pada kegagalan di meja perundingan dikarenakan tidak dilibatkannya kelompok-kelompok militer non-negara dalam perundingan. Kekeras-kepalaan Laurent-Kabila yang hanya mau bernegosiasi ketika pihak asing telah menarik diri dan fakta bahwa Rwanda dan Uganda baru mengakui keterlibatannya dalam konflik Kongo hanya beberapa bulan sebelum perundingan Lusaka juga turut berkontribusi dalam kegagalan-kegagalan tersebut.<sup>82</sup> Beberapa perjanjian untuk upaya mewujudkan perdamaian yang telah digagas diantaranya adalah perjanjian Sirte oleh Uganda dan RDK dengan fasilitasi Moammar Qaddafi yang sayangnya harus gagal karena perjanjian tersebut tidak mengikutsertakan

---

<sup>80</sup> Sadiki Koko, *The Lusaka Ceasefire Agreement and Stability in the DRC*, hlm. 33.

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm 4i

<sup>82</sup> Emeric Rogier, *The Labyrinth Path to Peace in the Democratic Republic of Congo*, Institute for Security Studies, hlm. 4.

Rwanda dan kelompok pemberontak yang didukungnya.<sup>83</sup> Pada akhirnya, upaya perdamaian yang diajukan oleh Frederick Chiluba (presiden negara Zambia dan *lead negotiator* dari *South African Development Community, SADC*) menghasilkan kemajuan yang paling baik. Akhirnya, pada Juli 1999 perjanjian gencatan senjata Lusaka ditandatangani oleh Kongo, Angola, Zimbabwe, Namibia dan Kongo (negara-negara lain seperti Chad dan Sudan sudah menarik diri dari teater konflik pada saat itu).<sup>84</sup>

Ada tiga pola yang menarik dari rangkaian negosiasi yang terjadi menjelang perjanjian gencatan senjata Lusaka. *Pertama*, keterlibatan pihak diluar Afrika sangat minim dalam proses mediasi ataupun negosiasi untuk mengakhiri konflik Kongo II dimana hampir seluruh inisiatif perdamaian dibuat dan ditindaklanjuti oleh negara-negara Afrika. Hal ini seolah mengindikasikan kepentingan barat yang telah berpaling dari RDK paska perang dingin yang berbeda dengan reaksi barat terhadap krisis Kongo tahun 1960-an. *Kedua*, dialog dan proses perundingan semakin eksklusif hanya terbatas pada elit-elit politik negara yang berkonflik dan pemimpin-pemimpin kelompok bersenjata di Kongo. Kelompok sipil terutama oposisi Kabila senior maupun rakyat Kongo pada umumnya tidak diberikan akses dan kesempatan yang sama. Hal inilah yang semakin memperkeruh prospek ICD yang pada dasarnya membutuhkan partisipasi rakyat sipil Kongo secara signifikan dimana ketiadaan aktivisme kelompok sipil memudahkan manipulasi seperti terlihat dalam proses negosiasi ICD nantinya. *Ketiga*, motivasi para pihak untuk terlibat dalam proses menjelang ditandatanganinya LCA kurang menunjukkan keseriusan pihak yang bertikai untuk berkomitmen serius terhadap proses perdamaian yang diupayakan. ICG menilai sikap dan penerimaan pihak-pihak yang bertikai dilatarbelakangi pertimbangan *short-term* dan strategis dari penandatanganan LCA terhadap kepentingannya

---

<sup>83</sup> Hussein Solomon, *Op.cit*, hlm. 7 – 9.

<sup>84</sup> Sadiki Koko, *Ibid*, hlm. 34.

masing-masing.<sup>85</sup> Sebagai contoh, Kabila senior yang selama ini menunjukan resistensi terhadap berbagai upaya perdamaian, tiba-tiba menjadi lebih terbuka terhadap prospek negosiasi setelah pasukan pemberontak sudah menguasai sebagian besar wilayah RDK yang menunjukkan bahwa Kabila senior hanya ingin membeli waktu untuk mengkonsolidasi dan mempersenjatai pasukannya.<sup>86</sup>

Terlepas dari motivasi dan intrik pihak-pihak yang bertikai, pada akhirnya Perjanjian Gencatan Senjata Lusaka disetujui dan ditandatangani di ibu kota Zambia, Lusaka pada tanggal 10 Juli 1999 oleh negara-negara yang masih terlibat konflik Kongo II (Uganda, Rwanda, Zimbabwe, Angola, Namibia dan pemerintahan Kabila) dan disaksikan oleh pemerintah Zambia, SADC, OAU dan wakil dari PBB. Penandatanganan ini kemudian disusul oleh kelompok pemberontak MLC oleh Jean-Pierre Bemba pada tanggal 1 Agustus dan 41 orang perwakilan dari kelompok RCD pada tanggal 31 Agustus di tahun yang sama.<sup>87</sup> Perjanjian gencatan senjata Lusaka sendiri merupakan buah pemikiran dari pemimpin-pemimpin Afrika dan menjadi sebuah *regional solution* pertama dari Afrika untuk mengatasi persoalan konflik di Afrika. Namun pada dasarnya perjanjian ini sangatlah ambisius dalam menentukan target yang ingin dicapai dan juga sangat menitikberatkan peranan fasilitasi PBB dalam implementasi perjanjiannya, sehingga kurang mencerminkan kemauan negara-negara di Afrika untuk menindaklanjuti perjanjian ini.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> ICG Democratic of Republic of Kongo Report N. 5, *The agreement on the ceasefire in the Democratic Republic of Congo: An analysis of agreement and the prospect of peace*, 20 Agustus 1999, hlm.17

<sup>86</sup> Sadiki Koko, *Op.cit.*, hlm. 35.

<sup>87</sup> Hussein Solomon, *Conflict in the DRC: A Critical Assessment onf the Lusaka Ceasefire Agreement*, (Afrika Selatan: South African Institute of International Affairs, 2004), hlm. 8

<sup>88</sup> ICG, *Op.cit.*, hlm. 35

### 2.2.2 Rangkuman Terhadap Isi dan Proses Pengimplementasian *Lusaka Ceasefire Agreement*

Perjanjian gencatan senjata Lusaka (LCA) terdiri dari sebuah dokumen yang berisikan poin-poin perjanjian dan tiga dokumen tambahan untuk memperjelas ketentuan-ketentuan yang ada dalam teks utama (annex A, B dan C).<sup>89</sup> Dokumen pertama perjanjian ini berisikan 3 artikel dengan penekanan sangat khusus terhadap prinsip non-intervensi dan kewajiban menghargai teritori negara lain dalam pembukaannya. Sadiki Koko merangkum bagian utama dari perjanjian Lusaka sebagai berikut<sup>90</sup>:

Artikel 1 LCA menggarisbawahi pentingnya penghentian kekerasan dengan mengadakan gencatan senjata (*ceasefire*) dimana semua pihak yang terlibat dalam konflik Kongo kedua harus segera menghentikan aksi kekerasan (*hostile actions*), aksi permusuhan (terutama dalam bentuk propaganda kekerasan, segala bentuk pergerakan militer dan upaya memperkuat diri (*reinforcements*) terhitung 24 jam setelah perjanjian damai ditandatangani.

Selanjutnya artikel 2 perjanjian Lusaka membahas mengenai perlunya semua pihak yang bertikai untuk menjaga keamanan Republik Demokrasi Kongo dan negara tetangganya (terutama sekali terkait dengan kepentingan Rwanda, Uganda dan Angola yang merasa keamanan mereka terancam oleh kelompok-kelompok militer anti-pemerintah yang beroperasi dari wilayah Kongo).

Artikel 3 membahas tentang prospek digelarnya pasukan penjaga perdamaian PBB (*UN Peacekeeping force*) di Kongo, penarikan mundur pasukan asing dari wilayah Kongo, penyelenggaraan upaya untuk menyatukan semua pihak yang bertikai di Kongo dalam sebuah perjanjian politis (dikenal dengan

---

<sup>89</sup> Teks perjanjian Lusaka dapat diakses dari <http://www.iss.co.za/af/profiles/drcongo/cdreader/bin/2lusaka.pdf>

<sup>90</sup> Sadiki Koko, *Op.Cit.*, hlm. 33 – 34.



istilah *Inter-Congolese Dialogue*, ICD) dan pembentukan tentara nasional Kongo yang juga disertai dengan pelucutan senjata kelompok-kelompok milisi di RDK.

Sementara itu Annex A dalam perjanjian Lusaka terdiri dari 13 artikel tambahan yang membahas modalitas implementasi perjanjian seperti pembentukan *Joint Military Committee* (JMC) yang ditugasi untuk memonitor implementasi gencatan senjata, penarikan mundur pasukan asing di Kongo dan pelucutan senjata pihak-pihak yang bertikai dalam konflik. Annex B merupakan kalender implementasi klausul-klausul yang tercakup dalam perjanjian Lusaka seperti *deadline* pelaksanaan dialog nasional untuk rekonsiliasi dan reintegrasi pihak-pihak yang berkonflik dan membentuk struktur politik yang baru terhitung 45 hari setelah ditandatanganinya perjanjian Lusaka. Terakhir, Annex C berisikan daftar singkatan dari nama-nama dan istilah yang tercantum dalam perjanjian Kongo.

LCA pada dasarnya menggarisbawahi tiga ketentuan besar yang harus segera diimplementasikan untuk mencapai tujuannya, yakni:<sup>91</sup>

1. Keharusan bagi pihak-pihak yang bertikai untuk segera menghentikan serangan melalui tanah, laut dan udara dengan mengimplementasikan gencatan senjata (*cease fire*) maksimal dalam 2 x 24 jam setelah penandatanganan LCA seperti tertuang dalam artikel 1 persetujuan Lusaka.<sup>92</sup> Selanjutnya bab 11 annex A LCA meminta semua pihak kepada untuk mundur ke posisi defensif masing-masing dan menghentikan segala bentuk proses penambahan persenjataan, perekrutan tentara dan penggunaan propaganda politik.
2. Digelarnya misi perdamaian yang memiliki misi tugas pengawasan terhadap jalannya *ceasefire* yang diberlakukan, pelucutan senjata dari komponen *negative forces* dan penarikan mundur pasukan asing dari wilayah RDK. Dalam tahapan implementasinya LCA menghendaki

<sup>91</sup> Sadiki Koko, *Op.cit.*, hlm. 34 – 35.

<sup>92</sup> Emeric Rogier, *Op.Cit.*, hlm. 5.

dibentuknya pasukan *peacekeeper* oleh PBB yang didasarkan pada bab VII piagam PBB selambat-lambatnya 120 hari setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut. Tugas sebelumnya akan dilimpahkan kepada *Joint Military Committee* (JMC) yang merupakan gabungan dari pihak-pihak yang bertikai dan OAU.<sup>93</sup> Adapun program melucuti senjata, menanggulangi dan mereintegrasikan atau memulangkan kelompok bersenjata terutama yang merupakan kombatan asing (*Disarmament, Demobilization, Repatriation*, selanjutnya disingkat sebagai program DDR) yang tertuang dalam bab 4 dan 9 dari annex A dan poin 16 dan 17 dari annex B memiliki tenggang waktu 30 – 120 hari setelah penandatanganan. Dan terakhir keberadaan pasukan asing, perjanjian LCA memberikan tenggat waktu 180 hari sebagai batas akhir penarikan pasukan-pasukan asing dari wilayah RDK.

3. Diadakannya dialog nasional Kongo (*Inter-Congolese Dialogue, ICD*) yang ditujukan untuk mempersatukan pihak yang berkonflik (rekonsiliasi nasional) dalam sebuah dialog untuk merumuskan struktur kekuasaan baru Republik Demokrasi Kongo yang dibutuhkan dalam proses *nation-building* paska perang selanjutnya yang tercantum dalam annex B dalam tenggang waktu 45 hari setelah penandatanganan perjanjian.

### **2.3 Kegagalan *Lusaka Ceasefire Agreement* Dalam Menciptakan Sebuah Resolusi Konflik**

Upaya resolusi konflik melalui implementasi LCA dalam tulisan ini akan dijabarkan melalui tiga konsep yang lebih spesifik yakni konsep *conflict containment*, *conflict settlement* dan *conflict transformation* seperti tercantum dalam operasionalisasi konsep di bab I. Adapun hasil penelitian terhadap

---

<sup>93</sup> ICG Africa Report, *Scramble for the Congo: Anatomy of an ugly war*, International Crisis Group, hlm. 87.

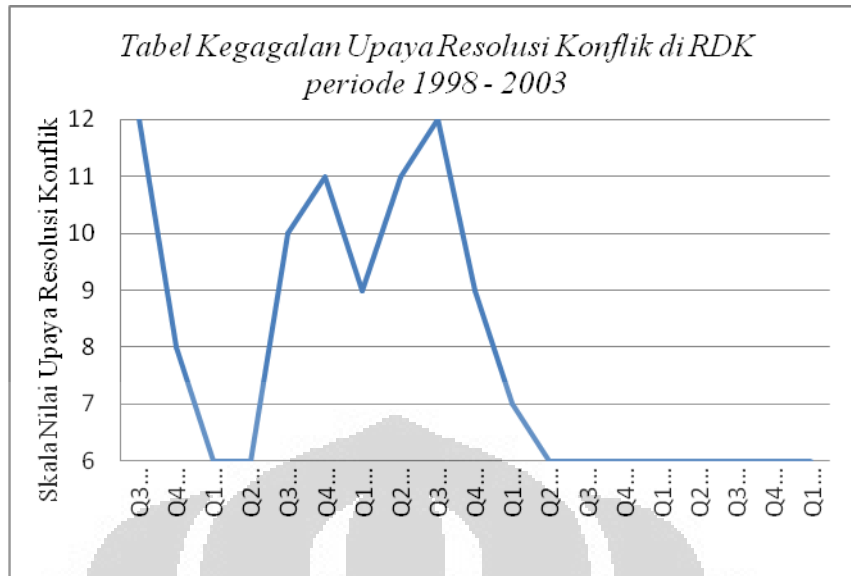
kegagalan upaya resolusi konflik di RDK sendiri dapat dilihat dalam tabel berikut.<sup>94</sup>

Tabel 2.2 Kegagalan Resolusi Konflik di RDK tahun 19998-2003							
Periode	<i>Conflict Containment</i>		<i>Conflict Settlement</i>		<i>Conflict Transformation</i>		Total KRK
	Geografis	Korban Jiwa	Pernyataan	Tindakan	Pernyataan	Tindakan	
Q3 1998	2	2	2	2	2	2	12
Q4 1998	1	1	1	2	1	2	8
Q1 1999	1	1	1	1	1	1	6
Q2 1999	1	1	1	1	1	1	6
Q3 1999	2	2	1	2	1	2	10
Q4 1999	2	2	1	2	2	2	11
Q1 2000	1	2	1	2	1	2	9
Q2 2000	2	2	1	2	2	2	11
Q3 2000	2	2	2	2	2	2	12
Q4 2000	1	2	1	2	1	2	9
Q1 2001	1	1	1	2	1	1	7
Q2 2001	1	1	1	1	1	1	6
Q3 2001	1	1	1	1	1	1	6
Q4 2001	1	1	1	1	1	1	6
Q1 2002	1	1	1	1	1	1	6
Q2 2002	1	1	1	1	1	1	6
Q3 2002	1	1	1	1	1	1	6
Q4 2002	1	1	1	1	1	1	6
Q1 2003	1	1	1	1	1	1	6

Jika tabel tersebut diproyeksikan dalam bentuk grafik maka dapat dibaca sebagai berikut:

Grafik 2.1. Kegagalan Resolusi Konflik di RDK periode 1998-2003

<sup>94</sup> Informasi dalam tabel ini diolah dari berbagai sumber yang tercantum di bagian lampiran.



### 2.3.1. Kegagalan Upaya *Conflict Containment* dalam Implementasi LCA

Perjanjian Lusaka gagal dalam implementasinya gagal menghasilkan *conflict containment*. Kegagalan itu terdiri dari ketidakmampuan implementasi LCA untuk membatasi persebaran konflik yang semakin meluas secara geografis dan juga dalam menurunkan frekuensi pertempuran-pertempuran kecil paska LCA yang justru secara agregat menunjukkan tingkat kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelum penandatanganan LCA.

*Pertama*, kegagalan untuk melakukan *geographical constraint* oleh implementasi LCA. Sebelum penandatanganan LCA perang Kongo kedua berpusat pada daerah timur Kongo tepatnya di provinsi dua Kivu, Katanga dan Bas Oriental (yang semuanya direbut oleh pasukan pemberontak RCD dalam kampanye militernya) ditambah sedikit daerah utara Kongo (diakibatkan lahirnya pemberontakan baru dengan nama MLC). Adapun pada periode paska LCA konflik Kongo memiliki jauh lebih banyak *front* pertempuran meliputi provinsi yang sebelum LCA dikuasai pemberontak seperti terlihat dalam gambar 2.2.:<sup>95</sup>

<sup>95</sup> ICG Africa Report, *Op.Cit.* hlm. ii



Perluasan area geografis konflik ini disebabkan oleh bertambahnya aktor non-negara paska perang Kongo yang menyebabkan menyebarnya konflik. Milisi interahamwe dan berbagai kelompok pemberontak anti Uganda mulai secara intensif digunakan oleh Kabila junior untuk menciptakan de-stabilisasi wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak. Di sisi lain pasukan pemberontak juga menggunakan aliansinya dengan kelompok pemberontak lainnya untuk menghadapi pasukan koalisi pemerintah seperti UNITA. Hal ini kemudian diperparah dengan penciptaan *proxy actors* baik secara langsung maupun tidak dalam konflik paska LCA dengan memanfaatkan permasalahan etnisitas RDK. Sebagai contoh, konflik etnis yang terjadi di Ituri antara suku Hema dan Lendu (terjadi pada periode Agustus 1999 – Februari 2000) yang mengakibatkan ribuan kematian dan permusuhan mendalam diantara kedua suku yang sebelumnya hidup dengan harmonis.<sup>96</sup>

<sup>96</sup> David Gough, *Ethnic War Deepens in Congo*, The Guardian edisi minggu 27 Februari 2000, diakses dari <http://www.guardian.co.uk/world/2000/feb/27/theobserver> pada 13 Desember 2011 pada pukul 01.32 WIB,

*Kedua*, intensitas kekerasan maupun frekuensi *skirmishes* tidak berkurang paska LCA. Pengamat PBB sendiri mengumumkan pada tanggal 17 Agustus tahun 2000 bahwa telah terjadi sekitar 200 pelanggaran terhadap ketentuan gencatan senjata terutama disebabkan semakin intensifnya pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak MLC di provinsi Equateur.<sup>97</sup> Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat jalannya narasi konflik paska LCA dan laporan-laporan dari LSM yang mengamati upaya perdamaian di RDK.

Dalam melihat berbagai bentuk pelanggaran gencatan senjata, saya akan mengklasifikasikannya menjadi pelanggaran yang terjadi dari pihak MLC dan Uganda, kemudian dari pihak RCD-Uganda, dan terakhir dari pihak pasukan koalisi pemerintah. Pelanggaran dari sisi MLC diawali oleh klaimnya terhadap pelanggaran kesepakatan yang terlebih dahulu dilakukan pihak pasukan pemerintah. Jean-Pierre Bemba sehari setelah penandatanganan LCA mengklaim bahwa pasukannya di Gbadolite dan Ikea diserang pesawat Antonov milik pasukan koalisi pemerintah dan kemudian mengumumkan kesiapannya untuk membalas serangan tersebut dengan kampanye militer ofensif MLC dan Uganda.<sup>98</sup> Mirip dengan MLC pelanggaran kesepakatan gencatan senjata RCD diawali tuduhan terhadap pasukan pemerintah yang menurut RCD menyerang kota-kota yang dikuasainya di daerah dua provinsi Kivu dan provinsi Kasai dan Katanga. RCD kemudian terlibat beberapa kali melancarkan aksi ofensif untuk mempertahankan dan merebut kembali kota-kota yang dikuasai pasukan koalisi pemerintah terutama di wilayah selatan Katanga. Adapun bukti nyata pelanggaran gencatan senjata oleh pemerintahan Kabila terjadi pada Oktober tahun 1999 dimana RDK melakukan serangan umum ke timur untuk merebut kota-kota yang dikuasai pemberontak. Sedangkan pasukan pemberontak RCD dengan dibantu oleh pasukan regular Rwanda terus menyerang beberapa kota di daerah timur terutama *diamond town* Mbuji-Mayi yang dipertahankan habis-habisan oleh

<sup>97</sup> Fransisco Ngolet, *Op.cit.*, hlm. 111.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 108.

pasukan Zimbabwe (yang telah diberikan konsesi penambangan berlian sebelumnya) dan dibantu oleh kekuatan udara Angola.<sup>99</sup>

Sampai awal tahun 2000, pasukan pemerintah belum terlihat memenangkan kemenangan yang berarti terlepas dari intensitas serangan militernya yang mendapatkan bantuan signifikan dari angkatan udara Sudan dan Zimbabwe. Terlepas dari kebuntuan yang ada, pemerintah Kabila senior tidak menunjukkan niat untuk mengakhiri kampanye militernya yang ditunjukkan dari sikap RDK yang mengumumkan penundaan sepihak terhadap ketentuan gencatan senjata yang dan untuk melanjutkan serangannya ke berbagai titik di provinsi Equateur termasuk serangan ke kota Zongo yang menyebabkan eksodus pengungsi Kongo ke wilayah Republik Afrika Tengah.<sup>100</sup> Namun, menjelang permulaan bulan Oktober pasukan pemberontak MLC dan RCD-Goma masing-masing telah menekan pasukan koalisi pemerintah dengan merebut berbagai kota yang sebelumnya telah direbut pemerintah dan bahkan MLC sendiri sudah hampir merebut kota Mbandaka yang hanya terletak hanya sejauh 700 KM dari ibukota Kinshasa sehingga berpotensi mengunadang pecahnya perang skala penuh antara pasukan pro-pemerintah dengan Uganda dan MLC.<sup>101</sup>

Pada titik ini hampir semua pihak tidak lagi melihat relevansi ketentuan gencatan senjata dalam upaya perdamaian di konflik Kongo. Upaya untuk mengurangi intensitas konflik ini baru muncul kembali ketika pihak-pihak yang bertikai menerima *Kampala disengagement plan* di Uganda pada Desember tahun 2000 yang merupakan persetujuan baru yang dibuat antara Rwanda, Uganda, Zimbabwe, Angola, Namibia dan RDK (aktor-aktor negara yang masih terlibat

---

<sup>99</sup> Hussein Solomon, *Op. cit.*, hlm.15.

<sup>100</sup> Lucy Jones, *Families Flee Anarchy of Kabila's Congo*, The Guardian edisi 25 Agustus 2000, diakses dari <http://www.guardian.co.uk/world/2000/aug/25/2?INTCMP=SRCH> pada 13 Desember 2011 pukul 02.17 WIB.

<sup>101</sup> Ian Fisher, *Congo's War Triumphs Over Peace Accord*, The New York Times edisi 18 September 2000, diakses dari <http://www.nytimes.com/2000/09/18/world/congo-s-war-triumphs-over-peace-accord.html?scp=9&sq=Congo%20War&st=nyt&pagewanted=1> pada 13 Desember 2011 pukul 03.27 WIB.

dalam konflik paska LCA) untuk melakukan 3 langkah proses dimana pihak-pihak yang bertikai akan mundur ke area *new defensive positions* masing-masing sebelum akhirnya ditarik mundur dari wilayah RDK.<sup>102</sup> Adapun peredaan ketegangan secara substansial terjadi saat terbunuhnya presiden Laurent Kabila yang kemudian digantikan oleh anaknya yang lebih banyak menggunakan arena diplomasi untuk menghadapi pasukan pemberontak dibandingkan ayahnya.

Bukti lain mengenai gagalnya penciptaan gencatan senjata didapat dari laporan banyak lembaga swadaya pemerhati konflik dan PBB yang terus menunjukkan situasi yang sangat rentan konflik di berbagai daerah di Kongo dengan berbagai kejadian baku tembak antara pihak yang bertikai. Menurut data yang ditemukan oleh *International Rescue Committee (IRC)* pertempuran yang terus terjadi di wilayah Kongo paska LCA masih sering terjadi dan hal ini menyebabkan terus jatuhnya korban jiwa di Kongo secara signifikan baik akibat kekerasan langsung maupun kekerasan tidak langsung. Dalam studinya, ditemukan fakta bahwa periode 1999 – 2000 ditandai dengan peningkatan jumlah kematian di berbagai daerah yang bahkan disinyalir lebih tinggi dari periode sebelum ditandatanganinya LCA pada 1998 – 1999. Berikut adalah laporan lengkap dari IRC mengenai perkiraan jumlah korban jiwa di RDK:<sup>103</sup>

*Tabel 2.3 Perkiraan Jumlah Korban Jiwa di RDK*

Daftar Korban Jiwa dari Konflik Kongo II menurut IRC		
No	Periode	Korban Jiwa dalam ribuan
1	Januari 1999 - Mei 2000	1,700
2	Mei 2000 - Maret 2001	800
3	Maret 2002 - April 2003	800
4	April 2003 - July 2004	500
Total korban Jiwa sampai 2004		3,800

<sup>102</sup> Emeric Rogiers, *Op.Cit*, hlm. 9

<sup>103</sup> Data yang diolah bersumber dari laporan-laporan IRC mengenai perkiraan jumlah korban jiwa dari konflik Kongo II yang dapat diakses di [http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/DRC\\_MortalitySurvey2004\\_Final\\_9Dec04.pdf](http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/DRC_MortalitySurvey2004_Final_9Dec04.pdf)



### 2.3.2. Gagalnya Upaya *Conflict Settlement* Paska LCA.

Kebutuhan untuk menciptakan rekonsiliasi antar pihak yang bertikai dan membangun upaya bersama untuk pemerintahan di RDK sangat bergantung pada penyelenggaraan ICD yang menjadi satu-satunya kesempatan bagi semua pihak di Kongo baik yang berasal dari pemerintah, kelompok pemberontak maupun gerakan politik tidak bersenjata. Hal ini disebabkan oleh tindakan pemerintahan Kabila membekukan partai-partai politik dan terus menolak melakukan reformasi politik dengan beralasan adanya situasi darurat perang.<sup>104</sup> Di lain pihak, terdapat berbagai laporan adanya aksi intimidasi dan penyiksaan terhadap penduduk sipil Kongo oleh kelompok pemberontak untuk menekan aksi-aksi protes dari penduduk sipil Kongo.<sup>105</sup> ICD diharapkan dapat menjadi forum inklusif yang tidak hanya didominasi kelompok-kelompok bersenjata sehingga mampu mempercepat reformasi struktur sosial dan politik di RDK. Namun sayangnya, proses ICD terus-menerus mengalami kebuntuan dan yang pada akhirnya gagal membuat semua pihak menyetujui rekonsiliasi (*stated reconciliation*) yang dibuat dalam proses ICD ataupun perubahan perilaku yang berarti dari pihak-pihak yang bertikai.

Sejak awal ICD mengalami berbagai hambatan yang terutama disebabkan oleh keenganan Kabila senior untuk segera mengadakan dialog nasional (ICD, direncanakan untuk diadakan selama enam minggu sesuai LCA). Keenganan ini terlihat dari berulang kalinya Kabila senior menolak desakan PBB untuk segera mempersiapkan ICD namun juga melakukan berbagai upaya mendiskreditkan fasilitator ICD, Ketumile Masire, mantan presiden Botswana yang oleh Kabila

<sup>104</sup> *Background of the Congo Conflict*, diakses dari <http://www.peacebuildingdata.org/drc/congo-conflict> pada 18 Desember 2011 pukul 19.22 WIB.

<sup>105</sup> Ali B. Ali Dinar eds., *DRC Rebels: Anti RCD Rebels Embroiled in Interlinked Wars*, University of Pennsylvania: African Studies Centre, Newsletter diakses dari <http://www.africa.upenn.edu/Newsletters/irinw63099.html> pada 21 Desember 2011 pukul 10.25 WIB.

senior dituduh memiliki bias terhadap Rwanda dan Uganda. Hal ini disebabkan oleh kedekatan Masire dengan Afrika Selatan (yang diduga secara diam-diam mendukung Rwanda dan Uganda di konflik Kongo kedua).<sup>106</sup> Kabila senior juga melarang Masire untuk melakukan perjalanan didalam wilayah internal Kongo diluar Kinshasha dimana hal tersebut sangat mengurangi keefektivitasan kinerja Masire sebagai fasilitator ICD.<sup>107</sup> Melihat kesempatan ini pihak pemberontak pun menolak berkontribusi dan berpartisipasi dalam ICD sebagai dengan selalu mengutip keras pembangkangan yang terlebih dahulu dilakukan oleh Kabila senior.

Adapun *turning point* proses ICD muncul paska dibunuhnya presiden Laurent Kabilla oleh pengawal pribadinya pada Januari 2001 yang kemudian digantikan oleh anaknya, Joseph Kabila. Seusai pelantikannya, Kabila junior langsung menegaskan kembali komitmennya untuk mengimplementasikan LCA terutama dalam penyelenggaraan ICD yang selama ini selalu dihambat oleh ayahnya.<sup>108</sup>

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya proses ICD kembali harus mengalami keterhambatan yang signifikan. Dalam proses awal di Gaborone permasalahan yang sempat timbul adalah mengenai pertanyaan sensitif dalam implementasi ICD sebagai bagian dari LCA, yakni siapa saja pihak yang dapat terlibat dalam ICD (hal ini disebabkan LCA bukan saja mengakui pihak yang bertikai secara langsung sebagai peserta ICD tetapi juga anggota masyarakat sipil dan juga kelompok oposisi terhadap pemerintahan Kongo yang tidak bersenjata).<sup>109</sup> Namun perdebatan tersebut menjadi hambatan serius bagi ICD muncul pada pertemuan di Addis Ababa ketentuan mengenai siapa saja yang

---

<sup>106</sup> Hussein Solomon, *Op.cit.*, hlm. 12.

<sup>107</sup> Emeric Rogiers, *Op.cit.*, hlm. 11.

<sup>108</sup> IRIN News, *In Depth: The Death of Lauren Desire Kabila*, diakses dari <http://www.irinnews.org/indepthmain.aspx?indepthid=57&reportid=72286> pada 21 Desember 2011 pukul 10.15 WIB.

<sup>109</sup> Emeric Rogiers, *Op.Cit.*, hlm. 10-11.

harus diundang dalam proses ICD menjadi sebab pertentangan yang mengakibatkan gagalnya proses tersebut. Dikarenakan keterbatasan dana, penyelenggara ICD hanya mampu mengundang 80 dari total 330 aktor yang disetujui keterlibatannya dalam pertemuan Gaborone yang langsung memancing perdebatan sengit mengenai validitas representasi yang diambil oleh pihak penyelenggara (karena pengurangan yang dilakukan menyederhanakan perwakilan beragam peserta yang seharusnya terlibat).<sup>110</sup> Polemik yang berlarut-larut dalam diskusi tahap awal ICD membuka peluang bagi delegasi resmi Kinshasa untuk *Walk Out* dari rangkaian acara yang ada.<sup>111</sup> Beberapa pihak melihat tindakan Kinshasa sebagai taktik *negotiation stalling* untuk menghambat laju pembicaraan ICD yang dapat mengancam kekuasaan pemerintahan Kabila junior.<sup>112</sup>

Proses ICD bahkan sempat terancam akan hilang ditinggalkan oleh pihak-pihak yang bertikai sebelum akhirnya diselamatkan Kofi Annan yang meyakinkan berbagai negara kontributor PBB untuk tetap mendukung proses ICD dan juga mengundang RCD-ML, RCD-Goma dan MLC untuk berdiskusi di New York dan Abuja.<sup>113</sup>

Babak perundingan utama ICD yang selanjutnya kemudian secara resmi dibuka di Sun City pada 25 Februari – 16 April 2002 dengan mengundang 362 orang perwakilan yang mewakili lima komponen berbeda sesuai dengan ketentuan

---

<sup>110</sup> Marc Lacey, *Peace Talk To End War in Congo Finally Begun*, The New York Times edisi 17 Oktober 2001, diakses dari <http://www.nytimes.com/2001/10/17/world/peace-talks-to-end-war-in-congo-finally-begin.html?scp=17&sq=Congo+War&st=nyt>, pada 20 Desember 2011 pukul 03.36 WIB.

<sup>111</sup> Emeric Rogiers, *Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>112</sup> Tatiana Carayannis, "The Challenge of building sustainable peace and the DRC" dalam *Background paper* ( Geneva: The centre of humanitarian dialogue, Juli 2009), hlm. 9

<sup>113</sup> Simon Tisdall, *Taking The Congo Test*, The Guardian edisi Kamis 2 Agustus 2001 diakses dari <http://www.guardian.co.uk/world/2001/aug/02/worlddispatch.congo?INTCMP=SRCH> pada 3 Desember 2011 pukul 23.41 WIB.

LCA.<sup>114</sup>Terlepas dari upaya Afrika Selatan yang terus mensponsori berbagai inisiatif dalam dialog ini, sesi ICD di Sun City ini ditutup dengan kegagalan untuk sekedar mencapai persetujuan umum dari pihak-pihak utama yang bertikai terhadap pertanyaan-pertanyaan sensitif seperti sejauh manakah pihak pemberontak akan terlibat dalam dispensasi politik dan penciptaan tentara nasional Kongo paska krisis.<sup>115</sup>Adapun satu-satunya kompromi yang hampir terjadi antara MLC dan Kabila junior untuk membentuk pemerintahan sementara dengan Kabila bertindak sebagai presiden dan Bemba sebagai wakilnya ditentang keras oleh oposisi sipil (yang dipimpin oleh Etinee Tshisekedi) dan RCD-Goma.<sup>116</sup>Akhirnya hampir semua pihak pulang dari Sun City dengan menyatakan kekecewaannya terhadap kemajuan yang sangat minimal dari ICD.<sup>117</sup>

Adapun proses negosiasi kemudian berlanjut tanpa melalui ICD yakni melalui upaya bilateral antara pemerintah RDK dan Rwanda dan disusul dengan negosiasi bilateral yang mirip antara pemerintah RDK dan Uganda.<sup>118</sup>Apalagi setelah utusan PBB dan Afrika selatan mendorong terjadinya *breakthrough* pada 17 Desember 2002 di pertemuan tingkat tinggi Praetoria dimana MLC, RCD dan pemerintah RDK akhirnya menyetujui dibentuknya pemerintahan transisi sampai pemilu dapat diadakan di RDK yang diberi nama *Global and All-Inclusive Agreement on the Transition in the DRC* (Dikenal juga dengan nama kesepakatan Pretoria II).<sup>119</sup>Perjanjian ini mengatur struktur kekuasaan Kongo dalam masa transisi dan juga merancang berbagai kelengkapan kenegaraan seperti ketentaraan

<sup>114</sup>*Ibid*, hlm. 5.

<sup>115</sup> Emeric Rogiers, *Op.cit*, hlm. 15

<sup>116</sup> Tatiana Carayannis, *Op.Cit*, hlm. 10.

<sup>117</sup> Sagaren Naidoo, *The Inter-Congolese Dialogue: Negotiations for a Democratic State or a Formalization of a New Scramble*, (Johannesburg, Afrika Selatan: Friedrich Erbert Stiftung, 2002), hlm. 16.

<sup>118</sup> Emeric Rogiers, *Op.Cit*, hlm. 15 – 19.

<sup>119</sup> Rachel L. Swarns, *Congo and Its Rebels Sign Accord to End War*, New York Times edisi 18 Desember 2002, diakses dari <http://www.nytimes.com/2002/12/18/world/congo-and-its-rebels-sign-accord-to-end-war.html?sep=1&sq=Congo+War&st=nyt> pada 13 Desember 2011 pukul 02.11 WIB.

dan kabinet pemerintahan pemerintah Transisi.<sup>120</sup> Pada titik ini Perjanjian Gencatan Senjata Lusaka (LCA) peranannya telah tergantikan oleh kesepakatan-kesepakatan baru baik dalam ranah negosiasi maupun dalam konteks acuan *decision making* pihak-pihak yang berkepentingan di RDK.

### 2.3.3. Gagalnya upaya *Conflict Transformation* paska LCA.

*Conflict transformation* yang diamanatkan oleh LCA diarahkan untuk menyelesaikan penyebab struktural kekerasan di RDK. Adapun penyebab struktural perang Kongo kedua sendiri dikaitkan pada kondisi ketidakstabilan kawasan dengan adanya kelompok-kelompok bersenjata non-negara di RDK yang menimbulkan permasalahan keamanan bagi negara-negara seperti Rwanda, Uganda, Angola dan Burundi dan pada akhirnya memicu keterlibatan langsung dari negara-negara tersebut dalam konflik yang berkepanjangan di RDK. Oleh karenanya digelarnya pasukan *peacekeeping* di RDK baik yang dilakukan oleh JMC maupun PBB memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan: (a) terjadinya demobilisasi dan pelucutan senjata dari kelompok-kelompok bersenjata non-negara; dan (b) mengawasi dan memfasilitasi penarikan mundur tentara dari berbagai negara tidak lagi turut campur dan memperkeruh konflik Kongo. Namun, penggelaran misi perdamaian di RDK sendiri tidak berhasil memenuhi tenggat waktu yang ditentukan oleh LCA sehingga menghambat upaya *conflict transformation* yang memungkinkan tercapainya hal tersebut. Berikut pemaparan terhambatnya misi perdamaian PBB baik dari sisi JMC dan PBB.

JMC awalnya dibentuk untuk bersama-sama dengan misi perdamaian PBB untuk mengawal implementasi LCA di RDK. Namun entitas yang anggotanya merupakan gabungan dari pihak-pihak yang bertikai dan OAU ini tidak efektif peranannya disebabkan oleh keterbatasan akses sumber daya yang dimilikinya. OAU tidak dapat mencurahkan pembiayaan secara substansial disebabkan

---

<sup>120</sup> Emeric Rogiers, *Op.Cit*, hlm. 20.

minimnya dana yang ia miliki akibat kondisi negara-negara anggotanya yang masih menghadapi berbagai persoalan domestik masing-masing.<sup>121</sup> Adapun pihak-pihak yang bertikai tidak melihat JMC sebagai alat strategis bagi kepentingan mereka dimana baik pemerintah RDK maupun pasukan pemberontak bukan saja terlihat enggan untuk berpartisipasi di JMC namun juga tidak memberikan fasilitasi dan akses yang diperlukan untuk memantau jalannya implementasi LCA. JMC gagal menjadi badan independen dalam menjalankan fungsinya dan selanjutnya menjadi semakin tergantung pada misi perdamaian PBB sebelum akhirnya diintegrasikan ke dalam MONUC.<sup>122</sup>

Misi perdamaian PBB (MONUC) langsung menghadapi kendala sejak fase pertama operasinya. Fase ini adalah langkah awal untuk mempersiapkan penggelaran (*deployment*) pasukan *peacekeeping* PBB dengan jumlah besar. Dimana petugas pendahulu MONUC diharapkan mampu untuk memetakan titik-titik dimana pasukan PBB nantinya harus dikirimkan, khususnya di daerah garis gencatan senjata (*cease-fire line*), dan menjalin hubungan dengan otoritas-otoritas dari pihak-pihak yang bertikai. Permasalahan pertama pada fase ini datang dari tidak berjalannya misi perdamaian JMC (*Joint Military Commission*) yang diakibatkan permasalahan kurangnya sumber daya. MONUC dalam hal ini terhambat bukan saja karena harus memulai menciptakan mekanisme pengawasan dan komunikasi dari awal tetapi juga mendapatkan beban tambahan untuk mendukung operasi OAU dan JMC (sehingga pada perkembangannya keduanya menjadi sangat bergantung pada MONUC). Permasalahan lain yang timbul dari fase ini adalah adanya upaya nyata dari pihak-pihak yang bertikai untuk menghalangi kerja tim pendahulu MONUC. Pemerintahan Kabila beberapa kali tidak mengizinkan tim penghubung dengan pemberontak untuk bepergian diluar Kinshasha sementara pihak pemberontak sering menolak memberi akses

---

<sup>121</sup>*DRC Joint Military Commission Faces Serious Threat*, Relief Web edisi 17 November 2000, diakses dari <http://reliefweb.int/node/> pada 21 Desember 2011 pukul 10.55 WIB.

<sup>122</sup>Phillip Roessler & John Prendergast, *Op.cit.*, hlm. 261

transportasi dari tim MONUC untuk menginvestigasi daerah-daerah yang mereka kuasai sehingga tim pemantau awa MONUC tidak memiliki informasi cukup untuk mendukung proses penggelaran pasukan *peacekeeping* PBB.

Kemudian pada fase kedua (dikenal dengan nama *protected observation phase*) yang berlandaskan pada resolusi DK PBB no. 1279 pada 30 November 1999 (yang menyetujui diturunkannya 500 *military observers* dan 3400 pasukan infantry untuk melindungi mereka) muncul lebih banyak lagi hambatan bagi jalannya operasi MONUC. Periode Mei–Desember 2000 ditandai dengan meletusnya pertempuran terbuka antara tentara Rwanda dan Uganda di kota Kisangani yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan berbagai properti termasuk kompleks tempat tinggal petugas MONUC. Selain itu situasi ini diperparah oleh keras kepala rezim pemerintahan Kabila yang menghalangi kerja MONUC dengan menetapkan *flight restriction* bagi petugas MONUC yang harus disetujui secara *case per case* ditambah minimnya perlindungan pemerintah terhadap petugas MONUC yang terlihat pada 9-12 Juni 2000 dimana petugas kepolisian Kongo hanya diam saja ketika ratusan demonstran menyerang kantor MONUC. Situasi makin parah ketika pemerintahan Kabila menarik diri dari JMC dan semakin mempersulit kerja MONUC dengan menghalangi perjalanan ke kota-kota yang dikuasai pemerintahan. Pada titik inilah terjadi *vicious cycle* dimana semakin banyaknya pertempuran-pertempuran merebak di Kongo, semakin dibutuhkannya lebih banyak pasukan PKO, semakin enggan negara-negara anggota DK PBB untuk mengirim pasukan karena melihat resiko lapangan yang semakin buruk. Bahkan pada Agustus 2000, Kofi Annan sempat mempertimbangkan dibatalkan misi MONUC yang pada akhir tahun 2000 hanya memiliki sekitar 224 personel pengamat militer dan petugas staf MONUC di Kongo.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup>*Ibid*, hlm.

Untungnya, fase ini juga untungnya ditandai dengan ekspansi misi MONUC secara substansial, khususnya setelah terjadinya pembunuhan terhadap Kaila senior di Januari 2001 yang menjadi *turning point* bagi pelaksanaan misi MONUC di RDK. Sikap akomodatif dan kooperatif yang ditunjukkan Kabila junior pada dasarnya membangkitkan perhatian dan dukungan dari negara-negara di kawasan dan masyarakat internasional bagi upaya perdamaian Kongo. Pasukan pengawalan pertama dari Uruguay resmi mulai diturunkan pada Maret 2001 dan kemudian meningkat jumlahnya menjadi 1869 personel dengan tambahan kontribusi dari 539 tentara Senegal, 614 tentara Maroko dan 220 tentara Tunisia. Akhirnya pada Oktober 2001 sekjen PBB mengumumkan fase *disengagement* hampir selesai setelah Rwanda, Uganda, Zimbabwe, Angola, Namibia, RCD dan MLC menarik mundur pasukannya ke NDP masing-masing walaupun sempat terjadi sedikit perlawanan dari MLC dan RCD-Goma.<sup>124</sup>

*Ketiga*, fase pengawasan terhadap proses mundurnya pasukan-pasukan asing dari Republik Demokrasi Kongo dan *disarming negative forces*. Pada akhir tahun 2001 sekjen PBB menginginkan untuk memulai program DDR (*Disarmament, Demobilization and Repatriation*) seperti dikehendaki dalam *subplan* Harare yang mengaitkan komitmen penarikan pasukan asing dengan pelucutan senjata *negative forces*. Terlepas dari optimisme yang lahir dari akhir fase 2 operasi MONUC, fase ketiga ditandai dengan program DDR terhambat selama berbulan-bulan disebabkan minimnya kerjasama dari Rwanda dan pemerintah Kongo yang masing-masing menolak memberikan izin akses bagi MONUC melalui daerah yang dikuasainya.

*Breakthrough* baru tercipta pada penandatanganan MoU 30 Juli 2002 di Pretoria, Afrika Selatan dimana pemerintah Kongo memberikan janjinya untuk melucuti sisa-sisa milisi mantan FAR dan *interahamwe* yang berkeliaran di wilayahnya dan pemerintah Rwanda berjanji untuk menarik diri dari wilayah

---

<sup>124</sup> Laporan lengkap dapat dirujuk pada: *Ninth Report of The Secretary-General on MONUC*, S/2001/970, yang dikeluarkan pada 16 Oktober 2001.



RDK.<sup>125</sup> Persetujuan yang samapun dibuat antara pemerintah Kabila dan Uganda pada September ditahun yang sama. Pada akhir Oktober hampir seluruh pasukan Rwanda telah ditarik dari Kongo. Selanjutnya DK PBB mengeluarkan resolusi 1445 yang menambah jumlah personel MONUC menjadi 8700 personil dan merevisi konsep operasi MONUC dengan penekanan lebih di daerah timur Kongo yang implementasinya baru akan efektif tahun 2003.



---

<sup>125</sup> Henri E. Cauvin, *Rwanda and Congo Sign Accord to End War*, The New York Times edisi 31 Juli 2002, diakses dari <http://www.nytimes.com/2002/07/31/world/rwanda-and-congo-sign-accord-to-end-war.html?scp=10&sq=Congo+War&st=nyt> pada 13 Desember 2011 pukul 03.52 WIB.

### **BAB III**

## **ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KETIDAKMATANGAN KONFLIK DALAM PENANDATANGANAN LCA**

### **3.1. Ketidakmatangan Konflik Dalam Penandatanganan LCA**

Pembahasan bab ini akan melibatkan 9 aktor dalam konflik Kongo yang terdiri dari 7 negara (RDK, Zimbabwe, Angola, Namibia, Rwanda, Uganda, Burundi) dan 2 kelompok bersenjata (RCD-Goma dan MLC). Alasan tulisan ini tidak mengikutsertakan Sudan dan Chad dikarenakan keterlibatan mereka yang relatif singkat dan minimal, dimana paska pertemuan Sirte (beberapa bulan sebelum Lusaka) mereka sudah menarik diri dari wilayah Kongo.<sup>126</sup> Pembahasan ini juga tidak mencantumkan kelompok – kelompok bersenjata lain dalam konflik Kongo seperti LRA maupun ADF karena dua hal: (a) mereka tidak berpartisipasi dalam perjanjian Lusaka dan hanya dianggap sebagai *negative force* yang harus segera ditanggulangi; dan (b) banyak kelompok-kelompok tersebut tidak berasal dari dalam Kongo. Adapun RCD-ML (RCD-Kisangani) tidak diikutsertakan sebagai aktor dalam analisis ketidakmatangan konflik dikarenakan minimnya peranan yang dimainkan kelompok ini paska LCA baik dari segi keterlibatannya dalam peningkatan intensitas konflik ataupun dari kontribusinya terhadap negosiasi upaya perdamaian.

Dalam upaya menunjukkan ketidakmatangan konflik dalam penandatanganan LCA, penulis akan menggunakan tabel periodisasi per-tiga bulan (per-kuartal) untuk menunjukkan kronologis tercapainya ketiga variabel yang mendasari terciptanya kematangan pada kedelapan aktor utama dalam teater konflik Kongo seperti telah dijabarkan pada bagian operasionalisasi konsep di Bab I. Tabel yang ada kemudian akan diterjemahkan menjadi grafik untuk melihat trend umum dari kematangan konflik di RDK itu sendiri. Berikut adalah tabel 3.1.

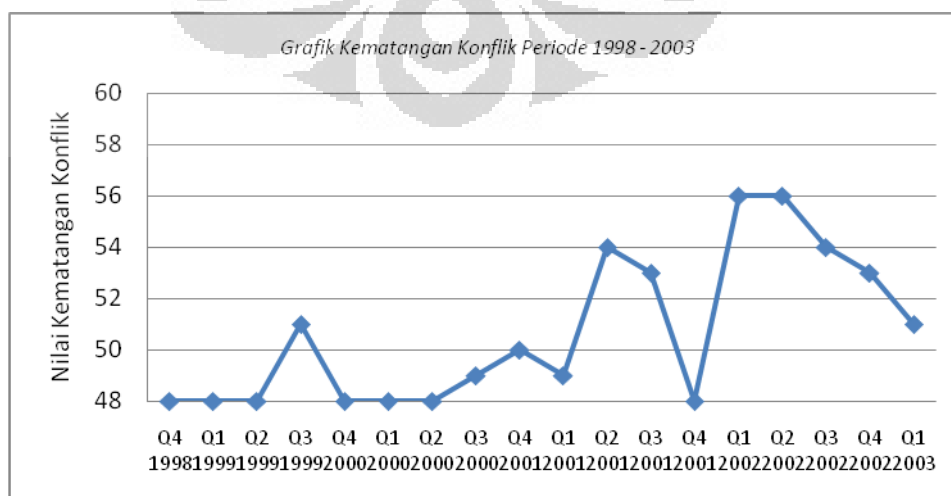
---

<sup>126</sup> Liisa Lakso dan Harri Hinkannen, *Op.cit.*, hlm. 76.

yang berisikan periodisasi kemunculan faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan konflik bagi masing-masing aktor di RDK:

Kematangan Konflik di RDK Periode (1998 - 2003)									
Periode	Pasukan Koalisi Pemerintah				Pasukan Pemberontak				Total
	RDK	Zimbabwe	Angola	Namibia	Rwanda	RCD-Goma	Uganda	MLC	
Q4 1998	6	6	6	6	6	6	6	6	48
Q1 1999	6	6	6	6	6	6	6	6	48
Q2 1999	6	6	6	6	6	6	6	6	48
Q3 1999	6	7	6	8	6	6	6	6	51
Q4 2000	6	6	6	6	6	6	6	6	48
Q1 2000	6	6	6	6	6	6	6	6	48
Q2 2000	6	6	6	6	6	6	6	6	48
Q3 2000	6	7	6	6	6	6	6	6	49
Q4 2001	8	6	6	6	6	6	6	6	50
Q1 2001	6	6	6	7	6	6	6	6	49
Q2 2001	7	7	7	7	6	6	8	6	54
Q3 2001	7	7	7	6	7	6	7	6	53
Q4 2001	6	6	6	6	6	6	6	6	48
Q1 2002	6	6	10	8	6	6	7	7	56
Q2 2002	6	8	6	6	7	8	6	9	56
Q3 2002	7	6	6	6	9	7	6	7	54
Q4 2002	6	6	6	6	7	8	7	7	53
Q1 2003	7	6	6	6	6	7	7	6	51
Total nilai Kematangan Konflik periode 1999-2003					912		Rata-rata nilai per kuartal		50.66667

Dengan menggunakan tabel diatas kita dapat memformulasikan skema 3.1 yang menunjukkan momen terciptanya kematangan konflik dalam periode paska perjanjian Lusaka (*conflict ripeness*) sebagai berikut:



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi maksimal kematangan konflik di RDK terjadi pada periode tahun 2002 dengan ditunjukan dengan kenaikan signifikan pada Q1 dan penurunan stabil pada Q2 , Q3 dan Q4 yang secara agregat masih merupakan nilai tertinggi dibandingkan periode lainnya dalam grafik tersebut. Adapun periode tahun 2001 juga menunjukkan kenaikan tingkat kematangan konflik yang signifikan pada Q1, Q2 dan Q3 setelah sebelumnya di periode tahun 2000 hampir tidak ada nilai kematangan konflik sama sekali. Adapun titik yang merepresentasikan penandatanganan LCA sendiri (Q3-1999) tidak mengalami situasi kematangan konflik yang optimal yang ditunjukan dengan nilai 3 poin yang relatif kecil dibandingkan periode 2001 maupun 2002.

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik mengalami tiga kali eskalasi yakni pada Q3-1998 yang merupakan masa pecahnya perang Kongo kedua, pada Q4-1999 yang merupakan periode langsung setelah penandatanganan LCA dan pada Q3-2000 saat upaya serangan balik pemerintah dilaksanakan ke wilayah timur dan utara RDK. Intensitas konflik pada periode Q4-2000 sedikit lebih tinggi dibandingkan pecahnya konflik pada Q3-1998 yang menunjukkan meningkatnya konflik akibat perluasan keterlibatan lebih banyak actor dalam lingkup geografis yang lebih besar seperti terlihat pada tabel rangkaian peristiwa pada periode Q4-2000. Adapun kenaikan dramatis intensitas konflik pada Q4-1999 menunjukkan kegagalan implementasi perjanjian Lusaka sebagai sebuah upaya resolusi konflik yang pada saat penandatanganannya sedang berada dalam eskalasi konflik.

Adapun trend penurunan konflik telah dimulai sejak Q4-2000 yang bertepatan dengan disetujuinya *Kampala Disengagement Plan* oleh pihak-pihak yang bertikai yang kemudian mulai diimplementasikan pada pertengahan 2001. Selain itu periode ini juga menandakan kelelahan negara-negara pendukung

Kabila yang mulai mendesak agar RDK kembali ke jalur perdamaian. Intensitas konflik sendiri menurun dengan stabil sepanjang pertengahan tahun 2001 pada masa proses persiapan dan pelaksanaan ICD dan mencapai titik terendah pada Q3-2002 ketika pemerintah RDK berhasil membuat perjanjian damai dengan Rwanda dan Uganda secara terpisah sebelum akhirnya menandatangani perjanjian Pretoria II di Q4-2002.

### **3.2. Analisis Mengenai Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ketidakmatangan Konflik Dalam Penandatanganan Perjanjian Gencatan Senjata Lusaka (LCA)**

#### **3.2.1. Tidak Terciptanya *Mutually Hurting Stalemate* dalam Penandatanganan LCA.**

Konsep *Mutually Hurting Stalemate* dalam tulisan ini akan dikaji dalam asumsi rasionalitas kalkulasi politik para aktor dalam konflik Kongo yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan militer mereka. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada saat penandatanganan perjanjian Lusaka, situasi MHS tidak muncul bagi setiap aktor perang Kongo kedua dimana kebanyakan aktor justru mengalami MHS pada periode tahun 2002.

Pemerintah RDK tidak mencapai MHS pada saat penandatanganan LCA dan baru mencapainya pada masa kekuasaan Joseph Kabila di periode tahun 2001. Dari sisi pertimbangan ekonomi, pemerintah Kabila senior maupun junior tidak mengalami tekanan yang berarti dalam masa sebelum dan sesudah LCA akibat perang Kongo kedua. Hal tersebut disebabkan dua hal: *pertama*, sifat pemerintahan kedua Kabila yang cenderung otoriter ditambah kondisi lemahnya kesadaran politik dan sosial masyarakat Kongo yang menyebabkan tekanan perekonomian akibat perang tidak langsung mengancam legitimasi penguasa walaupun terjadi inflasi lebih dari 500 persen menjelang awal tahun 2001 di Kongo. *Kedua*, prospek kemenangan militer dan penguasaan kembali sumber daya alam Kongo justru terlihat lebih menguntungkan bagi pemerintahan Kabila

dan sekutunya. Kekayaan alam yang berlimpah dari Kongo-lah yang memungkinkan Kabila senior untuk bertahan dimana ia mampu ‘membeli’ dukungan dari negara-negara sekutunya dengan janji pemberian izin pengelolaan dan pembukaan berbagai tambang mineral dan perkebunan. Kemudian walaupun secara militer pemerintah Kabila sudah berada dalam posisi terdesak, penandatanganan LCA oleh pemerintahan Kabila hanya digunakan sebagai sebuah manuver politik untuk membeli waktu demi mempersiapkan pasukan koalisinya dalam menghadapi serbuan pasukan pemberontak.<sup>127</sup> Hal ini dimungkinkan dengan adanya bantuan secara ekstensif dari Zimbabwe, Angola, Namibia, Sudan, Libya dan Chad yang awalnya berhasil membuat Kabila memenangkan pertempuran di front bagian barat Kongo yang semakin menambah tekad Kabila senior. Kemudian berbagai kekalahan militer juga tidak kunjung membuat Kabila menyerah karena sifatnya yang keras kepala sehingga banyak pihak menganggap pembunuhannya pada bulan Januari 2001 merupakan orkestrasi pihak – pihak yang sudah muak dengannya.

Adapun MHS muncul bagi pemerintahan RDK pada saat pergantian kekuasaan yang dilimpahkan pada Joseph Kabila. Tantangan yang muncul bagi Kabila junior pada waktu itu adalah dalam meyakinkan koalisi negara-negara pendukungnya akan kemampuan dirinya untuk memimpin RDK dan pada saat yang sama masih dapat mengakomodasi kepentingan mereka. Oleh karenanya penggunaan solusi militer konvensional bukan lagi menjadi opsi bagi Kabila junior mengingat kuatnya desakan Namibia dan Angola agar pemerintahan baru Kinshasa menjadi lebih akomodatif terhadap proses perdamaian di RDK.<sup>128</sup> Strategi terakhir yang digunakan Kabila junior untuk membalas kekalahan pemerintah selama ini adalah dengan mengirim kelompok-kelompok bersenjata ke belakang (terutama ALIR dan Mayi-Mayi) garis wilayah musuh dan

---

<sup>127</sup> ICG Africa Report, *Scramble for the Congo: Anatomy of an Ugly War*, Agustus 2000, hlm. 3.

<sup>128</sup> ICG Africa Report N. 27, *From Kabila to Kabila: Prospect for Peace in The Congo*, 16 Maret 2001. Hlm. 15.

kemudian melakukan destabilisasi keamanan dan politik disana.<sup>129</sup> Namun MHS secara militer timbul bagi pemerintahan Kabila junior menjelang September 2001 setelah Rwanda dan RCD-Goma berhasil mengalahkan milisi ALIR dan Mayi-Mayi di kota Fizi, sementara MLC dan Uganda semakin mengkonsolidasikan kekuasaan di wilayah bagian utara Kongo.<sup>130</sup> Secara ekonomi, Kabila junior harus menyelesaikan permasalahan yang diwariskan dari kesalahan pengelolaan perekonomian ayahnya demi menciptakan legitimasi terhadap kekuasaannya. Kelangkaan barang dan inflasi yang tinggi di Kinshasa saja pada tahun 2001 membuat Kabila junior membutuhkan US\$ 8 juta setiap bulannya untuk menyediakan barang kebutuhan dasar seperti makanan dan bahan bakar.<sup>131</sup> Situasi perekonomian yang terdesak ini membuatnya harus memenangkan kembali kemauan para donor untuk memberikan bantuan finansial kepada rezim pemerintahannya.

Zimbabwe mengalami MHS pada saat penandatanganan LCA karena keterlibatannya dalam konflik di RDK justru merugikannya secara militer dan ekonomi. Dari sisi pertimbangan ekonomi, keterlibatan di Kongo seharusnya memberi Zimbabwe keuntungan yang besar. Dalam salah satu kesepakatan yang disetujui oleh pemerintah RDK dan Zimbabwe misalnya, disepakati bahwa perusahaan tambang Zimbabwe (Ridgepointe) akan mengambil alih manajemen operasi perusahaan tambang nasional Kongo (Gecaminces) dan juga mendapatkan *share* sebesar 37,5% dari total keuntungan perusahaan tersebut sebagai kompensasi pengiriman persenjataan dan amunisi dari ZDI (*Zimbabwean Defense Industry*).<sup>132</sup> Diperkirakan Mugabe dan kroni-kroninya sendiri mendapatkankurang

---

<sup>129</sup> Marc Lacey, *War is Still A Way of Life for Congolese Rebels*, The New York Times, diakses dari <http://www.nytimes.com/2002/11/21/world/war-is-still-a-way-of-life-for-congo-rebels.html?scp=14&sq=Congo%20War&st=nyt&pagewanted=1> pada 21 Desember 2011 pukul 12.22 WIB.

<sup>130</sup> ICG Africa Report N. 37, *The Inter-Congolese Dialogue*, 16 November 2001, hlm. 22 – 23.

<sup>131</sup> *Ibid.* hlm. 12 – 13.

<sup>132</sup> Hussein Solomon, *Op.cit.*, hlm. 15 – 16.

lebih US\$ 4 milyar dari keterlibatannya di Konflik Kongo melalui berbagai pemindahan aset perusahaan nasional yang dilakukan Kabila senior. Secara militer keterlibatan Zimbabwe di Kongo pada awalnya menguntungkan, terutama setelah keberhasilan pasukan Zimbabwe bersama-sama dengan Angola dan Namibia meredam pemberontakan di front barat RDK. Pasukan Zimbabwe yang datang dengan perlengkapan dan persenjataan lengkap awalnya dianggap mampu membalikkan kondisi dengan cepat di RDK.

Adapun kondisi MHS mulai dirasakan oleh Zimbabwe dua tahun setelah penandatanganan LCA. Secara militer, Zimbabwe terus mengalami kerugian disebabkan kegagalan pasukan koalisi di berbagai kota di provinsi timur Kongo yang tidak jarang diakibatkan lemahnya dan kurang dapat diandalkannya profesionalitas pasukan Kongo sendiri. Oleh karenanya, perjanjian Lusaka dianggap merupakan peluang bagi Zimbabwe untuk menyelamatkan muka dan menarik diri dari Kongo.<sup>133</sup> Secara ekonomi, menjelang akhir tahun 2000 konflik Kongo tidak lagi menguntungkan baik secara militer dan ekonomi bagi Zimbabwe. Hal ini disebabkan janji keuntungan dari berbagai industri pertambangan tidak termaterialisasi sehingga membuat pemerintahan Kabila berhutang sekitar US\$ 2,6 juta terhadap pemerintah Zimbabwe.<sup>134</sup> Selain itu kondisi perekonomian nasional Zimbabwe sendiri semakin dipersulit dengan beban pemeliharaan pasukan Zimbabwe di RDK sebesar US\$ 3 Juta per bulannya. Akibatnya protes dari berbagai kalangan masyarakat mulai muncul di Zimbabwe akibat pengeluaran pemerintah yang tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan negara. Zimbabwe juga mengalami tekanan dari berbagai donor dan lembaga keuangan internasional untuk memotong pengeluaran publiknya yang terlalu besar dan menyebabkan tingginya hutang negara tersebut dimana kampanye militer

---

<sup>133</sup> Liisa Lakso dan Harri Hinkannen, *Op.Cit.*, hlm. 77.

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm 79.



merupakan salah satu penyebabnya.<sup>135</sup>

Pemerintah Angola (MPLA) tidak mencapai fase MHS menjelang penandatanganan LCA. Dalam kalkulasi ekonomi, para Jenderal Angola dan presiden Dos Santos sangat menunjukkan ketertarikannya kepada kekayaan berlian Kongo dan konsesi pengeboran minyak di provinsi Bas-Kongo yang membuat intervensi Angola di Kongo menjadi *self-financing*.<sup>136</sup> Akan tetapi data lengkap mengenai keuntungan material yang didapatkan oleh Angola dan Namibia tidak dapat ditemukan oleh Panel penyelidik PBB yang menduga informasi tersebut sengaja disembunyikan oleh kedua negara tersebut.<sup>137</sup> Dalam kalkulasi militer, Angola terlibat dalam konflik Kongo untuk mencegah semakin luasnya pemberontak UNITA memanfaatkan kekacauan RDK untuk melakukan konsolidasi militer dan kemudian menyerang Angola.<sup>138</sup> Dengan latar belakang *regime survival* tersebut, walaupun MPLA ikut menandatangani LCA, negara ini masih tetap berambisi memburu gerakan UNITA dan pemimpinnya Jonas Savimbi yang diduga bekerjasama erat dengan kelompok RCD dan pemerintahan Kigali. Penandatanganan LCA maupun terus bergulirnya konflik Kongo tidak berarti banyak bagi Angola karena ia meminimalisir kerugian militernya dengan tetap berfokus melakukan *strategic denial* terhadap UNITA dan membatasi peranan pasukan infantrinya hanya terlibat untuk menjaga keamanan lokasi-lokasi strategis di wilayah barat Kongo saja.<sup>139</sup> Adapun secara militer intervensi Angola di RDK

<sup>135</sup> Andrew Meldrum, *Britain Accused of Hypocrisy as War Cripples Economy*, The Guardian edisi 21 Januari 2000 diakses dari

<http://www.guardian.co.uk/world/2000/jan/21/zimbabwe.ethicalforeignpolicy?INTCMP=SRCH> pada 21 Desember 2011 pukul 14.22 WIB.

<sup>136</sup> ICG, *Scramble for Congo: Anatomy of An Ugly War*, *Op.Cit.*, hlm. 57.

<sup>137</sup> Laporan Panel Ahli PBB Terhadap Eksploitasi Ilegal Sumber Daya Kongo (*Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo*), diakses dari <http://www.un.org/News/dh/latest/drcongo.htm> pada 21 Desember 2011 pukul 21.59 WIB.

<sup>138</sup> Gerrie Swart dan Hussein Solomon, *Op.cit.*, hlm. 15.

<sup>139</sup> Thomas Turner, *Angola's Role in The Congo Wars*, dalam John F. Clark eds., *The African Stakes of Congo War*, (New York: Palgrave Macmillan, 2002), hlm. 86 – 87.

membuahkan hasil yang positif karena ia berhasil memotong akses *supply chain* dan penyelundupan berlian UNITA dari wilayah RDK yang pada akhirnya melemahkan kekuatan UNITA sebagai pasukan konvensional sepanjang tahun 2000.<sup>140</sup> Adapun kondisi MHS muncul bagi Angola pada 22 Februari tahun 2002 ketika pemimpin UNITA Jonas Savimbi terbunuh dan melemahkan gerakan UNITA secara signifikan yang kemudian membuat keterlibatannya di Kongo menjadi tidak relevan lagi terhadap kepentingan keamanannya yang sejak awal tahun 2000 hanya memiliki kurang dari 2500 tentara di wilayah RDK.<sup>141</sup>

Namibia sendiri tidak terlibat secara ekstensif di perang Kongo kedua dan mengalami MHS menjelang ditandatanganinya LCA. Negara yang pada waktu itu dipimpin oleh Sam Nujoma cenderung hanya menunjukan dukungan simbolik terhadap pemerintahan Lauren Kabila yang memiliki hubungan baik dengan Nujoma yang berasal merupakan buah pertemanan diantara keduanya sejak dulu. Adapun keuntungan perekonomian yang diperoleh Namibia terpusat pada hubungan Nujoma–Kabila dimana keduanya membuat perusahaan penambangan berlian atas kepemilikan mereka berdua. Adapun secara militer, keterlibatannya di konflik Kongo menjadi merugikan ketika muncul pemberontakan internal di Namibia. Pada bulan Agustus 1999 pertempuran pecah di daerah Caprivi Strip di Namibia antara pasukan pemerintah dan gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Mishake Muyongo yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap penindasan dan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh presiden Sam Nujoma.<sup>142</sup> Pemberontakan yang dilatarbelakangi

<sup>140</sup> ICG Africa Report N.26, *Scramble for Congo: Anatomy of An Ugly War*, 20 Desember 2000, hlm. 16.

<sup>141</sup> BBC Africa News, *Savimbi Died With A Gun in Hand*, BBC News edisi 25 Februari 2002, diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1839252.stm> pada 14 Desember 2011 pukul 17.43 WIB.

<sup>142</sup> Donald G. McNeil Jr., *Tangled War in Congo Now Snares Namibia*, The New York Times edisi 6 Agustus 1999, diakses dari <http://www.nytimes.com/1999/08/06/world/tangled-war-in-congo-now-snares-namibians.html?scp=7&sq=Congo+War&st=nyt> pada 13 Desember 2011 pukul 03.11 WIB.

dorongan separatisme etnis dan ketidakpuasan Muyongo akan perlakuan Sam Nujoma ini memberikan tantangan yang signifikan bagi pemerintahan Namibia yang terpaksa harus memfokuskan pasukannya untuk menghadapi tantangan dalam negeri ini. Akibatnya keterlibatan Namibia yang sebelumnya sudah sangat minimal menjadi semakin berkurang dalam aliansi pasukan pro-pemerintah. Namibia sempat memberikan dukungan simbolisnya kepada Kabila junior walau akhirnya dengan antusias menarik diri dari RDK sesuai kesepakatan Kampala.

Rwanda dan Uganda tidak mengalami *Mutually Hurting Stalemate* pada saat penandatanganan LCA dikarenakan kedua negara mengalami keuntungan yang sangat besar dalam keterlibatan mereka dalam perang Kongo kedua akibat pengerukan kekayaan sumber daya alam Kongo yang sangat melimpah.<sup>143</sup> Bagi Rwanda dan Uganda keuntungan ekonomi dari keterlibatan mereka dalam bentuk eksploitasi mineral menghasilkan kenaikan jumlah volume perdagangan masing-masing negara ini secara drastis, seperti terlihat dalam tabel berikut.<sup>144</sup>

Tabel 3.2 Meningkatnya Perdagangan Mineral Rwanda dan Uganda Akibat Konflik Kongo II

Tahun	Rwanda				Uganda			
	Emas (ton)	Coltan (ton)	Niobium (ribuan\$)	Berlian (ribuan\$)	Emas	Cassiterite (ton)	Niobium (ribuan\$)	Berlian (ribuan\$)
1994	0.22	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
1995	3.09	n.a	0	n.a	1	247	54	n.a
1996	5.07	n.a	0	n.a	1	330	97	n.a
1997	6.82	2.57	13	198.3	10	327	224	720.4
1998	5.03	18.57	580	1440	17	330	224	16.6
1999	11.45	69.5	782	1813.5	10	309	122	439.3
2000	10.83	n.a	n.a	1263.4	10	437	83	1788

MHS tidak tercipta menjelang penandatanganan LCA bagi Rwanda. Secara ekonomi, keterlibatan Rwanda dalam konflik Kongo tidak menimbulkan kerugian samasekali dikarenakan pengerukan sumber daya alam besar-besaran di

<sup>143</sup> Emmanuel Ksiangani, *Op,cit.*, hlm. 43.

<sup>144</sup> Ola Olson & Heather Congdon Pors, *Congo: The Price of Predation*, Journal of Peace Research, vol. 41, no. 3, 2004, hlm. 327

Kongo seperti terlihat dalam tabel diatas membuat struktur pembiayaan operasi militernya menjadi *self-financing* dan bahkan surplus.<sup>145</sup> Rwanda menciptakan *Congo Desk* untuk mengatur segala aktivitas komersialnya di wilayah Republik Demokrasi Kongo yang memiliki struktur pendanaan terpisah dengan anggaran belanja nasional pemerintah Kigali dan diperkirakan pada tahun 1999 berhasil mengeruk keuntungan sekitar US\$ 320 juta atau setara dengan 1/5 GNP Rwanda.<sup>146</sup> Secara militer, menjelang penandatanganan LCA Rwanda masih diatas angin walaupun gagal menjalankan strategi *blitzkrieg* yang awalnya mampu mengurangi kesuksesan mereka sewaktu menjatuhkan Mobutu. Tentara Rwanda dan kelompok pemberontak RCD juga berbagai daerah penting di Kongo seluas 1/3 keseluruhan teritori Kongo sehingga penandatanganan perjanjian Lusaka dan keharusan gencatan senjata justru menguntungkan Rwanda. Namun secara militer, keterlibatan Rwanda dalam konflik Kongo mulai tidak menguntungkan lagi menjelang pertengahan tahun 2002 yang disebabkan oleh tiga hal:<sup>147</sup> (a) fakta bahwa MLC, Uganda dan Burundi mulai bernegosiasi dan mungkin mencapai sebuah kesepakatan perdamaian baru menciptakan potensi isolasi dan terkepungnya RCD-Goma oleh koalisi baru yang terbentuk akibat maneuver politik Kabila junior; (b) Dikeluarkannya laporan investigasi PBB yang berisikan bukti pengerukan keuntungan dari Kongo oleh Rwanda dan Uganda semakin memperlemah legitimasi intervensinya dan memperkuat propaganda politik Kabila dan sekutunya; dan terakhir (c) muncul berbagai laporan adanya pelanggaran HAM dan terutama dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh RCD-Goma dengan bantuan tentara Rwanda di Kisangani pada Mei 2002 yang berpotensi membuat AS menjauh dari Rwanda. Adapun secara ekonomi, tekanan internasional bagi Rwanda yang disertai dengan ancaman pemutusan bantuan

---

<sup>145</sup> Phillip Roessler dan John Prendergast, *Op.cit.*, hlm. 241.

<sup>146</sup> *Final Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of Congo (DRC)*, diakses dari <http://www.un.org/News/dh/latest/drcongo.htm> pada 21 Desember 2011 pukul 1.10 WIB.

<sup>147</sup> ICG Africa Report N.26, *Op.Cit.*, hlm. 17.

ekonomi dan militer membuat kalkulasi ekonomi negara itu berubah. Hal ini disebabkan Rwanda membutuhkan bantuan finansial dan sokongan masyarakat internasional untuk memperkuat legitimasi pemerintahan baru yang didominasi etnis Tutsi di negara tersebut.

MHS juga tidak tercipta menjelang penandatanganan LCA bagi Uganda. Secara ekonomi, Uganda samasekali tidak dirugikan dengan keterlibatannya di RDK. Mirip dengan Rwanda, Uganda mampu membuat operasi militernya menjadi *self-sufficient* melalui jaringan komersialisasi Uganda di RDK yang dibentuk mengikuti struktur militer tentara nasionalnya dengan dipimpin oleh Salim Saleh dan (kemudian digantikan oleh) James Kazini. Keuntungan besar yang didapat Uganda dalam konflik Kongo disinyalir membantu negara tersebut mengurangi defisit perdagangannya dan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonominya.<sup>148</sup> Selain itu, Uganda yang sedang mengembangkan perekonomiannya melihat Kongo sebagai potensi untuk mempercepat pertumbuhan perekonomiannya dan sekaligus menciptakan zona pengaruh ekonomi yang berkelanjutan.<sup>149</sup> Secara militer, keterlibatan Uganda menguntungkan baik sebelum maupun sesudah LCA. Uganda meraih kesuksesan yang substansial bersama kelompok pemberontak MLC yang berhasil merebut berbagai kota di provinsi Equateur dan kemudian menangkis berbagai upaya serangan balik pemerintah. Dalam keterlibatannya di RDK, pemerintah Uganda pun diuntungkan karena dapat sekaligus memerangi berbagai kelompok bersenjata yang ingin menjatuhkannya (ADF & LRA) yang selama ini menggunakan Kongo sebagai basis militer mereka.

Adapun munculnya MHS secara militer bagi Uganda dapat dikaitkan pada semakin tidak relevannya lagi keterlibatan Uganda di Kongo karena Sudan

---

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>149</sup> John F. Clark, *Musevini's Adventure in the Congo War: Uganda's Vietnam* dalam John F. Clark eds., *The African Stakes of Congo War*, (New York: Palgrave Macmillan, 2002), hlm. 152 – 153.

(yang merupakan pendukung ADF) dan berbagai kelompok bersenjata yang ancaman keamanannya menjadi semakin lemah dan jarang menggunakan wilayah DRK sebagai basis operasinya menjelang akhir 2002. Uganda juga harus menghadapi kenyataan gerakan pemberontak yang ia ciptakan tidak lagi bisa diandalkan dimana MLC telah menjadi semakin independen dalam partisipasinya di forum ICD sedangkan RCD-ML semakin terjebak dalam kisruh persaingan internalnya menjelang awal 2002.<sup>150</sup> Namun titik MHS bagi Uganda sendiri muncul seiring menguatnya tekanan dunia internasional yang melihatnya bertanggungjawab secara langsung terhadap eksploitasi illegal sumber daya alam di Kongo dan destabilisasi kawasan Ituri yang menyebabkan pecahnya konflik etnis skala besar antara suku Lendu dan Hema pada pertengahan 2001.<sup>151</sup> Adapun secara ekonomi tekanan dunia internasional menjelang awal tahun 2002 mempengaruhi Uganda sama halnya dengan pengaruhnya terhadap Rwanda. Berbagai donor yang sangat dibutuhkan Uganda seperti IMF mengancam untuk menunda pemberian hutang bagi Uganda. Adapun struktur perekonomian yang sudah dibangun oleh Uganda melalui reformasi administrasi dan kerjasama dengan MLC dan RCD-ML tidak lagi mengharuskannya untuk mempertahankan keberadaan pasukannya dalam skala besar di wilayah RDK.

Bagi faksi-faksi kelompok pemberontak, MHS tidak terjadi menjelang ditandatanganinya LCA melainkan pada saat negara-negara pendukung mereka memutuskan untuk mengurangi keterlibatannya di konflik RDK. Oleh karenanya terdapat kaitan erat antara *timing* munculnya MHS negara patron dengan munculnya MHS kelompok pemberontak yang didukungnya.

Pada saat penandatanganan LCA RCD-Goma belum mencapai MHS dikarenakan pada saat itu kedua gerakan pemberontakan secara militer sedang diatas angin. Secara ekonomi keterlibatan RCD dalam konflik berkepanjangan di Kongo tidak kunjung mencapai titik jenuh dan merugikan. Hal tersebut

---

<sup>150</sup> ICG Africa Report N. 26, *Op.cit.*, hlm. 36

<sup>151</sup> *Ibid*, hlm. 33.

disebabkan bukan saja karena RCD didukung secara signifikan oleh Rwanda tetapi juga karena RCD mendapatkan keuntungan yang sama besarnya dengan Rwanda lewat pengerukan kekayaan alam Kongo. Adapun secara militer, menjelang penandatanganan LCA pasukan RCD-Goma telah menguasai secara signifikan 3 provinsi di wilayah timur Kongo yakni kedua Kivu, Bukavu dan Katanga dan mengancam dua kota penting lainnya bagi pemerintahan Kinshasa yakni kota berlian Mbuji-Mayi dan Lumumbashi yang merupakan kota ketiga terbesar di Kongo. Penandatanganan LCA sendiri dilakukan oleh RCD-Goma merupakan hasil desakan kuat komunitas internasional terhadap Rwanda dan bukan muncul atas inisiatifnya sendiri. Titik MHS secara militer muncul ketika timbul perselisihan internal dalam RCD yang mengurangi kohesivitas dan moral pasukan pemberontak. Pada saat yang bersamaan, menguatnya sentiment anti RCD dan anti Rwanda yang semakin memperkuat perlawanan milisi Mayi-Mayi dan Alir diperparah dengan membaiknya hubungan Burundi dan Kabila junior (yang memungkinkan terkepungnya RCD-Goma).<sup>152</sup>Namun, titik MHS bagi RCD tercipta pada awal tahun 2002 ditandai dengan menguatnya tekanan dunia internasional kepada Rwanda untuk segera menarik diri dari Kongo yang berpotensi membuat RCD menjadi sangat *vulnerable*.<sup>153</sup>Dengan logika yang sama, titik MHS secara ekonomi juga muncul di periode yang sama dengan kerugian militer dalam melanjutkan konflik di Kongo. Oleh karenanya menjelang pertengahan tahun 2002, RCD-Goma akhirnya menjadi lebih akomodatif terhadap proses perundingan sehingga dan membantu tercapainya kesepakatan Pretoria II setelah sebelumnya terus menjadi *stumbling block* di berbagai penyelenggaraan ICD.

MLC tidak mengalami MHS pada saat penandatanganan LCA; ia mengalami MHS bersamaan dengan semakin berkurangnya ketertarikan presiden

---

<sup>152</sup> ICG Africa Report N. 56, *The Kivus: The Forgotten Crucibles of Congo Conflict*, 24 Januari 2003, hlm. 15.

<sup>153</sup> ICG Africa Report N. 27, *Op.cit.*, hlm.23.

Uganda, Yoweri Museveni untuk semakin memperpanjang konflik di RDK.<sup>154</sup> Secara ekonomi, sejak awal terbentuknya MLC, ia mendapat dukungan signifikan dari Uganda dan penduduk provinsi Equateur sehingga menjelang LCA kelompok ini justru sedang tumbuh dengan pesat dan tidak mengalami permasalahan berarti berbeda dengan RCD yang harus menghadapi perselisihan internal dan perlawanan penduduk RDK. Secara militer, kelompok ini justru menunjukkan prestasi yang gemilang dengan keberhasilannya menguasai provinsi Equateur dan mempertahankannya dari serangan balik pasukan pemerintah pada awal tahun 2000. Justru MLC hampir saja menguasai provinsi Mbandaka yang merupakan gerbang menuju ibu kota RDK kalau saja Uganda tidak ditekan oleh AS untuk menahan laju MLC dan menghormati kesepakatan gencatan senjata. Penulis sulit menentukan munculnya bagi MLC secara ekonomi. Hal tersebut disebabkan adanya dukungan finansial secara luas yang diterima Bemba dari berbagai kalangan pengikutnya (termasuk didalamnya kelas borjuis yang mengeruk keuntungan pada era kekuasaan Mobutu) dan keberhasilannya dalam menciptakan struktur pemerintahan administratif yang membuat perekonomian daerah yang dikuasainya relatif lebih stabil dibandingkan dengan daerah kekuasaan pemerintah maupun RCD. Adapun secara militer, kelompok MLC masih sangat bergantung pada dukungan pasukan konvensional Uganda dalam pertahanan dan kampanye ofensifnya seperti tercermin dari struktur kepemimpinan tentara pemberontak yang banyak diantaranya diisi oleh perwira UPDF (tentara nasional Uganda). Oleh karenanya keputusan UPDF (tentara nasional Uganda) untuk mengurangi aktivitas dan porsi pasukannya secara signifikan di RDK menciptakan resiko kekalahan yang signifikan bagi MLC sehingga kemudian mendorong timbulnya MHS bagi kelompok ini.

---

<sup>154</sup> ICG Africa Report N. 27, *Ibid*, hlm.20.



### 3.2.2. Belum Adanya Redefinisi Kepentingan Pihak-Pihak Yang Bertikai Terhadap Konvergensi Sikap Yang Mendukung Upaya Perdamaian

Secara umum kebanyakan pihak belum meredefinisikan kepentingannya secara positif menjelang penandatanganan LCA. Kebanyakan pihak-pihak yang bertikai hanya merubah format strategi mereka ketika menandatangani LCA dan bukan merubah cara pandang atau asumsi kepentingan yang ingin mereka kejar yang dalam hal ini bukanlah perdamaian di Kongo. Redefinisi kepentingan para aktor yang memungkinkan konvergensi terhadap terbentuknya sikap positif terhadap perdamaian di Kongo baru muncul menjelang pertengahan tahun 2001 yang terkait erat dengan meningkatnya dukungan terhadap rencana *disengagement* Kampala (*Kampala Disengagement Plan*) yang disetujui pada 8 April tahun 2000 dan dimulainya ICD setelah tertunda selama beberapa bulan tanpa hasil.

Pemerintah Kongo belum meredefinisikan kepentingannya menjelang Lusaka. Hal itu disebabkan bahwa pemerintahan Laurent Kabila menandatangani perjanjian LCA didasari kepentingan untuk menciptakan proses perdamaian di RDK namun untuk membeli waktu demi mencegah ancaman kekalahan militer yang begitu besar dan akibat serangan intensif pasukan pemberontak.<sup>155</sup> Bukti lainnya dapat dilihat dari minimalnya realisasi komitmen pemerintahan RDK terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian Lusaka. Setelah LCA ditandatangani misalnya, pihak RDK cenderung melakukan berbagai cara agar implementasi ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut ditunda atau gagal. Buktinya, belum sampai setahun penandatanganan LCA oleh RDK, Laurent Kabila langsung mengumumkan bahwa perjanjian tersebut cacat dan tidak layak untuk diimplementasikan dan kemudian memutuskan untuk kembali melakukan kampanye militer demi ‘mempertahankan integritas teritorial Kongo’.<sup>156</sup> Adapun perubahan sikap dan wacana kepentingan RDK terjadi paska kematian presiden Laurent Kabila. Kabila junior se usai pelantikannya pada Januari 2001 sebagai

<sup>155</sup> Gerrie Swart & Hussein Solomon, *Op.cit.*, hlm. 13.

<sup>156</sup> Kevin C. Dunn, *Op.cit.*, hlm. 68.

penguasa baru Kongo langsung menegaskan kembali komitmennya untuk mengimplementasikan LCA terutama dalam penyelenggaraan ICD dan penerapan Kampala disengagement plan yang selama ini selalu dipersulit oleh ayahnya.<sup>157</sup> Perubahan sikap ini dapat dikaitkan pada semakin melemahnya dukungan Zimbabwe, Angola dan Namibia terhadap kelanjutan solusi militer terhadap pemberontakandi RDK yang disebabkan perdebatan internal diantara negara-negara aliansi pro-Kabila yang sempat mempertimbangkan opsi untuk menarik diri sepenuhnya dari wilayah Republik Demokrasi Kongo.<sup>158</sup> Bukti lain adanya redefinisi kepentingan dari otoritas RDK adalah perubahan kebijakan secara nyata yang ia lakukan seperti memberi akses dan bantuan teknis terhadap misi MONUC, menjalin kerjasama kembali dengan Masire dalam mempersiapkan proses negosiasi ICD di Gaborone dan dalam mempersiapkan digeralnya pemilu nasional Kongo. Sikap positif yang ditunjukkan Kabila junior ini bukan saja mampu mengembalikan dukungan dunia internasional namun juga membuat popularitasnya dan pengaruhnya meningkat di RDK.

Zimbabwe tidak mengalami redefinisi kepentingan menjelang penandatanganan LCA. Buktinya, pasukan Zimbabwe terus membantu pasukan pemerintah untuk menyerbu titik penting yang dikuasai kelompok pemberontak sepanjang tahun 2000-2001 yang merupakan pelecehan terhadap ketentuan gencatan senjata Lusaka. Redefinisi kepentingan Zimbabwe baru muncul ketika negara tersebut mengumumkan niatnya pada 3 April 2001 untuk menarik pasukannya di Kongo sesuai dengan kesepakatan Kampala<sup>159</sup>. Adapun realisasi janji ini dilakukan sepanjang kuartal kedua tahun 2001 dan baru pada bulan Juni berhasil melakukan penarikan sebanyak 4000 pasukannya dari wilayah RDK.<sup>160</sup>

---

<sup>157</sup> ICG Africa Report N.27, *Op.cit.*, hlm. 13 – 15.

<sup>158</sup> James Astill, *Congolese Mourn Kabilla as his Allies Consider Next Moves*, The Guardian edisi 22 Januari 2001 diakses dari <http://www.guardian.co.uk/world/2001/jan/22/chrimcgregal.james.astill?INTCMP=ILCNETTXT3487> pada 13 Desember 2011 pada pukul 01.22 WIB.

<sup>159</sup> Francois Ngolet, *Op.cit.*, hlm. 210.

<sup>160</sup> *Ibid*, hlm. 211.

Hal ini cukup menunjukkan perubahan prioritas kepentingan Mugabe dan Zimbabwe dari yang sebelumnya sangat mendukung dan antusias membela pasukan pemerintah. Perubahan kepentingan Zimbabwe dapat dikaitkan pada kemunculan tekanan menentang perang akibat mahal biaya yang dikeluarkan tiap bulannya dari konstituen domestik dan dari IMF beserta negara donor lainnya.<sup>161</sup>

Angola tidak mengalami redefinisi kepentingan dalam konflik Kongo menjelang penandatanganan LCA. Perjanjian Lusaka tidak menghentikan Angola melakukan berbagai serangan militer ke kantong-kantong pertahanan UNITA di wilayah RDK dan membantu pemerintah dalam beberapa pertempuran di wilayah timur Kongo. Adapun, indikasi terjadinya redefinisi kepentingan Angola di Kongo baru muncul dalam pernyataan jendral Armando Da Cruz Netto yang berencana menarik sebagian besar tentara Angola dari wilayah RDK pada 11 April 2001 sebagai realisasi terhadap *Kampala disengagement plan*.<sup>162</sup> Kemudian dalam implementasinya, walaupun otoritas Angola terus mengingatkan dirinya akan tetap memantau dan ‘terlibat’ dalam proses perdamaian di Kongo, ia tetap melakukan penarikan pasukan dilakukan secara bertahap dan hanya menyisakan sekitar 300 personel aktif militernya di Kinshasa pada periode Juli 2001.<sup>163</sup>

Namibia mengalami redefinisi kepentingan menjelang penandatanganan LCA. Walaupun peranannya cenderung simbolik, pasukan Namibia terbukti berkontribusi dalam menggagalkan serangan pasukan pemberontak di wilayah barat Kongo dan dalam pengamanan kota Kinshasa pada periode-periode selanjutnya termasuk saat terbunuhnya Kabila senior yang berpotensi

<sup>161</sup> Rachel L. Swarms, *Africa: Zimbabwe, A pledge to Withdraw From Congo*, The New York Times edisi 14 Agustus 2001, diakses dari <http://www.nytimes.com/2002/08/14/world/world-briefing-africa-zimbabwe-a-pledge-to-withdraw-from-congo.html> pada 24 Desember 2011 pukul 08.22 WIB.

<sup>162</sup> Francois Ngolet, *Op.cit*, hlm. 210.

<sup>163</sup> *Remnants of Angola's Army Withdraw*, Chicago Tribune edisi 1 Februari 2002, diakses dari [http://articles.chicagotribune.com/2002-02-01/news/0202010317\\_1\\_congo-angolan-troops-namibia](http://articles.chicagotribune.com/2002-02-01/news/0202010317_1_congo-angolan-troops-namibia) pada 24 Desember 2011 pukul 09.11 WIB.

menciptakan gejolak kekerasan di ibu kota. Perubahan kepentingan Namibia mulai terlihat pada 8 Februari 2001 ketika menteri luar negeri Namibia, Theo Binguirab mengumumkan rencana penerintahan di Windhoek untuk menarik seluruh tentara aktif Namibia dari RDK.<sup>164</sup> Penarikan pasukan mundur kemudian dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan 600 tentara pada 8 Juni 2001 dan baru selesai akhir Agustus di tahun yang sama.

Kepentingan Rwanda tidak mengalami redefinisi ketika LCA. Secara konsisten Rwanda terus menyatakan keinginannya untuk melenyapkan ancaman dari milisi ALIR yang kerap membangkitkan luka lama akibat genosida Rwanda dengan terus-menerus menyerang wilayahnya sejak pertengahan tahun 1995.<sup>165</sup> Penandatanganan LCA merupakan kemenangan diplomatik bagi Rwanda yang bukan saja mendapatkan pengakuan internasional atas permasalahan keamanan yang ia miliki namun juga mendapatkan alasan untuk terus mempertahankan keberadaannya di RDK 'sampai permasalahan keamanannya berhasil ditangani'. Adapun berbagai pelanggaran gencatan senjata dan upaya menghambat operasi MONUC yang Rwanda lakukan menunjukkan sedikitnya kepentingan yang ia miliki terhadap upaya penciptaan perdamaian di RDK. Bahkan ketika negara-negara pro-Kabila dan Uganda mulai mengurangi jumlah pasukannya, pemerintah Rwanda tetap bersikeras mempertahankan keberadaan pasukannya sampai milisi Interrahamwe berhasil ditangani. Adapun redefinisi kepentingan Rwanda sendiri baru terlihat saat ia menyetujui nota kesepakatan (MoU) yang dibuat dengan pemerintah Kongo pada 30 Juli 2002 dimana ia setuju untuk menarik mundur pasukannya dengan syarat pemerintah Kongo membantu menyelesaikan masalah keamanannya terkait dengan keberadaan milisi Interrahamwe dan mantan tentara FAR. Perubahan sikap Rwanda ini terkesan sangat dramatis dan mendadak

---

<sup>164</sup> Francois Ngolet, *Op.cit.*, hlm. 210.

<sup>165</sup> Ian Fisher, *Rwanda's Huge Stake in Congo War*, The New York Times edisi 27 Desember 1998, diakses dari <http://www.nytimes.com/1998/12/27/world/rwanda-s-huge-stake-in-congo-swar.html?scp=6&sq=Congo+War&st=nyt> pada 13 Desember 2011 pukul 02.32 WIB.

mengingat beberapa bulan sebelumnya ia selalu berusaha menghalang-halangi jalannya proses ICD di Sun City dan masih terlibat upaya militer untuk merebut beberapa kota yang terletak disekitar pesisir danau Tanganyika.<sup>166</sup>

Kepentingan Uganda tidak mengalami perubahan berarti baik sebelum atau penandatanganan LCA. Partisipasi Uganda dalam proses negosiasi menuju Lusaka sangat minimal dan cenderung tidak antusias dimana banyak pihak menilai tanda tangan Uganda dalam LCA merupakan hasil tekanan dunia internasional yang kuat yang terkesan dipaksakan. Redefinisi kepentingan Uganda baru terlihat ketika presiden Museveni menyatakan keinginannya di koran nasional *Sunday Vision* untuk menarik pasukan Uganda di RDK karena konflik RDK tidak kunjung mereda ditambah dan prospek implementasi proses perdamaian Lusaka pada April 2001 semakin lemah.<sup>167</sup> Kemudian pemerintah Uganda juga menunjukkan tindakan nyata yang mencerminkan perubahan kepentingannya di RDK dengan menarik mundur 7000 anggota pasukannya dari RDK pada 15 Juli 2001.<sup>168</sup> Perubahan kepentingan ini dapat dikaitkan pada dua sebab: (a) terkait dengan pembahasan sebelumnya mengenai munculnya MHS di Uganda yakni menguatnya tekanan internasional akibat laporan panel ahli PBB mengenai eksploitasi besar-besaran RDK yang dilakukan oleh Uganda; dan (b) presiden Yoweri Museveni akan segera menghadapi pemilihan Umum pada tahun 2002 sehingga retorika penarikan mundur pasukan menjadi tindakan yang menguntungkan baginya untuk menarik lebih banyak pemilih.<sup>169</sup>

Redefinisi kepentingan RCD-Goma tidak terjadi menjelang LCA. Terlepas dari kegagalan kelompok tersebut untuk menjatuhkan Kabila dan menguatnya serangan balik pemerintah selama tahun 2000, kelompok ini berhasil

<sup>166</sup>Emeric Rogiers, *Op.Cit*, hlm. 16.

<sup>167</sup> Francois Ngolet, *Op.cit.*, hlm. 208.

<sup>168</sup>*Ibid*, hlm. 208.

<sup>169</sup> BBC News, *Rwanda Completes DRC Pull-Out*, BBC News Agency pada 5 Oktober 2002 diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2302125.stm> pada 12 Desember 2011 pukul 10.57 WIB.

mengkonsolidasi kekuatannya di tiga provinsi timur Kongo dan meraih keuntungan ekonomi secara signifikan. Paska penandatanganan Lusaka, kelompok RCD juga menandingi keras kepala Kabila senior dengan berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata dan menolak memberikan akses bagi operasi PBB. Adapun selama pelaksanaan ICD, kelompok RCD-Goma berhasil mendapat kecaman keras dari berbagai pihak akibat persistensi yang ia tunjukkan yang pada akhirnya membuat dirinya dan Rwanda terisolasi ketika kelompok pemberontakan MLC berhasil membuat kesepakatan terpisah dengan pemerintahan Kabila junior. Perubahan redefinisi kepentingan dan perubahan sikap RCD-Goma baru terlihat setelah Rwanda mengumumkan keinginan untuk menarik diri dari RDK terutama setelah ditandatanganinya persetujuan Pretoria I antara pemerintah Kinshasa dan Rwanda. Bukti nyata redefinisi kepentingan RCD-Goma dapat dilihat dalam partisipasi dialog antar pihak yang bertikai di Kongo di Pretoria menjelang akhir tahun 2002 dimana RCD menunjukkan sikap lebih kompromis dan mau menerima 'jatah' pembagian kekuasaan pemerintahan transisi baru, yakni diantaranya posisi wakil presiden dan menteri pertahanan Kongo (yang sesuai dengan kepentingan RCD-Goma untuk menyelesaikan permasalahan gerilyawan Hutu di Kongo).

Kelompok pemberontak MLC tidak mengalami redefinisi kepentingan menjelang penandatanganan Lusaka. Hal tersebut disebabkan oleh tidak meruginya MLC akibat konflik yang justru semakin kuat dan berhasil mentransformasikan dirinya menjadi pesaing utama RCD sekaligus ancaman utama bagi pemerintah RDK. Adapun redefinisi kepentingan MLC ditujukannya dalam pembicaraan di berbagai sesi ICD terutama pada pertemuan di Sun City pada Februari 2002 yang memungkinkan ditandatanganinya kesepakatan PACMT pada 19 April 2002 antara dirinya dan pemerintahan Kabila (mengenai pembentukan pemerintahan transisi). Walaupun nantinya perjanjian itu diprotes keras oleh kelompok oposisi sipil dan RDK sehingga gagal direalisasikan,

kesepakatan ini menunjukkan perubahan signifikan dari strategi dan formulasi kepentingan MLC. Bemba sendiri cenderung lebih kooperatif dan akomodatif terhadap proses negosiasi dikarenakan strategi perjuangannya diformulasikan pada berjalannya proses ICD untuk melemahkan posisi pemerintah dan sekaligus pemberontak RCD yang semakin hari terus menjadi semakin tidak populer.<sup>170</sup> Hal itu terlihat dari berbagai upayanya untuk memposisikan dirinya sebagai figur politik yang kredibel dengan berbagai program reformasi administrasi pemerintahan dan ketentaraanya yang ditunjukkan dengan penciptaan aturan keamanan dan penghentian aktivitas militer ofensif MLC sepanjang pertengahan tahun 2002.<sup>171</sup> Alasan lain yang mendorong percepatan upaya diplomatis Bemba adalah ketakutan laten akan berpalingnya Uganda dan Rwanda dari perjuangan anti-Kabila karena tekanan internasional yang semakin menguat terhadap kedua negara tersebut.<sup>172</sup>

### **3.2.3. Tidak Adanya Konsensus Pihak-Pihak Yang Bertikai Terhadap Mekanisme dan Proses Perdamaian Dalam Implementasi LCA.**

Penulis melihat bahwa ketidakmatangan konflik pada proses negosiasi dan implementasi LCA salah satunya disebabkan tidak adanya *consent* dan *endorsement* dari pihak-pihak yang bertikai yang pada akhirnya menyebabkan proses tersebut terus mengalami kebuntuan. Secara umum, aktor-aktor yang tergabung dalam koalisi pro pemerintah tidak dapat menerima ketentuan pemberlakuan gencatan senjata dan implementasi ICD dikarenakan kerugian yang akan ditimbulkannya bagi kepentingan pemerintah RDK. Di sisi lain, aktor-aktor yang tergabung dalam aliansi pasukan pemberontak sulit mendukung upaya perdamaian disebabkan hal tersebut dapat menciptakan resiko kehilangan

---

<sup>170</sup> ICG Africa Report N. 27, *Op.cit.*, hlm. 21.

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm. 22.

pengaruh bagi kelompok-kelompok tersebut dan juga dikarenakan adanya rivalitas yang dalam diantara faksi-faksi pemberontak dan negara pendukungnya.

Pemerintah Kabila setelah penandatanganan LCA selalu menunjukkan penentangan terhadap upaya implementasi perjanjian tersebut. Bagi pemerintah RDK, menerima pengimplementasian LCA seutuhnya berarti kekalahan bagi dirinya sendiri. Kabila menggantungkan LCA pada tanggal 23 Agustus bersamaan dengan Resolusi 1304 dengan memberikan beberapa argumen: *pertama*, bahwa perang kongo bukannya konflik internasional melainkan perang sipil, sehingga keluarnya pasukan asing menjadi elemen penting dan membuat hal seperti ICD tidak lagi memungkinkan untuk dilakukan; *kedua* ia mempertanyakan konsep "power sharing" padahal dirinya adalah penngusaha sebuah negara yang memiliki kedaulatan penuh; *ketiga*, menurutnya perjanjian ini *outdated* dimana kubu pasukan pemberontak sendiri sudah pecah membentuk kelompok-kelompok dengan beberapa pimpinan yang memihak ke pihak Pemerintah. Adapun berbagai tindakan *obstructive* dilakukan Kabila senior terhadap LCA diantaranya: penolakan dan pencekalan terhadap Masire yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai fasilitator ICD, pembatasan terhadap akses dan kerja tim pendahulu MONUC dan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan gencatan senjata.

Adapun penerimaan RDK terhadap proses perdamaian baru ditunjukkan terhadap persetujuan Pretoria II di akhir tahun 2002 setelah melalui berbagai fase negosiasi dan kompromi dengan berbagai aktor yang mewakili kelompok-kelompok pemberontak di RDK. Penerimaan pemerintah itu muncul dikarenakan: (a) perjanjian tersebut dibuat berdasarkan negosiasi organik yang terjadi diantara pihak yang terkait yang memungkinkan Kabila junior memasukan kepentingannya dalam perjanjian damai baru tersebut yakni memastikan dirinya untuk dapat mempertahankan kekuasaan sebagai presiden dalam pemerintahan transisi; dan (b) dilibatkannya berbagai elemen masyarakat sipil dalam negosiasi menuju



Pretoria II menciptakan beban politik tersendiri yang meningkatkan *political cost* bila pemerintah mengkhianati kesepakatan tersebut. Adapun tindakan nyata yang menunjukkan penerimaan pemerintah RDK terhadap Pretoria II terbukti dengan direalisasikannya pemerintahan transisi gabungan antara pihak-pihak yang bertikai pada awal tahun 2003 yang menjadi awal baru dari sejarah Kongo.

Zimbabwe merupakan aktor yang enigmatik dalam jalannya proses perdamaian paska Lusaka. Walaupun situasi perekonomiannya yang sedang dilanda masalah negara ini tetap menunjukkan dukungan yang sangat kuat kepada pemerintahan Kabila yang terus menerus menghindari upaya perdamaian untuk menyelesaikan konflik di RDK. Pada April 2000 misalnya, menteri pertahanan Zimbabwe dalam sebuah pertemuan pasukan aliansi yang dilaksanakan di Kinshasa mencoba meyakinkan Angola dan Namibia bahwa LCA tidak harus mutlak dipatuhi karena perjanjian tersebut tidak mewakili *status quo* konflik yang baru dan juga berusaha membujuk FAA (tentara Angola) harus mengirimkan lebih banyak tentara ke RDK demi membantu serangan balik pasukan pemerintah.

Angola sendiri adalah anggota negara aliansi RDK yang kurang antusias dengan strategi militer Kabila senior yang menginginkan solusi militer bagi pemberontakan yang ada. Terbatasnya aset militer Angola yang pada awal tahun 2000-an kembali bertempur dengan sengit melawan UNITA sehingga menyebabkan ia cenderung menginginkan Kabila bersikap akomodatif semenjak terhadap upaya perdamaian. Akan tetapi berulang kali Angola menunjukkan sikapnya yang mendukung penolakan pemerintah RDK terhadap permintaan kelompok pemberontak dalam negosiasi ICD pada era Februari 2001 yang menginginkan lengsernya Kabila dalam skema pemerintahan transisi. Angola sudah terlalu banyak berinvestasi di Kongo untuk membiarkan pergantian kekuasaan di Kinshasa mengancam kepentingannya apalagi semenjak Angola menilai kelompok RCD dan Bemba sempat memiliki hubungan dengan musuh bebuyutannya, UNITA.

Adapun Namibia dibawah kepemimpinan Sam Nujoma tidak menginginkan apa-apa lagi dari RDK kecuali stabilisasi negara tersebut dan kesempatan untuk keluar dari Kongo tanpa mengkhianati janji aliansi yang ia buat dengan pemerintah RDK dan label kekalahan. Sebagai negara aliansi pertama yang langsung menerima dan memulai *Kampala Disengagement Plan*, ia berulang kali menunjukkan harapannya pada proses ICD dan MONUC.

Adapun munculnya penerimaan Zimbabwe, Angola dan Namibia secara bersamaan terhadap proses perdamaian yang kembali berjalan terlihat ketika mereka bersama-sama dengan mendukung proses negosiasi di ICD yang terutama sekali terlihat dalam memberi dukungan terhadap kompromi atas perjanjian parsial terjadi di Sun City pada Februari 2002 antara Joeph Kabila dan Jean Pierre Bemba mengenai pembagian kekuasaan dalam pemerintahan transisi RDK.<sup>173</sup> Zimbabwe dan Angola dianggap berhasil mempengaruhi Uganda untuk memoderasikan kepentingannya (dengan menerima syarat Kabila tetap menjadi presiden dan Bemba wakil presiden di pemerintahan baru) yang pada akhirnya membuat Rwanda dan RCD terisolasi dan terdesak. Keputusan Zimbabwe, Namibia dan Angola untuk menarik pasukannya masing-masing yang tersisa di Kongo pada periode yang sama juga memberikan indikasi penerimaan Robert Mugabe, Sam Nujoma dan Eduardo Dos Santos terhadap perkembangan situasi di Kongo.

Dalam periode paska LCA Rwanda selalu menjadi penghalang bagi setiap upaya memecahkan kebutuhan dalam negosiasi-negosiasi perdamaian yang dilakukan baik dengan berbagai pelanggaran yang ia lakukan terhadap LCA maupun dengan menggunakan pengaruhnya pada RCD-Goma. Namun, babak baru hubungan RDK – Rwanda sendiri tercipta dari berhasilnya negosiasi bilateral diantara kedua pemerintah yang dimulai pada pertengahan 2002 dan kemudian

---

<sup>173</sup> Gilbert M. Khadiagla, *Mediation Efforts in Africa's Great Lake Region*, The Centre of Humanitarian Dialog edisi 2006, hlm. 60 – 61.

menghasilkan berhasil menghasilkan nota kesepakatan diantara kedua dalam MoU diantara keduanya pada Juli 2002 di Pretoria. Bukti nyata tindakan yang menunjukkan penerimaan Pemerintah Rwanda terhadap proses perdamaian kemudian terlihat dalam keberhasilan pemerintah Rwanda menyelesaikan fase penarikan 20.000 pasukannya pada 5 Oktober 2002 sebelum masa tenggat waktu 90 hari habis.<sup>174</sup> Tindakan ini bukan saja membantu mendorong Uganda untuk melakukan hal yang sama dengannya namun juga memotivasi RCD-Goma menjadi lebih kompromis dan akomodatif dalam dialog di Pretoria pada akhir tahun 2002.

Uganda mempertahankan ambivalensinya terhadap proses perdamaian paska LCA. Di satu sisi Uganda terlihat lebih akomodatif sejak keputusan Musevini untuk mengurangi keterlibatan Uganda di RDK terealisasi menjadi penarikan pasukan Uganda pada periode pertengahan 2001. Namun disisi lain Uganda juga terlihat berusaha memanipulasi proses perdamaian LCA dimana ia bersikukuh mendukung penyatuan kelompok pemberontak RCD-ML & MLC ke dalam satu front bersama (yang kemudian terbukti gagal) ataupun saat ia ikut mencampuri pertikaian di Ituri (antara Lema dan Hendu. Adapun indikasi munculnya penerimaan Uganda terhadap proses perdamaian baru terlihat ketika ia setuju untuk mengurangi keberadaannya di Kongo secara signifikan pada perjanjian Luanda menjelang pada kuartal ketiga tahun 2002. Bukti nyata bahwa pemerintah Uganda menarik mundur lebih dari 9000 personel pasukannya dan hanya menyisakan 1000 pasukan untuk berjaga-jaga di wilayah perbatasannya dengan RDK menunjukkan dukungan pemerintah Musevini terhadap proses perdamaian yang semakin bergulir kencang paska pembicaraan ICD di Sun City. Sedangkan kesediaan Uganda untuk mundur dari Ituri dan kemudian terlibat di

---

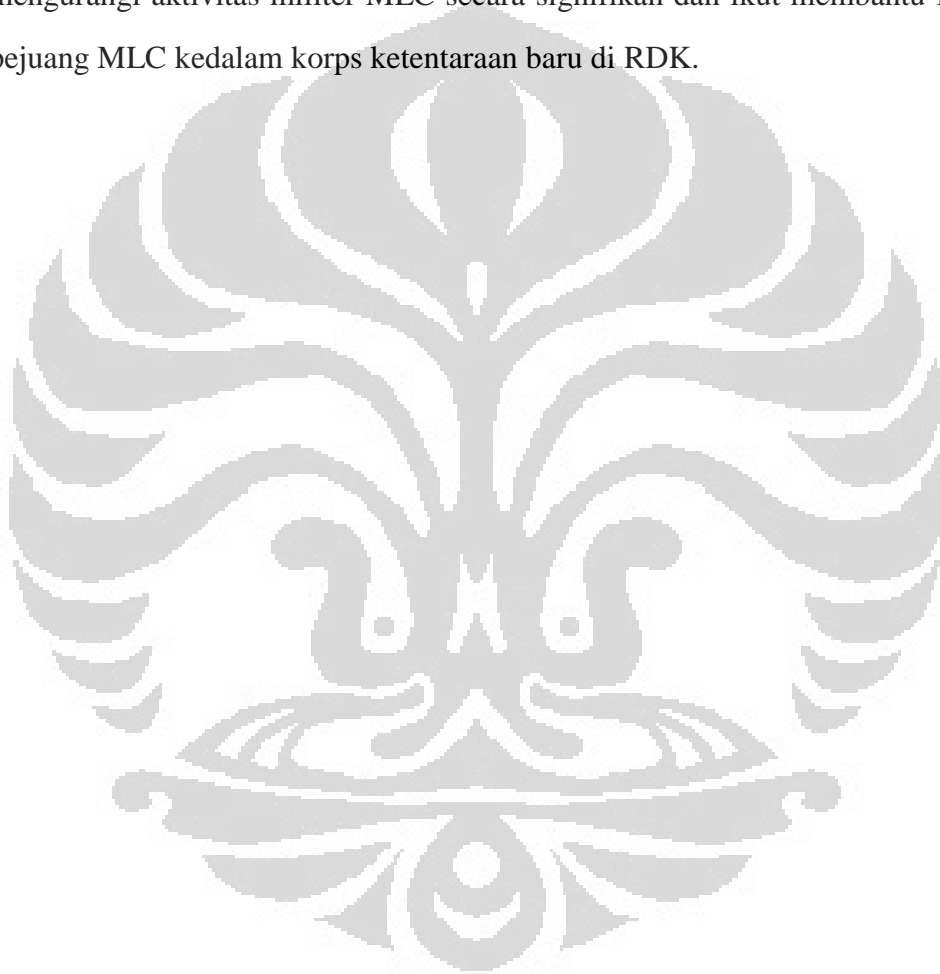
<sup>174</sup> *Great Lakes Region Historical Chronology*, diakses dari <http://www.securitycouncilreport.org/site/c.gIKWLeMTIsG/b.2892715/> pada 24 Desember 2011 pada pukul 13.22 WIB.

upaya bersama dalam komite pasifikasi Ituri (*Ituri Pacification Committee*) menunjukkan terbukannya kesempatan baru kolaborasi antara pemerintah RDK dan Uganda yang sangat dibutuhkan untuk menghapus rasa permusuhan yang ada.

RCD Goma selalu beroperasi mengikuti logika dan arahan dari Rwanda. Tidak sulit bagi pengamat untuk menyimpulkan sikap RCD-Goma yang kurang menerima dan mendukung proses perdamaian LCA dikarenakan tindakan kelompok tersebut yang sifatnya paradoksikal. RCD-Goma berkali-kali menahan proses negosiasi menjelang diberlangsungkannya ICD dengan retorika permasalahan keamanan yang diakibatkan milisi ALiR namun pada saat yang bersamaan berulang kali dengan sengaja menghambat akses MONUC dan JMC untuk menjalankan tugasnya melakukan upaya demobilisasi dan pelucutan senjata bagi kelompok-kelompok bersenjata di Kongo. Adapun perubahan internal RCD-Goma terutama munculnya penerimaan dan dukungan dari organisasi tersebut terhadap proses perdamaian akhirnya ditunjukkan pada akhir tahun 2002 dengan partisipasinya dalam penandatanganan perjanjian Pretoria II dimana ia rela menerima kompromi berupa kedudukan Kabila sebagai presiden dalam pemerintahan transisi. Dukungan RCD-Goma pada implementasi Pretoria II terlihat pada kesediaan kelompok milisi bersenjata tersebut meninggalkan kantung-kantung kekuasaannya sebelum kemudian diintegrasikan ke dalam struktur pasukan nasional Kongo walaupun hal itu berpotensi berarti merusak rantai kepemimpinan yang sudah ada dalam struktur internal RCD-Goma.

Kelompok MLC sendiri dapat dibilang merupakan kelompok yang paling akomodatif dan antusias dalam proses perdamaian di Kongo. Berbeda dengan kelompok RCD-Goma dan aktor-aktor lainnya strategi politik MLC dibuat berdasarkan tujuan untuk memperkuat posisi dan legitimasi Bemba untuk mengalahkan Joseph Kabila lewat ICD dan ataupun pemilu di RDK. Adapun persetujuan Pretoria II menandakan munculnya rasa kepercayaan dan dukungan yang telah lama diharapkan dari kelompok ini terhadap upaya perjanjian paska

Lusaka. Bukan saja hal itu mengkonfirmasi perubahan kelakuan MLC secara substansial yang mulai terlihat pada persetujuan PACMT (antara Kabila dan Bemba di Sun City), tetapi juga menunjukkan kesediaan Jean Pierre Bemba untuk memoderasi keinginannya dalam kinerja pemerintahan transisi kedepannya. Sebagai bukti lebih jauh keseriusan MLC dalam mendukung proses perdamaian baru di RDK, setelah pelantikannya pada tahun 2003 awal, Bemba pun langsung mengurangi aktivitas militer MLC secara signifikan dan ikut membantu integrasi pejuang MLC kedalam korps ketentaraan baru di RDK.



## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PENGARUH KETIDAKMATANGAN KONFLIK DAN KEGAGALAN IMPLEMENTASI LCA

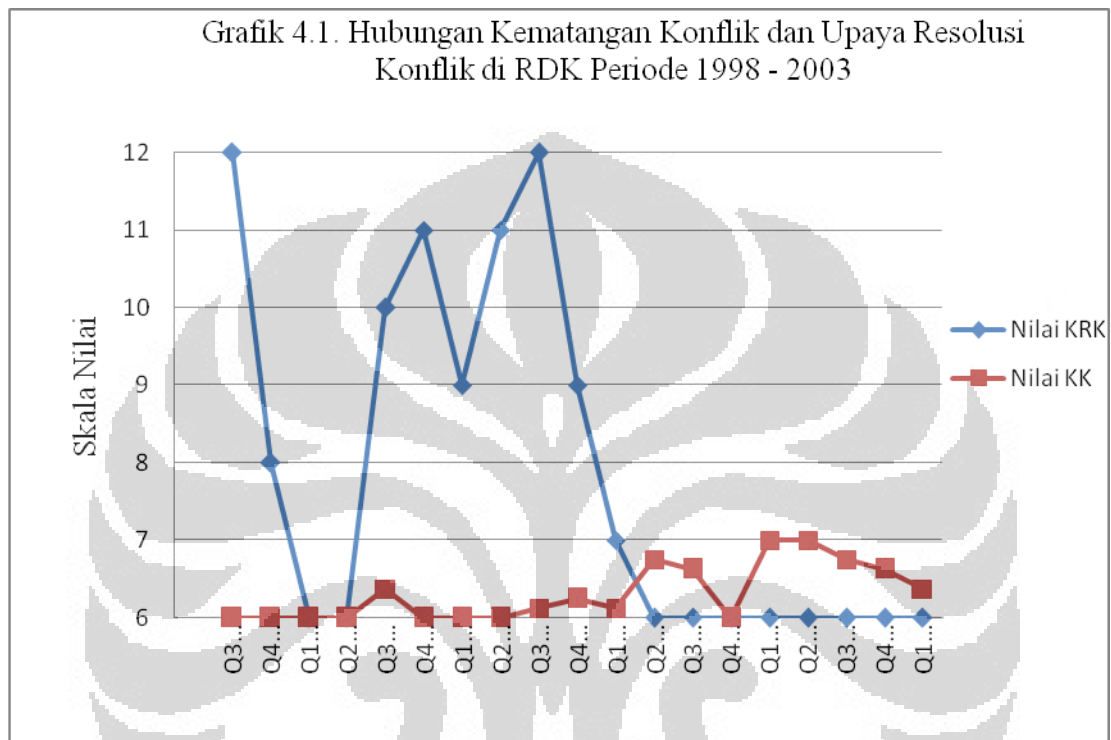
#### 4.1. Hubungan Kematangan Konflik Dengan Kegagalan Upaya Pengimplementasian Perjanjian Genatan Senjata Lusaka

Dengan menggabungkan tabel informasi intensitas konflik yang tercantum di bab II dan tabel kematangan konflik pada bab III tulisan ini berusaha menemukan hubungan relasional diantara keduanya. Perbedaan skala nilai pada kedua tabel dijumpatani dengan mengkonversikan nilai total kematangan konflik dari segenap aktor yang diteliti menjadi nilai rata-rata kematangan konflik per periode dengan membagi nilai total akhir dengan jumlah aktor yang ada. Berikut adalah tabel yang dihasilkan dalam proses tersebut:

No	Periode	Nilai KRK	Nilai KK	Keterangan
1	Q3 1998	12	6	Terbukti
2	Q4 1998	8	6	Terbukti
3	Q1 1999	6	8	Terbukti
4	Q2 1999	6	9	Terbukti
5	Q3 1999	10	6.375	Anomali
6	Q4 1999	11	6	Terbukti
7	Q1 2000	9	6.25	Terbukti
8	Q2 2000	11	6	Terbukti
9	Q3 2000	12	6.125	Anomali
10	Q4 2000	9	6.25	Terbukti
11	Q1 2001	7	6.125	Terbukti
12	Q2 2001	6	6.75	Terbukti
13	Q3 2001	6	6.625	Terbukti
14	Q4 2001	6	6	Terbukti
15	Q1 2002	6	7	Terbukti
16	Q2 2002	6	7	Terbukti
17	Q3 2002	6	6.75	Terbukti

18	Q4 2002	6	6.625	Terbukti
19	Q1 2003	6	6.375	Terbukti

Selanjutnya tabel tersebut dapat ditransformasikan menjadi grafik berikut:



Secara umum tabel diatas berhasil membuktikan adanya pengaruh faktor kematangan konflik dan menurunnya intensitas konflik di RDK. Hal itu disebabkan dapat ditemukannya hubungan yang bertolakbelakang antara intensitas dan kematangan konflik dimana pada saat intensitas konflik mengalami eskalasi yang signifikan pada titik Q3-1999 sampai Q4-1999, kematangan konflik justru berada dalam posisi yang sangat minimal. Sebaliknya, ketika terjadi penurunan stabil terhadap intensitas konflik selama periode Q4-2000 sampai Q4-2002 maka tingkat kematangan konflik justru mencapai nilai yang relatif lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Adapun anomali hanya terjadi pada dua periode yakni pada saat penandatanganan perjanjian Lusaka (Q3 1999) dan (Q3 2000) dimana kenaikan nilai kematangan konflik justru diiringi dengan kenaikan nilai kegagalan upaya resolusi konflik. Adapun penjelasan alternatif yang dapat penulis tawarkan adalah sebagai berikut: kedua periode anomali tersebut menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi tingginya intensitas konflik selain faktor kematangan konflik yang mempengaruhi keputusan pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan pola umum yang ada.

Secara spesifiknya, untuk menjelaskan anomali yang terjadi pada Q3 1999 penulis memiliki tiga alternatif penjelasan: (a) Namibia yang mengalami MHS menjelang penandatanganan LCA dapat dikategorikan sebagai aktor yang keterlibatannya paling kecil dibanding aktor-aktor lainnya dalam konflik di RDK sehingga MHS yang ia rasakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jalannya konflik; (b) Zimbabwe memang mengalami kerugian secara ekonomi, namun faktor kepemimpinan dictator Robert Mugabe membuat negara tersebut tetap bersikukuh mendukung Kabila senior sampai akhir tahun 2000-an; (c) periode Q3 1999 merupakan masa dimana baik pasukan pemerintah maupun pemberontak yang juga diwarnai dengan bergabungnya berbagai aktor *non state* dalam konflik Kongo seperti kelompok AliR, Mayi-Mayi dan LRA.

Anomali yang terjadi menjelang Q3 2000 sendiri dapat dijelaskan melalui dua faktor: (a) pada periode tersebut pasukan pemerintah melakukan serangan balik besar-besaran ke timur terutama untuk merebut Ikela dan mempertahankan Pweto dari Rwanda dan RCD dan juga ke utara untuk merebut provinsi Equateur dari MLC dan Uganda, hal ini dilakukan oleh Kabila senior kendati Zimbabwe dan Angola sudah menunjukkan kelelahannya dalam kampanye militer yang mengalami kebuntuan tersebut; (b) periode tersebut juga ditandai dengan konflik skala besar antara AliR (gabungan mantan tentara Rwanda dan milisi interahamwe) dan RCD yang dibantu oleh Rwanda yang memperluas medan



pertempuran dengan melakukan berbagai serangan di dalam wilayah kekuasaan RCD dan Rwanda.

#### **4.2. Analisis Hubungan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kematangan Konflik Terkait Dengan Faktor-faktor yang Menyebabkan Kegagalan Implementasi Perjanjian Lusaka**

Kemudian pada bagian ini penulis akan mengemukakan tiga analisis mengenai hubungan kegagalan implementasi LCA dengan melihat faktor-faktor ketidakmatangan konflik dengan menggunakan grafik diatas sebagai alat bantu analisis, yakni: (a) ketidakmunculan MHS yang menyulitkan upaya melakukan *conflict containment*; (b) kegagalan mendorong redefinisi kepentingan pihak-pihak yang bertikai yang menyebabkan lemahnya upaya *conflict transformation*; dan (c) lemahnya dukungan pihak-pihak yang bertikai terhadap instrument dan proses perdamaian yang terjadi sehingga menghambat upaya *conflict settlement* di RDK.

##### **4.2.1. Ketidakmunculan MHS Pada Penandatanganan LCA dan Pengaruhnya Terhadap Kesulitan Melakukan *Conflict Containment*.**

*Pertama*, kegagalan perjanjian Lusaka sendiri dalam menurunkan intensitas konflik dan sebagai upaya lebih luas menuju resolusi konflik dapat dijelaskan dengan melihat LCA sebagai perjanjian yang dipaksakan terhadap pihak-pihak yang bertikai melalui tekanan internasional yang kuat dan bukan lahir berdasarkan inisiatif pihak yang bertikai.<sup>175</sup> Dalam grafik diatas terlihat bahwa bukan saja konflik pada periode Q3-1999 sedang mengalami eskalasi tetapi juga menunjukkan minimalnya tingkat kematangan konflik yang muncul, Situasi ini tentunya tidak dapat diharapkan akan mampu menciptakan persetujuan damai yang akan berlangsung secara berkesinambungan karena bahkan ketentuan

---

<sup>175</sup> Thomas Turner, *Op.cit.*, hlm. 7.

pertama dan yang utama dari perjanjian ini yakni kesepakatan gencatan senjata justru menjadi hal yang dilanggar oleh seluruh pihak yang menandatangani hanya beberapa hari setelah perjanjian tersebut diformalisasi.

Adapun hal tersebut tidak terjadi pada penandatanganan *Kampala disengagement plan* yang terjadi pada Q4-2000 yang merupakan titik jenuh konflik bagi kebanyakan pihak yang bertikai. Hasilnya, berbeda dengan janji kosong pada saat LCA baik Uganda, Zimbabwe, Angola maupun Namibia terbukti menepati janjinya mengurangi keterlibatannya di RDK dengan menarik sejumlah personil militer aktif-nya masing-masing. Penulis melihat belum perbedaan mendasar dari upaya perdamaian menjelang *Kampala disengagement plan* maupun ICD berbeda dibandingkan penandatanganan LCA dikarenakan pada kedua upaya tersebut sudah timbul *Mutually Hurting Stalemate* bagi pihak-pihak yang bertikai. Hal ini disebabkan kerugian melanjutkan konflik Kongo adalah alasan terkuat ketiga negara aliansi Kabila membatasi dirinya dari konflik di Kongo menjelang akhir tahun 2001. MHS juga telah dibuktikan pada pembahasan bab III menjadi alasan berkurangnya dukungan Rwanda dan Uganda pada kelompok pemberontakan 'asuhan' masing-masing yang pada akhirnya membuka jalan bagi persetujuan Pretoria II.

Kenapa *Mutually Hurting Stalemate* dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan suatu negara sehingga menjadi condong untuk menghentikan konflik dan memulai perdamaian? Ada dua jawaban terhadap pertanyaan ini. *Pertama*, aktor negara bersifat rasional dalam mempertimbangkan langkah dan keputusan politiknya. Keterlibatan aktor negara dalam sebuah konflik didasari oleh kalkulasi keterlibatannya akan menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Menguatnya tekanan internasional dan ancaman dari berbagai negara untuk mencabut bantuan militer dan ekonomi bagi Rwanda apabila terus melibatkan diri di konflik Kongo lebih merugikan dibandingkan keuntungan pengerukan sumber daya alam Kongo maka ia pun menarik diri dari pertikaian yang terjadi. *Kedua*,

khususnya bagi negara-negara Afrika yang notabene-nya merupakan negara miskin atau negara berkembang yang memiliki sumber daya terbatas, keterlibatan dirinya dalam sebuah konflik yang tidak menguntungkan secara politik ataupun ekonomi adalah sebuah tindakan bunuh diri. Berbeda dengan Uganda dan Rwanda yang berhasil mengeruk habis-habisan sumber daya alam Kongo, Zimbabwe gagal menciptakan keuntungan ekonomi dari konsesi penambangan yang ia terima dari Kabila sehingga perang yang terjadi justru membuatnya ditekan oleh konstituen domestik dan masyarakat internasional.

Secara umum kegagalan perjanjian Lusaka mendorong terciptanya MHS bagi pihak-pihak yang bertikai disebabkan tiga hal: (a) LCA gagal menciptakan *sanction mechanism* untuk memberlakukan *enforcement* terhadap pihak-pihak penandatanganan LCA sehingga banyak pihak tetap melakukan pelanggaran dan melanjutkan konflik yang ada dikarenakan hal tersebut tidak begitu merugikan bagi mereka; (b) Tidak berfungsinya komite JMC dan minimalnya komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai meniadakan interaksi positif untuk menemukan alternatif lain daripada melanjutkan konflik yang ada; (c) minimnya kultur demokrasi dan akuntabilitas public memungkinkan konflik untuk berlangsung lebih lama bagi beberapa negara walaupun keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip strategis kepentingan nasional tersebut, seperti Robert Mugabe yang dapat terus mempertahankan keberadaan Zimbabwe di RDK meskipun mengalami kerugian yang besar sekali.

Kemudian, kendatipun LCA merupakan produk asli Afrika, sikap dunia internasional terutama negara-negara barat terhadap perkembangan konflik di Kongo yang cenderung pasif tidak membantu memperbaiki situasi yang ada. Periode 2002 yang merupakan fase munculnya MHS bagi pasukan pemberontak dan negara sponsrnya turut dipengaruhi oleh menguatnya tekanan internasional terutama dikeluarkannya ancaman pembatalan hutang dan bantuan oleh AS terhadap Uganda dan Rwanda. Penulis melihat jendela kesempatan

tersebut juga bias diciptakan pada fase penandatanganan LCA untuk mendorong MHS agar tercipta lebih awal dari seharusnya.

#### **4.2.2. Kegagalan yang Mendorong Redefinisi Konflik Penghambat Upaya *Conflict Transformation* di RDK**

*Kedua*, kehancuran perjanjian gencatan senjata Lusaka dipengaruhi oleh tidak adanya perubahan dasar kepentingan yang mendasari strategi politik pihak-pihak yang bertikai di RDK. Satu tahun setelah penandatanganan RDK, pihak pemberontak maupun pemerintah sama-sama mengandalkan solusi militer untuk mendapatkan lebih banyak wilayah di Kongo dan mendesak lawannya. Kampanye militer yang awalnya diarahkan untuk menghancurkan pemerintah dalam strategi *blitzkrieg* berubah menjadi upaya menghancurkan dukungan finansial pemerintah dengan menyerang berbagai kota penghasil kekayaan alam di Kongo seperti Lumumbashi dan Mbuji Mayi. Hal inilah yang menyebabkan konflik di RDK meluas bukan hanya dalam skala kekerasan tetapi juga dalam cakupan geografisnya. Sayangnya, seiring perkembangan konflik yang terjadi, pertimbangan ekonomis menjadi dominan dalam pengambilan keputusan pihak-pihak yang bertikai. Baik pasukan pemberontak dan koalisi pemerintah kemudian bersaing untuk menguasai daerah-daerah kaya mineral dan kekayaan alam lainnya untuk keuntungan pribadi mereka. Alhasil, Balkanisasi dan berbagai penjarahan terjadi pada periode konflik RDK paska Lusaka yang semakin mempersulit *orderly withdrawal* yang terus mengalami penundaan sampai pertengahan tahun 2001 .

Selain itu, kegagalan melakukan redefinisi kepentingan tersebut terutama terhambat oleh faktor pribadi presiden Laurent Desire Kabila. Hal ini ketika kematiannya pada awal tahun 2001 kemudian mendorong kemajuan dari upaya perdamaian di Kongo. Sebelum kematiannya, kedua belah pihak yang bertikai di Kongo memiliki kepentingan yang sama-sama menjadi harga mati perjuangannya:

kelompok pemberontak menginginkan Kabila disingkirkan dari puncak kekuasaan RDK sementara pasukan aliansi pemerintah yang selalu didorong oleh Kabila menginginkan dibasminya gerakan pemberontak dari wilayah RDK. Pihak pemberontak melihat Kabila sebagai figur yang sangat korup dan merupakan ancaman bagi stabilitas kawasan sehingga sulit untuk diajak berkompromi. Kabila yang keras kepala juga terus membuat pasukan aliansi pemerintah tidak punya pilihan lain selain terus menerus terlibat konflik yang semakin merugikan mereka. Kabila juga mendorong bantuan masyarakat internasional yang semakin menjauhi Kongo dengan menolak bekerjasama dengan ICD dan MONUC.

Sebab inilah yang membuat banyak pihak menganggap kematian Kabila merupakan berkah bagi Kongo karena kematiannya membuka jalan bagi pemerintahan RDK yang lebih 'moderat' dan akomodatif terhadap upaya perdamaian, memungkinkan kelompok pemberontak untuk mereduksi kepentingannya dan memberi nyawa bagi ICD dan MONUC yang segera mendapatkan kesempatan untuk diimplementasikan dengan lebih substansial di RDK. Beberapa pihak bahkan sempat mengaitkan kematian Kabila dengan ketidakpuasan sekutunya terhadap pendekatan Kabila terhadap upaya penyelesaian konflik Kongo yang kemudian berubah menjadi keputusan untuk menyingkirkannya.

#### **4.2.3. Keterhambatan Dalam Mendorong Terciptanya Penerimaan dan Dukungan Terhadap Instrumen dan Proses Perdamaian di RDK**

*Ketiga*, kegagalan dalam mengimplementasikan berbagai mekanisme perdamaian terkait erat dengan munculnya berbagai kecurigaan dan rivalitas diantara pihak-pihak yang bertikai. Penerimaan terhadap proses perdamaian dan mekanisme yang dibutuhkannya merupakan prasyarat implementasi agar sebuah perjanjian damai dapat berjalan dengan sukses. Kegagalan untuk membuat pihak-pihak tetap antusias dan berpartisipasi dalam sebuah proses perdamaian akan

membuat persetujuan damai tidak lebih secarik kertas saat pihak-pihak yang bertikai kembali melakukan kekerasan dalam meraih kepentingannya.

Kabila senior berhasil menunda ICD dan MONUC karena rasa tidak puasnya terhadap perjanjian Lusaka yang menurutnya terlalu mendiskreditkan pemerintah dan memberikan Rwanda dan Uganda terlalu banyak keleluasaan untuk mencampuri urusan dalam negeri RDK. Rasa tidak percaya Jean Pierre Bemba terhadap pemerintahan Kabila senior juga membuatnya tidak mematuhi gencatan senjata dan kemudian menundanya untuk terlibat dalam dialog ICD walaupun pada saat itu Joseph Kabila telah menggantikan ayahnya. Bemba dan MLC terus mempertanyakan kredibilitas pergantian rezim pemerintah dan dugaan kooptasi kelompok oposisi sipil yang diundang oleh pemerintah. Rasa saling tidak percaya dan curiga inilah yang menghambat perkembangan upaya ICD sebagai bentuk proses *conflict settlement* di RDK dari mulai penandatanganan LCA sampai awal tahun 2001.

Pada titik ini, kematian Kabila senior kembali menjadi *turning point* penting dalam sejarah konflik Kongo dimana hal tersebut menghancurkan retorika pasukan pemberontak untuk bersikukuh mengupayakan solusi militer di konflik Kongo ketika pengganti Kabila senior menunjukkan dukungan dan komitmen yang lebih kuat terhadap proses perdamaian di RDK.

Selain faktor tersebut, kesulitan untuk menggalang dukungan terhadap proses perdamaian disebabkan munculnya perpecahan antara Rwanda dan Uganda yang kemudian mempersulit pelaksanaan berbagai dialog ICD pada periode akhir tahun 2001 sampai awal tahun 2002. Penyebab perpecahan diantara keduanya muncul dikarenakan beberapa faktor, yakni:<sup>176</sup> (a) timbulnya rasa iri dalam kompetisi antar elit di dua negara, terutama dari kalangan militer Uganda terhadap

---

<sup>176</sup> International Crisis Group, *Uganda and Rwanda: Friends or Enemies*, Edisi 4 Maret 2000, hlm. 16 - 18 .

kesuksesan Rwanda yang memimpun upaya koalisis regional dalam menggulingkan Mobutu Sese Seko; (b) munculnya persaingan yang kuat dari Rwanda dan Uganda dalam mempengaruhi Kongo paska konflik yang berujung pada kekecewaan Uganda dimana kandidat pengganti mereka, Kiasu Ngandu (yang dipersiapkan untuk menjadi Museveni dari Kongo) tewas dalam sebuah sergapan milisi Mai-Mai dimana para petinggi Uganda melihat indikasi kuat keterlibatan Rwanda dalam insiden tersebut; dan (c) menguatnya konflik kepentingan ekonomi yang dimulai dengan semakin berkurangnya ketergantungan Rwanda terhadap Uganda yang disebabkan pertumbuhan ekonomi Rwanda yang semakin *self-sufficient* dimana sebelumnya Rwanda cukup bergantung pada Uganda dalam penyediaan barang-barang kebutuhan dasar dan berujung pada meningkatnya ketegangan diantara keduanya karena diakibatkan persaingan untuk menguasai daerah kaya mineral di Kisangani. Lebih kurang terjadi tiga kali pertikaian langsung antara Rwanda dan Uganda di Kisangani yang menjerumuskan Kongo pada situasi perang dalam perang. Perpecahan diantara keduanya beralih menjadi pertunjukan rivalitas yang terjadi bukan hanya di medan pertempuran namun juga meja diplomasi kelompok pemberontak dukungannya. Setiap negosiasi yang berpotensi memberikan keuntungan bagi MLC akan diprotes keras oleh RCD-Goma termasuk ketika pemerintah RDK dan Kabila menyetujui kompromi pembagian kekuasaan pada akhir sesi ICD di Sun City.

Hilangnya tekanan Uganda dan Rwanda terhadap memungkinkan RCD-Goma dan MLC untuk bernegosiasi dengan lebih fleksibel dan terbuka. Akhirnya didasari perundingan yang tidak dipaksakan tersebut barulah lahir kesepakatan damai dengan *survivability rate* yang lebih baik dari perjanjian Lusaka. Bersamaan dengan meredanya rivalitas kepentingan antara pihak pemberontak dan pemerintah dan antara pihak pemberontak sendiri, perjanjian Pretoria II kemudian mendapatkan dukungan penuh dari pihak-pihak bertikai pada

implementasinya. Hal inilah yang membedakannya dengan LCA dimana perjanjian ini langsung dapat diimplementasikan dengan baik pada awal tahun 2003 melalui pembentukan pemerintah transisi di RDK.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Perang Kongo kedua merupakan konflik multi aktor dan multi dimensional yang menyengsarakan penduduk negeri tersebut dalam tragedi kemanusiaan terbesar semenjak perang dunia kedua. Perang Kongo kedua merupakan hasil dari augmentasi permasalahan yang terjadi beberapa dekade sebelumnya yang bermula dari kolonialisme Belgia sampai pemerintahan diktator Mobutu Sese Seko. Masing-masing periode tersebut berkontribusi terhadap berbagai permasalahan di Kongo seperti: tradisi eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam yang melimpah secara korup dan sentralistik, ketegangan antar etnis, budaya despotisme dalam politik dan budaya impunitas terhadap berbagai pelanggaran HAM di RDK.

Adapun perang Kongo kedua sendiri lahir akibat kombinasi dari *spillover* konflik sipil Rwanda dan gerakan pemberontakan internal di Kongo yang muncul akibat ketidakpuasan secara meluas terhadap pemerintahan diktator Mobutu Sese Seko yang kehilangan pamornya seiring berakhirnya perang dingin. Pemerintahan baru yang merupakan hasil gerakan pemberontakan pertama yang ‘dipimpin’ oleh Kabila senior hanya berumur kurang dari dua tahun sebelum akhirnya menghadapi pemberontakan kedua yang dimotori Rwanda dan Uganda, mantan sekutunya. Ketika beberapa Negara Afrika lainnya memenuhi panggilan Kabila senior untuk membantunya terjadilah internasionalisasi konflik terhadap perang sipil yang paling besar di Afrika dengan total sembilan negara dan hampir selusin kelompok bersenjata non-negara terlibat aktif didalamnya.



Konflik tersebut seharusnya berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata Lusaka (*LCA*) pada Agustus 1999 yang merupakan perjanjian perdamaian pertama yang murni dihasilkan oleh para negotiator Afrika. Perjanjian tersebut mengupayakan tiga hal, yakni: (a) terciptanya gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai; (b) digelarnya operasi perdamaian untuk melakukan pelucutan senjata dan pengamanan wilayah RDK; dan (c) dilangsungkannya dialog nasional Kongo (*ICD*) untuk melakukan rekonsiliasi nasional dan pembentukan dispensasi politik baru di Kongo paska konflik.

Namun upaya implementasi perjanjian damai tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan implementasi perjanjian Lusaka sebagai sebuah upaya resolusi konflik ini dapat dilihat dari tidak tercapainya 3 ketentuan utama yang menjadi tujuan dasar perjanjian Lusaka, yakni: (a) gagalnya diberlakukan gencatan senjata untuk meredakan kekerasan; (b) macetnya upaya dialog nasional (*ICD*) yang seharusnya merekonsiliasi pihak-pihak yang bertikai di Kongo; dan (c) terhambatnya upaya pembentukan komisi militer bersama (*JMC*) dan *PBB* untuk mentransformasi penyebab-penyebab konflik struktural di RDK. Alhasil perkembangan positif dari konflik Kongo baru bisa terlihat justru hampir 3 tahun setelah penandatanganan perjanjian Lusaka sendiri yang ditandai dengan digantikannya perjanjian Lusaka oleh berbagai beberapa kesepakatan damai lain.

Skripsi ini menggunakan faktor kematangan konflik dalam meneliti kegagalan implementasi perjanjian Lusaka. Penelitian ini berusaha membuktikan hubungan terbalik antara kegagalan implementasi *LCA* yang digunakan sebagai variabel terikat dengan ketidakmatangan konflik yang digunakan sebagai variabel bebas dalam menganalisa konflik RDK pada periode 1999 - 2003. Hubungan tersebut terbentuk dengan adanya korelasi positif kesiapan perdamaian dengan tingkat kematangan konflik yang ada. Tiga faktor yang mempengaruhi kematangan konflik yang dibahas dalam tulisan ini, meliputi: (a) terciptanya *mutually hurting stalemate* (*MHS*) mempengaruhi daya tahan pihak yang bertikai

untuk tetap berkonflik; (b) terjadinya redefinisi kepentingan menuju konvergensi sikap yang menyambut upaya perdamaian merupakan medium moderasi perbedaan pihak-pihak untuk berdamai; dan terakhir (c) munculnya penerimaan (*consent*) dan dukungan dari pihak yang bertikai terhadap LCA menjamin adanya keberlangsungan implementasi perdamaian yang optimal.

Ada empat temuan yang dapat ditarik dari penelitian ini terkait dengan empat hipotesayang tercantum pada bab I skripsi ini.

*Pertama*, dengan mengacu pada grafik model interaksi dua konsep kematangan konflik dan intensitas konflik berhasil ditemukan adanya hubungan bertolakbelakang diantara kedua variabel tersebut. Penelitian ini berhasil membuktikan nilai kematangan konflik yang rendah akan mengakibatkan tingginya nilai kegagalan upaya resolusi konflik di RDK dan begitu juga sebaliknya. Pada hampir semua quartal dalam penelitian ini ditemukan konsistensi hubungan terbalik antara kedua variabel tersebut walaupun pada Q3 1999 dan Q3 2000 terjadi deviasi dari pola umum dalam interaksi dua variabel dimana peningkatan nilai kematangan konflik yang kecil pada kedua periode itu menghasilkan peningkatan nilai kegagalan upaya resolusi konflik.

*Kedua*, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kegagalan pengimplementasian klausul gencatan senjata di Kongo terhambat dikarenakan minimalnya tingkat MHS (*Mutually Hurting Stalemate*) yang dirasakan olehberbagai yang bertikai. Kendati dalam grafik terdapat kenaikan substansial pada faktor kematangan konflik pada periode penandatanganan Lusaka (Q3 1999), hal itu tidak mampu menunjukkan munculnya MHS secara merata bagi segenap pihak yang bertikai di Kono, terutama bagi RDK, Rwanda dan Uganda yang masih terus menunjukkan tekad mereka untuk menggunakan solusi militer kendati penandatanganan LCA telah dilakukan. Adapun kemajuan proses perdamaian paska Lusaka dapat diatributkan pada dilangsungkannya proses-

proses perdamaian tersebut dalam situasi konflik yang mengalami penurunan ketegangan dan dalam tingkat kematangan konflik yang relatif tinggi sehingga memungkinkan berbagai pihak untuk menarik diri atau membatasi keterlibatannya di RDK terutama dimulai sejak awal tahun 2001.

*Ketiga*, faktor minimalnya redefinisi kepentingan dari pihak-pihak yang bertikai pada penandatanganan LCA juga terbukti berimbas pada sulitnya upaya transformasi konflik dilakukan. Upaya penciptaan pasukan *peacekeeping* JMC dan MONUC terhambat oleh lemahnya komitmen pihak-pihak penandatanganan LCA untuk berkontribusi secara aktif maupun dalam mendukung jalannya program pelucutan senjata pihak-pihak yang bertikai. Hasil temuan skripsi ini menunjukkan peran Kabila yang sangat besar dalam menciptakan hambatan terhadap redefinisi kepentingan pihak-pihak yang bertikai karena ia bukan saja terus mendorong pasukan sekutunya untuk berupaya menyelesaikan konflik Kongo lewat kemenangan militer mutlak akan tetapi ia juga berulang kali menghambat kinerja MONUC, JMC dan mengumumkan pembatalan sepihak perjanjian Lusaka oleh pemerintahannya.

*Keempat*, minimnya penciptaan rasa penerimaan dan dukungan dari pihak-pihak yang bertikai menghambat upaya *conflict settlement* di RDK. Implementasi klausul dialog nasional (ICD) yang merupakan bagian sentral di perjanjian Lusaka terhambat pelaksanaannya selama lebih dari setahun dikarenakan penolakan presiden Kabila senior terhadap fasilitator ICD dan keenggannya untuk duduk di meja perundingan dengan posisi setara bersama kelompok pemberontak. Adapun proses ICD sendiri gagal mencapai target utamanya dikarenakan menguatnya rivalitas internal didalam kelompok pemberontak, terutama dari kubu Uganda melawan Rwanda ditambah manuver-manuver politik oleh kedua Kabila yang berusaha mempertahankan kekuasaannya sehingga menghasilkan berbagai kebuntuan dalam proses negosiasi. Dalam hal ini karakter kepemimpinan Kabila senior bukan saja membuatnya dibenci oleh pasukan pemberontak yang kemudian

menilai hengkangnya Kabila senior dari kursi kekuasaan merupakan harga mati perjuangan tetapi juga menambah unsur ketidakpercayaan bagi pihak-pihak pemberontak yang turut berkontribusi kepada kegagalan pelaksanaan mandat LCA. Kematiannya dan strategi politik baru Kabila junior terbukti mampu membuat situasi yang lebih kondusif bagi lahirnya *Pretoria Accord II* yang lebih dapat diterima dan diimplementasikan oleh segenap pihak yang bertikai dibandingkan LCA.

Ada beberapa masukan bagi penelitian konflik RDK kedepannya. *Pertama*, penelitian ini dapat mejadi dasar penelitian kualitatif bilamana pembaca ingin menulis lebih lanjut mengenai proses perdamaian di RDK dengan mengkaji anomali interaksi antara variabel kematangan konflik dan kegagalan implementasi perjanjian Lusaka yang terjadi pada quartal ketiga tahun 1999 dan quartal ketiga tahun 2000 yang masing-masing dapat dikategorikan sebagai *turning point* tersendiri bagi konflik di RDK. *Kedua*, penelitian yang penulis lakukan tidak membahas mengenai kontribusi perjanjian LCA sendiri terhadap keseluruhan proses perdamaian RDK sehingga hal tersebut dapat menjadi opsi penelitian dengan fokus pengkajian konstruktivisme liberal yang berusaha melihat proses perdamaian sebagai serangkaian balok yang saling menyusun. *Ketiga*, penelitian ini dilakukan dengan sederhana dan hanya mengobservasi proses implementasi perjanjian di masa lalu. Kedepannya, akan sangat baik bila ada penelitian untuk yang dapat dilakukan dengan cakupan lebih luas dan studi kasus lebih banyak untuk menguji generalisasi kemampuan variabel kematangan konflik mempengaruhi implementasi perjanjian damai secara lebih umum dengan mengkaji berbagai upaya perdamaian secara bersamaan. Terakhir, hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan meneliti berbagai upaya yang dapat mempercepat timbulnya kematangan konflik (*conflict ripeness*) yang sangat relevan terhadap kajian perdamaian dewasa ini untuk menemukan strategisasi optimal dalam menghadapi konflik yang berkarakter mirip dengan konflik di RDK.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Burton, John W. *Conflict: Resolution and Prevention*, 1999, (London: Macmillan)

Clark, John F. eds., *The African Stakes of Congo War*, 2002. (New York: Palgrave Macmillan)

Cresswell, John W. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches; Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, 2<sup>nd</sup> ed., 2003. (Jakarta: KIK Press)

Crocker, Chester A. et al., *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflicts*, 2001 (Washington: United States Institute of Peace)

Durch, William J. ed., *Twenty First Century Peace Operations*, 2006 (Washington, USA: United States Institute of Peace)

Hampson, Fen Osler, *Nurturing Peace: Why Peace Settlements Succeed or Fail*, 1996, (Washington: United States Institute of Peace)

Haskin, Jeanne M. *the Tragic State of Congo: From Decolonization to Dictatorship*, 2000 (New York: Algora Publishing)

Haus, Charles *International Conflict Resolution*, 2001. (Great Britain: Biddles Ltd, Guildford & King's Lynn)

Irawan, Dr. Prasetya M.Sc, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 2006. (Depok: Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI)

Naidoo, Sagaren *The Inter-Congolese Dialogue: Negotiations for a Democratic State or a Formalization of a New Scramble*, 2002. (Johannesburg, Afrika Selatan: Friedrich Erbert Stiftung)

Ngolet, Francois *Crisis in Rwanda: The Rise and Fall of Laurent Kabila*, 2011 (AS: Palgrave Macmillan Ltd.)

Ramsbotham, Oliver, Hugh Miall & Tom Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution*, 2000 (Great Britain: MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall)

Rogier, Emeric *The Labyrinth Path to Peace in the Democratic Republic of Congo*, 2009. Institute for Security Studies.

Solomon, Hussein, *Conflict in the DRC: A Critical Assessment onf the Lusaka Ceasefire Agreement*, 2004. (Afrika Selatan: South African Institute of International Affairs)

The International Relations Class 4701, *Beyond The Heart of Darkness: A Diagnosis of a Failed State and Recommendations for Reform in the Democratic*

*Republic of Congo*, 2011(Canada: The University of Western Ontario)

Turner, Thomas *Congo Wars: Conflicts, Myth and Reality*, 2007 (London: Zed Books)

Wallensteen, Peter, *Understanding Conflict Resolution: War, Peace, and The Global System*, 2002. (London: Sage Publication)

### **Jurnal**

Baxter, James *The Business of War*, *The World Today*, Vol. 57, No. 2 (Feb., 2001)

Daley, Patricia *Challenges to Peace: Conflict Resolution in the Great Lakes Region of Africa*, dalam jurnal *Third World Quarterly*, Vol. 27, No. 2 (2006)

Kristionsis, Dito & Malcom D. Evan, *Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda): Provisional Measures*, *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 50, No. 3 (Jul., 2001)

Ksiangani, Emmanuel “*Conflict in the Democratic Republic of Kongo: political and Profut Interest*”, diambil dari *Jurnal Accord, edition 2000*

Olson, Ola & Heather Congdon Pors, *Congo: The Price of Predation*, *Journal of Peace Research*, vol. 41, no. 3, 2004

Smis, Stevan dan Wamu Oyatambe, *Political Emergencies, the International Community & the Congo Conflict*, dalam *Review of African Political Economy*, Vol. 29, No. 93/94, *State Failure in the Congo: Perceptions & Realities (Le Congo entre Crise et Régénération)* diterbitkan oleh Taylor & Francis ltd pada Sep. - Dec., 2002

### **Makalah & Laporan**

Carayannis, Tatiana, “The Challenge of building sustainable peace and the DRC” dalam *Background paper*( Geneva: The centre of humanitarian dialogue, Juli 2009)

Ibrahim Agboola Gambari, *Perspectives on The Current Conflict in Africa: Verifying The Sepcial Nature of Today's African Conflict(Democratic Republic of Congo and Conflicts in Central Africa)*, dalam *The Symposium on Africa* yang diselenggarakan oleh *Japan Institute of International Affairs*, Tokyo 15 – 16 Februari 2001

ICG Democratic of Republic of Kongo Report N. 5, *The agreement on the ceasefire in the Democratic Republic of Congo: An analysis of agreement and the prospect of peace*, 20 Agustus 1999

International Crisis Group, *How Kabila Lost His Way: The Performance of*

*Laurent Desire Kabila Government*, Background Paper ICG DRC Report edisi 21 Mei 1999

ICG Africa Report, *Scramble for the Congo: Anatomy of an ugly war*, International Crisis Group. Agustus 2000,

ICG Africa Report N. 27, *From Kabila to Kabila: Prospect for Peace in The Congo*, 16 Maret 2001.

ICG Africa Report N. 37, *The Inter-Congolese Dialogue*, 16 November 2001,

ICG Africa Report N. 56, *The Kivus: The Forgotten Crucibles of Congo Conflict*, 24 Januari 2003

Laporan Panel Ahli PBB Terhadap Eksploitasi Ilegal Sumber Daya Kongo (*Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo*), diakses dari <http://www.un.org/News/dh/latest/drcongo.htm>

Olson, Felicity, *Beyond Conflict Settlement: Peacebuilding in the Pacific*, Thesis Untuk Program Master of Arts Ilmu Politik Universitas Canterbury tahun 2010.

*Ninth Report of The Secretary-General on MONUC*, S/2001/970, yang dikeluarkan pada 16 Oktober 2001.

### **Majalah & Surat Kabar**

Astill, James, *Congolese Mourn Kabilla as his Allies Consider Next Moves*, The Guardian edisi 22 Januari 2001 diakses dari <http://www.guardian.co.uk/world/2001/jan/22/chrismcgreal.jamesastill?INTCMP=ILCNETTXT3487>

Cauvin, Henri E. *Rwanda and Congo Sign Accord to End War*, The New York Times edisi 31 Juli 2002, diakses dari <http://www.nytimes.com/2002/07/31/world/rwanda-and-congo-sign-accord-to-end-war.html?scp=10&sq=Congo+War&st=nyt>

Fisher, Ian, *Chaos in Congo: A Primer*, The New York Times edisi 6 Februari 2000, diakses dari <http://www.nytimes.com/2000/02/06/world/chaos-congo-primer-many-armies-ravage-rich-land-first-world-war-africa.html?scp=3&sq=Congo+War&st=nyt>

Fisher, Ian, *Congo's War Triumphs Over Peace Accord*, The New York Times edisi 18 September 2000, diakses dari <http://www.nytimes.com/2000/09/18/world/congo-s-war-triumphs-over-peace-accord.html?scp=9&sq=Congo%20War&st=nyt&pagewanted=1>

Fisher, Ian, *Rwanda's Huge Stake in Congo War*, The New York Times edisi 27 Desember 1998, diakses dari <http://www.nytimes.com/1998/12/27/world/rwanda-s-huge-stake-in-congo-swar.html?scp=6&sq=Congo+War&st=nyt>

French, Howard W., *As Zaire Splits History Repeats Itself*, dipublikasikan oleh New York Times pada 11 November 1996. Diakses dari <http://www.nytimes.com/1996/11/11/world/as-zaire-splits-history-repeats-itself.html?ref=congothedemocraticrepublicof>

Gough, David *Ethnic War Deepens in Congo*, The Guardian edisi minggu 27 Februari 2000, diakses dari <http://www.guardian.co.uk/world/2000/feb/27/theobserver>

Jones, Lucy *Families Flee Anarchy of Kabila's Congo*, The Guardian edisi 25 Agustus 2000, diakses dari <http://www.guardian.co.uk/world/2000/aug/25/2?INTCMP=SRCH>

Kettle, Martin *President 'Ordered Murde' of Congo Leader*, The Guardian edisi 10 Agustus 2000, diakses dari <http://www.guardian.co.uk/world/2000/aug/10/martinkettle?INTCMP=SRCH>

Lacey, Marc *Peace Talk To End War in Congo Finally Begun*, The New York Times edisi 17 Oktober 2001, diakses dari <http://www.nytimes.com/2001/10/17/world/peace-talks-to-end-war-in-congo-finally-begin.html?scp=17&sq=Congo+War&st=nyt>

Marc Lacey, *War is Still A Way of Life for Congolese Rebels*, The New York Times, diakses dari <http://www.nytimes.com/2002/11/21/world/war-is-still-a-way-of-life-for-congo-rebels.html?scp=14&sq=Congo%20War&st=nyt&pagewanted=1>

McGreal, Chris, *Congo's Saviour Brought Only Bloodshed*, The Guardian edisi 17 Januari 2001, diakses dari <http://www.guardian.co.uk/world/2001/jan/17/chrimcgreall>

McNeil, Donald G. Jr., *Tangled War in Congo Now Snares Namibia*, The New York Times edisi 6 Agustus 1999, diakses dari <http://www.nytimes.com/1999/08/06/world/tangled-war-in-congo-now-snares-namibians.html?scp=7&sq=Congo+War&st=nyt>

Meldrum, Andrew *Britain Accused of Hypocrisy as War Cripples Economy*, The Guardian edisi 21 Januari 2000 diakses dari <http://www.guardian.co.uk/world/2000/jan/21/zimbabwe.ethicalforeignpolicy?INTCMP=SRCH>

Swarms, Rachel L. *Africa: Zimbabwe, A pledge to Withdraw From Congo*,



The New York Times edisi 14 Agustus 2001, diakses dari <http://www.nytimes.com/2002/08/14/world/world-briefing-africa-zimbabwe-a-pledge-to-withdraw-from-congo.html>

Swarns,, Rachel L. *Congo and Its Rebels Sign Accord to End War*, New York Times edisi 18 Desember 2002, diakses dari <http://www.nytimes.com/2002/12/18/world/congo-and-itsrebels-sign-accord-to-end-war.html?scp=1&sq=Congo+War&st=nyt>

Tisdall, Simon *Taking The Congo Test*, The Guardian edisi Kamis 2 Agustus 2001 diakses dari <http://www.guardian.co.uk/world/2001/aug/02/worlddispatch.congo?INTCMP=SRCH>

\_\_\_, BBC Africa News, *Savimbi Died With A Gun in Hand*, BBC News edisi 25 Februari 2002, diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1839252.stm>

\_\_\_, BBC News, *Rwanda Completes DRC Pull-Out*, BBC News Agency pada 5 Oktober 2002 diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2302125.stm>

\_\_\_, BBC News Africa, *Q&A: Democratic Republic of Congo Conflict*, diakses dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11108589>

\_\_\_, *Remnants of Angola's Army Withdraw*, Chicago Tribune edisi 1 Februari 2002, diakses dari [http://articles.chicagotribune.com/2002-02-01/news/0202010317\\_1\\_congo-angolan-troops-namibia](http://articles.chicagotribune.com/2002-02-01/news/0202010317_1_congo-angolan-troops-namibia)

### **Internet**

Bureau of African Affairs, *Background Note of Democratic Republic of Congo*, US Department of State diakses dari <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2823.htm>

CIA World Fact Book, *Congo, Democratic Republic of*, diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html>

Dinar, Ali B. Ali eds., *DRC Rebels: Anti RCD Rebels Embroiled in Interlinked Wars*, University of Pennsylvania: African Studies Centre, Newsletter diakses dari <http://www.africa.upenn.edu/Newsletters/irinw63099.html>

Gerry, Swart & Hussein Solomon, "A Ciritical Assessment Whether Lusaka Ceasefire Agreement Has Been A Success" dalam *Centre for International Political Studies*. Diakses dari <http://www.cips.up.ac.za/files/pdf/uafspublications/drc%2520saiia%2520report%25202004%2520final%2520copy.pdf>

Koko, Sadiki *The Lusaka Ceasefire Agreement and Stability in the DRC*, (Accord: 2000), diakses dari

[http://www.accord.org.za/downloads/ct/ct\\_2000\\_1.pdf](http://www.accord.org.za/downloads/ct/ct_2000_1.pdf)

International Crisis Group, *Conflict in Congo*, diakses dari <http://www.crisisgroup.org/en/key-issues/conflict-in-congo.aspx>

IRIN News, *In Depth: The Death of Lauren Desire Kabila*, diakses dari <http://www.irinnews.org/indepthmain.aspx?indepthid=57&reportid=72286>

Oullet, Jullian *Procedural Components of Peace Agreements*, The Conflict Resolution Information Source, diakses dari [http://crinfo.beyondintractability.org/essay/procedural\\_peace\\_agree/?nid=1397](http://crinfo.beyondintractability.org/essay/procedural_peace_agree/?nid=1397)

Pennsylvania: African Studies Centre, Newsletter diakses dari <http://www.africa.upenn.edu/Newsletters/irinw63099.html>

Shah, Anup *The Democratic Republic of Congo*, dalam *Global Issues* 21 Agustus 2010, diakses dari <http://www.globalissues.org/article/87/the-democratic-republic-of-congo>

\_\_\_, *Background of the Congo Conflict*, diakses dari <http://www.peacebuildingdata.org/drc/congo-conflict>

\_\_\_, *Congo Civil War*, dalam *GlobalSecurity.org*, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/congo.htm>

\_\_\_, *DRC Joint Military Comission Faces Serious Threat*, Relief Web edisi 17 November 2000, diakses dari <http://reliefweb.int/node/>

\_\_\_, *Great Lakes Region Historical Chronology*, diakses dari <http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.2892715/>

\_\_\_, Perjanjian Lusaka <http://www.iss.co.za/af/profiles/drcongo/cdreader/bin/2lusaka.pdf>

\_\_\_, Yale University, *Belgian Congo*, Yale's Genocide Studies Program diakses dari [http://www.yale.edu/gsp/colonial/belgian\\_congo/index.html](http://www.yale.edu/gsp/colonial/belgian_congo/index.html)

\_\_\_, \_\_\_, [http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/DRC\\_MortalitySurvey2004Final\\_9Dec04.pdf](http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/DRC_MortalitySurvey2004Final_9Dec04.pdf)

## DAFTAR LAMPIRAN

### **Teks Perjanjian Gencatan Senjata Lusaka (LCA 1998 – 2003)**

#### *Article I*

#### *The Cease-Fire*

- The Parties agree to a cease-fire among all their forces in the DRC.
- The cease-fire shall mean:
  - a. the cessation of hostilities between all the belligerent forces in the DRC, as provided for in this Cease-fire Agreement (hereinafter referred to as “the Agreement”)
  - b. the effective cessation of hostilities, military movements and reinforcements, as well as hostile actions, including hostile propaganda;
  - c. a cessation of hostilities within 24 hours of the signing of the Cease-fire agreement;
- The Ceasefire shall entail the cessation of:
  - a. all air, land, and sea attacks as well as all actions of sabotage;
  - b. attempts to occupy new ground positions and the movement of military forces and resources from one area to another, without prior agreement between the parties;
  - c. all acts of violence against the civilian population by respecting and protecting human rights. The acts of violence include summary executions, torture, harassment, detention and execution of civilians based on their ethnic origin; propaganda inciting ethnic and tribal hatred; arming civilians;
  - d. recruitment and use of child soldiers; sexual violence; training and use of terrorists; massacres, downing of civilian aircraft; and bombing the civilian population;
  - e. supplies of ammunition and weaponry and other war-related stores to the field;
  - f. any other actions that may impede the normal evolution of the ceasefire process.

#### *Article II*

#### *Security Concerns*

On the coming into force of this Agreement the Parties commit themselves to immediately address the security concerns of the DRC and her neighbouring countries.

*Article III*  
*Principles of the Agreement*

- The provisions of paragraph 3 (e) do not preclude the supply of food, clothing and medical support for the military forces in the field.
- The cease-fire shall guarantee the free movement of persons and goods throughout the national territory of the Democratic Republic of Congo.
- On the coming into force of the Agreement, the Parties shall release persons detained or taken hostage and shall give them the latitude to relocate to any provinces within the DRC or country where their security will be guaranteed.
- The Parties to the Agreement commit themselves to exchange prisoners of war and release any other persons detained as a result of the war.
- The Parties shall allow immediate and unhindered access to the International Committee of the Red Cross (ICRC) and Red Crescent for the purpose of arranging the release of prisoners of war and other persons detained as a result of the war as well as the recovery of the dead and the treatment of the wounded.
- The Parties shall facilitate humanitarian assistance through the opening up of humanitarian corridors and creation of conditions conducive to the provision of urgent humanitarian assistance to displaced persons, refugees and other affected persons.
- The United Nations Security Council, acting under Chapter VII of the UN Charter and in collaboration with the OAU, shall be requested to constitute, facilitate and deploy an appropriate peacekeeping force in the DRC to ensure implementation of this Agreement; and taking into account the peculiar situation of the DRC, mandate the peacekeeping force to track down all armed groups in the DRC. In this respect, the UN Security Council shall provide the
- requisite mandate for the peace-keeping force.
- The Parties shall constitute a Joint Military Commission (JMC) which shall, together with the UN/OAU Observer group be responsible for executing, immediately after the coming into force of this Agreement, peace-keeping operations until the deployment of the UN peace-keeping force. Its composition and mandate shall be as stipulated in Chapter 7 of Annex 'A' of this Agreement.
- The final withdrawal of all foreign forces from the national territory of the DRC shall be carried out in accordance with the Calendar in Annex B of this Agreement and a withdrawal schedule to be prepared by the UN, the OAU and the JMC.
- The laying of mines of whatever type shall be prohibited.
- There shall be immediate disengagement of forces in the areas where they are in direct contact.

- Nothing in the Agreement shall in any way undermine the sovereignty and territorial integrity of the Democratic Republic of Congo.
- The Parties re-affirm that all ethnic groups and nationalities whose people and territory constituted what became Congo (now DRC) at independence must enjoy equal rights and protection under the law as citizens.
- The Parties to the Agreement shall take all necessary measures aimed at securing the normalization of the situation along the international borders of the Democratic Republic of Congo, including the control of illicit trafficking of arms and the infiltration of armed groups.
- In accordance with the terms of the Agreement and upon conclusion of the Inter-Congolese political negotiations, state administration shall be re-established throughout the national territory of the Democratic Republic of Congo.
- On the coming into force of the Agreement, the Government of the DRC, the armed opposition, namely the RCD and MLC as well as the unarmed opposition shall enter into an open national dialogue. These inter-Congolese political negotiations involving les forces vives shall lead to a new political dispensation and national reconciliation in the DRC. The inter-Congolese political negotiations shall be under the aegis of a neutral facilitator to be agreed upon by the
- Congolese parties. All the Parties commit themselves to supporting this dialogue and shall ensure that the inter-Congolese political negotiations are conducted in accordance with the provisions of Chapter 5 of Annex 'A'.
- In accordance with the terms of the Agreement and upon the conclusion of the national dialogue, there shall be a mechanism for the formation of a national, restructured and integrated army, including the forces of the Congolese Parties who are signatories to this Agreement, on the basis of negotiations between the Government of the Democratic Republic of Congo and the RCD and MLC.
- The Parties affirm the need to address the security concerns of the DRC and her neighbouring countries.
- There shall be a mechanism for disarming militias and armed groups, including the genocidal forces. In this context, all Parties commit themselves to the process of locating, identifying, disarming and assembling all members of armed groups in the DRC. Countries of origin of members of the armed groups, commit themselves to taking all the necessary measures to facilitate their repatriation.
- Such measures may include the granting of amnesty in countries where such a measure has been deemed beneficial. It shall, however, not apply in the case of the suspects of the crime of genocide. The Parties assume full responsibility of ensuring that armed groups operating alongside their

troops or on the territory under their control, comply with the processes leading to the dismantling of those groups in particular.

- The Parties shall ensure the implementation of the terms of the Agreement and its Annexes 'A' and 'B' which form an integral part of the Agreement.
- The definitions of common terms used are at Annex 'C'.
- The Agreement shall take effect 24 hours after signature.
- The Agreement may be amended by agreement of the Parties and any such amendment shall be in writing and shall be signed by them in the same way as the Agreement.
- In Witness Whereof the duly authorized representatives of the Parties have signed the Agreement in the English, French and Portuguese languages, all texts being equally authentic.

Done; at Lusaka (Zambia) on This \_\_\_\_ Day of \_\_\_\_\_

For the Republic of Angola

For the Democratic Republic of Congo

For the Republic of Namibia;

For the Republic of Rwanda;

For the Republic of Uganda;

For the Republic of Zimbabwe;

For the Congolese Rally for Democracy (RCD);

For the Movement For the Liberation of the Congo (MLC);

As Witnesses:

For the Republic of Zambia;

For the Organization of African Unity;

For the United Nations;

For the Southern African Development Community

Annex 'A' to the Cease-fire Agreement  
**Modalities for the Implementation of the Cease-fire Agreement in the  
 Democratic Republic of Congo**

*Chapter I*

*Cessation of Hostilities*

- The Parties, shall announce a cessation of hostilities, to be effective 24 hours after the signing of the Cease Fire Agreement. The announcement of cessation of hostilities shall be disseminated by the parties through command channels, and it shall concurrently be communicated to the civil population via print and the electronic media.
- Until the deployment of United Nations/Organisation of African Unity (UN/OAU) observers, the cessation of hostilities shall be regulated and monitored by the Parties through the Joint Military Commission. With the deployment of UN/OAU observers, the responsibility of verification, control and monitoring of the cessation of hostilities and subsequent disengagement shall be reported through UN/OAU.
- Any violation of the cessation of hostilities and subsequent events shall be reported to the Joint Military Commission and to the UN/OAU mechanisms through the agreed chain of command for investigation and action as necessary.

*Chapter 2*

*Disengagement*

- The disengagement of forces shall mean the immediate breaking of tactical contact between the opposing Military Forces of the Parties to this Agreement at places where they are in direct contact by the effective date and time of the Cease-Fire Agreement.
- Where immediate disengagement is not possible, a framework and sequence of disengagement is to be agreed by all Parties through the Joint Military Commission/UN and OAU.
- Immediate disengagement at the initiative of all military units shall be limited to the effective range of direct fire weapons. Further disengagement to pull all weapons out of range, shall be conducted under the guidance of the Joint Military Commission/UN and OAU.
- Wherever disengagement by movement is impossible or impractical, alternative solutions requiring that weapons are rendered safe shall be designed by the Joint Military Commission/UN and OAU.

*Chapter 3*

*Release of Hostages and Exchange of Prisoners of War*

- Upon the cease-fire taking effect, all Parties shall provide ICRC/Red Crescent with relevant information concerning their prisoners of war or persons detained because of the war. They shall subsequently accord every assistance to the ICRC/Red Crescent representatives to enable them to visit the prisoners and detainees and verify any details and ascertain their condition and status.
- On the coming into force of the Agreement, the Parties shall release persons detained because of the war or taken hostage within three days of the signing of the Cease-fire
- Agreement and the ICRC/Red Crescent shall give them all the necessary assistance including relocation to any provinces within the DRC or any other country where their security will be guaranteed.

*Chapter 4*

*Orderly Withdrawal of all Foreign Forces*

- The final orderly withdrawal of all foreign forces from the national territory of the Democratic Republic of Congo shall be in accordance with Annex 'B' of this Agreement.
- The Joint Military Commission/OAU and UN shall draw up a definitive schedule for the orderly withdrawal of all foreign forces from the Democratic Republic of the Congo.

*Chapter 5*

*National Dialogue and Reconciliation*

- On the coming into force of the Cease-fire Agreement in the DRC, the Parties agree to do their utmost to facilitate the inter-Congolese political negotiations which should lead to a new political dispensation in the Democratic Republic of the Congo.
- In order to arrive at a new political dispensation and national reconciliation arising from the inter-Congolese political negotiations, the Parties agree upon the implementation of the following principles:
  - a. the inter-Congolese political negotiations process shall include the Congolese parties, namely the Government of the Democratic Republic of Congo, the Congolese Rally for Democracy and the Movement for the Liberation of the Congo, the political opposition as well as representatives of the forces vives;
  - b. all the participants in the inter-Congolese political negotiations shall enjoy equal status;



- c. all the resolutions adopted by the inter-Congolese political negotiations shall be binding on all the participants;
- The Parties agree that the Organisation of African Unity shall assist the Democratic Republic of Congo in organizing the inter-Congolese political negotiations under the aegis of a neutral facilitator chosen by the Parties by virtue of his/her moral authority, his/her international credibility and his/her experience.
- For the success of the all inclusive inter-Congolese political negotiations leading to national reconciliation, the facilitator shall be responsible for:
  - a. making the necessary contacts pertaining to the organization of the inter-Congolese political negotiations within an environment which will cater [to] to the security of all participants;
  - b. organizing, in conjunction with the Congolese Parties, consultations with a view to inviting all the major organizations and groups of the recognized representative political opposition as well as the main representatives of the forces vives;
  - c. conducting, in accordance with the timetable the discussions leading to the establishment of a new political dispensation in the Democratic Republic of Congo.
- Without prejudice to other points that may be raised by the participants, the Congolese Parties shall agree [to]:
  - a. the timetable and the rules of procedure of the inter-Congolese political negotiations;
  - b. the formation of a new Congolese National army whose soldiers shall originate from the Congolese Armed Forces, the armed forces of the RCD and the armed forces of the MLC;
  - c. the new political dispensation in the DRC, in particular the institutions to be established for good governance purposes in the DRC;
  - d. the process of free, democratic and transparent elections in the DRC;
  - e. the draft of the Constitution which shall govern the DRC after the holding of the elections;
- The calendar of the inter-Congolese political negotiations shall be as follows:
  - i. Selection of a facilitator D-Day + 15 days
  - ii. Beginning of a national dialogue D-Day + 45 days
  - iii. Deadline for the close of the national dialogue D-Day + 90 days
  - iv. Establishment of new institutions D-Day + 91 days

### *Chapter 6*

#### *Re-Establishment of the State Administration Over the Territory of the Democratic Republic of Congo*

- In accordance with the terms of the Agreement and upon conclusion of the Inter-Congolese political negotiations, state administrations shall be re-established throughout the national territory of the Democratic Republic of Congo.
- On the coming into force of the Agreement, there shall be a consultative mechanism among the Congolese Parties which shall make it possible to carry out operations or actions throughout the national territory which are of general interest, more particularly in the fields of public health (e.g. national immigration campaign), education (e.g. marking of secondary school leavers examinations), migrations, movement of persons and goods.

*Chapter 7*  
*The Joint Military Commission*

- The Joint Military Commission shall be answerable to a Political Committee composed of the Ministers of Foreign Affairs and Defence or any other representative duly appointed by each Party.
- The Joint Military Commission shall be a decision making body composed of two representatives from each Party under a neutral Chairman appointed by the OAU in consultation with the Parties.
- The Joint Military Commission shall reach its decisions by consensus.
- The mandate of the Joint Military Commission shall be to:
  - a. establish the location of Units at the time of the Cease-fire;
  - b. facilitate liaison between the Parties for the purpose of the Cease-fire;
  - c. assist in the disengagement of forces and the investigation of any ceasefire violations;
  - d. verify all information, data and activities relating to military forces of the Parties;
  - e. verify the disengagement of the military forces of the Parties where they are in direct contact;
  - f. work out mechanisms for disarming armed groups;
  - g. verify the disarmament and quartering of all armed groups;
  - h. and verify the disarmament of all Congolese civilians who are illegally armed; and
  - i. monitor and verify orderly withdrawal of all foreign forces.
- The Parties commit themselves to providing the JMC with any relevant information on the organization, equipment and locations of their forces, on the understanding that such information will be kept confidential.

*Chapter 8*  
*United Nations Peace-Keeping Mandate*

- The UN in collaboration with the OAU shall constitute, facilitate and deploy an appropriate force in the DRC to ensure implementation of this Agreement.
- The mandate of the UN force shall include peacekeeping and peace enforcement operations as outlined below:
  - a. Work with the JMC/OAU in the implementation of this Agreement;
  - b. Observe and monitor the cessation of hostilities;
  - c. Investigate violations of the Cease-fire Agreement and take necessary measures to ensure compliance;
  - d. Supervise disengagement of forces of the Parties as stipulated in Chapter 2 of this Annex;
  - e. Supervise the re-deployment of forces of the Parties to Defensive Positions in conflict zones in accordance with Chapter 11 of this Agreement.
  - f. Provide and maintain humanitarian assistance to and protect displaced persons, refugees and other affected persons;
  - g. Keep the Parties to the Cease-fire Agreement informed of its peacekeeping operations;
  - h. Collect weapons from civilians and ensure that the weapons so collected are properly accounted for and adequately secured;
  - i. In collaboration with JMC/OAU, schedule and supervise the withdrawal of all foreign forces;
  - j. Verify all information, data and activities relating to military forces of the Parties.
- *Peace Enforcement*
  - a. Tracking down and disarming Armed Groups;
  - b. Screening mass killers, perpetrators of crimes against humanity and other war criminals;
  - c. Handing over “genocidaires” to the International Crimes Tribunal for Rwanda;
  - d. Repatriation;
  - e. Working out such measures (persuasive or coercive) as are appropriate for the attainment of the objectives of disarming, assembling, repatriation and reintegration into society of members of the Armed Groups.
- Composition of the UN Peace-keeping forces shall be selected from countries acceptable to all of the Parties.
- The Joint Military Commission shall, immediately upon the coming into force of the Agreement, be responsible for executing peace-keeping operations until the deployment of the UN Peace-keeping force

*Chapter 9*  
*Disarmament of Armed Groups*

- The JMC with the assistance of the UN/OAU shall work out mechanisms for the tracking, disarming, cantoning and documenting of all armed groups in the DRC, including ex-FAR, ADF, LRA, UNFR11, Interhamwe, FUNA, FDD, WNBF, UNITA, and put in place measures for:
  - a. handing over to the UN International Tribunal and national courts, mass killers and perpetrators of crimes against humanity; and
  - b. handling of other war criminals.
- The Parties together with the UN and other countries with security concerns, shall create conditions conducive to the attainment of the objective set out in 9.1 above, which conditions may include the granting of amnesty and political asylum, except for genocidaires. The Parties shall also encourage intercommunity dialogue.

*Chapter 10*  
*Formation of a National Army*

- In accordance with the terms of the Agreement and following the inter-Congolese political negotiations, there shall be a mechanism taking into account, among others, the physical check of troops, the precise identification of troops, the precise identification of all elements with regard to their origin, date of their enlistment, the units to which they belong, as well as the identification of terrorists and the count of weapons of war distributed in the framework of irregular (“parallel”) civil defence groups, for the formation of a national army, restructured and integrated, including the forces of the Congolese Parties signatories to the Agreement, on the basis of negotiations between the Government of the Democratic Republic of the Congo, the Congolese Rally for Democracy and the Movement for the Liberation of the Congo.

*Chapter 11*  
*Re-Deployment of Forces of the Parties to Defensive Positions in Conflict Zones*

- Following disengagement, all forces shall re-deploy to defensive positions.
- The positions where units are located shall be identified and recorded by the JMA/OAU and UN.
- Upon re-deployment to defensive positions, all forces shall provide relevant information on troop strength, armaments and weapons they hold in each location, to the JMC, OAU and UN mechanisms.
- The JMC shall verify the reported data and information. All forces shall be restricted to the declared and recorded locations and all movements shall be authorized by the JMC, OAU and UN mechanisms. All forces shall remain in the declared and recorded locations until:

- a. in the case of foreign forces, withdrawal has started in accordance with JMC/OAU, UN withdrawal schedule; and
- b. in the case of FAC and RCD/MLC forces, in accordance with their negotiated agreement.

### *Chapter 12*

#### *Normalisation of the Security Situation Along the Common Borders Between the Democratic Republic of Congo and its Neighbours*

- Normalisation of the security situation along the common borders between the Democratic Republic of Congo and its neighbours requires each country:
  - a. Not to arm, train, harbour on its territory, or render any form of support to subversive elements or armed opposition movements for the purpose of destabilizing others;
  - b. To report all strange or hostile movements detected by either country along the common borders;
  - c. To identify and evaluate border problems and cooperate in defining methods to peacefully solve them;
  - d. To address the problem of armed groups in the Democratic Republic of Congo in accordance with the terms of the Agreement.

### *Chapter 13*

#### *Calendar for the Implementation of the Cease-Fire Agreement*

- The Calendar for the implementation for the Cease-Fire Agreement is contained in annex B.

Annex 'B' to Cease-Fire Agreement  
**Calendar for the Implementation of the Cease-Fire Agreement**

**Major Cease-fire Events Proposed Calendar**

- Formal signing of the Cease-fire, D-Day
- Announcement of and dissemination of information on cease-fire by all parties, D-Day + 24 hours
- Cessation of Hostilities, including cessation of Hostile Propaganda, D-Day + 24 hours
- Release of Hostages D-Day + 3 days
- Establishment of Joint Military Commission and Observer Groups, D-Day + 0 hours to D-Day + 7 days
- Disengagement of Forces, D-Day + 14 days
- Selection of a facilitator, D-Day + 15 days
- Redeployment of the Forces of the Parties in the conflict Zones, D-Day + 15 days to D-Day + 30 days
- Provide information to the JMC, OAU, and UN Mechanism, D-Day + 21 days
- Mobilisation of OAU Observers, D-Day + 30 days
- Release/Exchange of Prisoners of War, D-Day + 7 days to D-Day + 30 days
- Beginning of National Dialogue, D-Day + 45 days
- Deadline for the closure of the National Dialogue, D-Day + 90 days
- Establishment of New Institutions, D-Day + 91 days
- Deployment of UN Peace-keeping, D-Day + 120 days
- Disarmament of Armed Groups, D-Day + 30 days to D-Day + 120 days
- Orderly Withdrawal of all Foreign Forces, D-Day + 180 days
- Verification and Monitoring, D-Day + 7 days to + 180 days (renewable)
- Re-establishment of State Administration, D-Day + 90 days to D-Day + 270 days
- Disarmament of Non-Military Personnel, D-Day + 360 days
- Measures to normalize the security situation along the international borders, D-Day + 30 days to D-Day + 360 days

*Annex 'C' to the Ceasefire Agreement*

*Definitions*

- “Armed groups,” means forces other than Government forces, RCD and MLC that are not signatories to this agreement. They include ex-FAR, AFF, LRA, UNRF II, NALU Interahamwe militias, FUNA, FDD, WNBF, UNITA and any other forces
- “Forces of the parties,” means the forces of the signatories to the Agreement
- “Parties,” means signatories to the Agreement.
- “Great Lakes Region,” means the groups of states within or bordering the Great Rift Valley system of East and Central Africa.
- “National Dialogue,” means the process involving all stakeholders in the inter-Congolese political negotiations with a view to installing a new political dispensation which will bring about national reconciliation and the early holding of free and fair democratic elections.
- “*Forces vives*,” means all the stakeholders representatives of the civil society such as the churches, Trade Unions, etc.
- “Cease-fire Agreement,” means this document and its Annexes.
- “Interahamwe,” means armed militias who carried out genocide in Rwanda in 1994.
- This concludes the basic text of the Lusaka Cease-fire Agreement.

## 2. Timeline Peristiwa Utama dari Konflik RDK Periode 1998 - 2003

### 1998

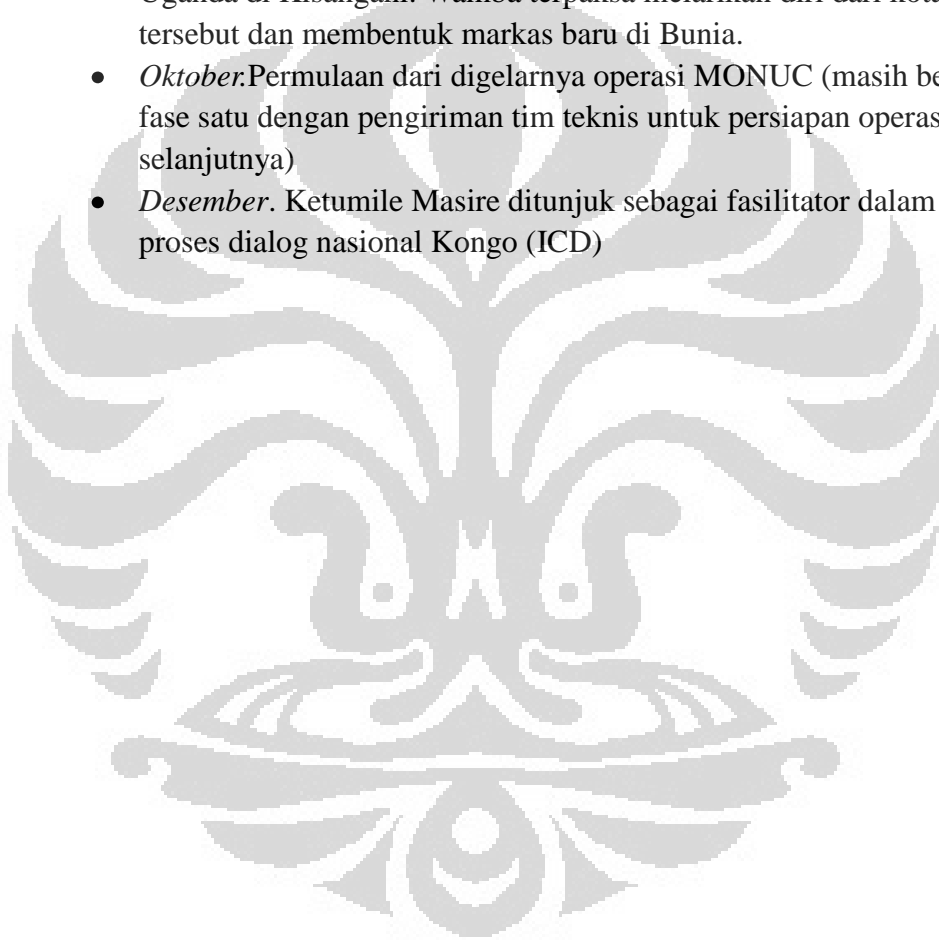
- *15 Februari.* Kagame menggantikan Kanyarengwe sebagai ketua RPF.
- *Februari.* Mutiny of Banyamulenge soldiers in Bukavu.
- *17 Mei.* Rwanda and Uganda menolak untuk menghadiri konferensi keamanan regional di Kinshasa yang menandakan perayaan kemenangan AFDL.
- *26 Juli.* Rwanda dan kekuatan militer asing lainnya diminta meninggalkan wilayah RDK.
- *2 Agustus.* Permulaan dari pemberontakan baru Kongo yang diprakarsai oleh Rwanda. Dalam beberapa bulan pertama pemberontakan daerah Goma, Bukavu dan Uvira diambil alih.
- *5 Agustus.* RPA menyerang Kitona namun berhasil dikalahkan oleh intervensi Angola.
- *12 Agustus.* Berdirinya RCD dengan Ernest Wamba dia Wamba sebagai ketua.
- *19 Agustus.* Digelarnya pasukan Angola, Zimbabwe dan Namibia untuk membantu pertahanan Laurent Kabila yang disetujui oleh pertemuan SADC di Harare.
- *23 Agustus.* Kisangani jatuh ke tangan pasukan pemberontak. Pertemuan SADC digelar di Pretoria
- *8 September.* SADC summit in Victoria Falls.
- *13–14 September.* SADC summit in Mauritius.
- *30 September.* First Syrte summit under Libyan auspices.
- *12 Oktober.* Fall of Kindu.
- *26 Oktober.* Uganda admits having troops in the DRC.
- *6 November.* Rwanda admits having troops in the DRC.
- *November.* Creation of MLC with Ugandan support.

### 1999

- *18 April.* Pertemuan Sirte yang kedua
- *20 April.* Diluncurkannya CPP.
- *Mei–Juni.* Pencahnya konflik terbuka antara RPA dan UPDF di Kisangani didahului upaya Uganda untuk mendukung Wamba Dia Wamba merekrut pendukung di wilayah Kisangani.



- *16 Mei.*RCD berpisah menjadi dua organisasi, Wamba mundur ke Kisangani dan membentuk RCD ML sementara Emile Ilungan menjadi ketua RCD-Goma.
- *22 Juni.*Jenderal James Kazini menciptakan provinsi Kibali-Ituri dan menunjuk Adèle Lotsove sebagai gubernur.
- *3 Juli.*Markas MLC didirikan di kota Gbadolite
- *10 Juli.*Penandatanganan perjanjian Lusaka di ibu kota Zambia oleh ketujuh negara yang masih terlibat dalam konflik.
- *Juli.*Permulaan dari kekerasan masal di Ituri.
- *Agustus.*Pertempuran sengit selama sepuluh hari antara Rwanda dan Uganda di Kisangani. Wamba terpaksa melarikan diri dari kota tersebut dan membentuk markas baru di Bunia.
- *Oktober.*Permulaan dari digelarnya operasi MONUC (masih berupa fase satu dengan pengiriman tim teknis untuk persiapan operasi selanjutnya)
- *Desember.* Ketumile Masire ditunjuk sebagai fasilitator dalam untuk proses dialog nasional Kongo (ICD)



### 3. Tabel Informasi Konflik di RDK Periode 1998 - 2003

Periode Quartal	Tanggal	Dimana	Deskripsi Kejadian	Aktor yang terlibat	Lamanya Konflik	Korban Jiwa	Nilai Intensitas Konflik	
							Satuan	Total
Q1 1998	Feb	Bukavu	Tentara FAC Banyamulenge melakukan <i>Mutiny</i>	Tentara etnis Banyamulenge vs FAC	2 - 3 hari	140	3	3
Q2 1998	Jun-Nov	Kivu Selatan	Perampasan terhadap cadangan mineral dilakukan oleh RCD dengan memindahkan 2000 dari 3000 metrik ton coltan dari SOMINKI ( <i>Société minière et industrielle du Kivu</i> ) yang dalam prosesnya menimbulkan perseteruan dan korban jiwa.	RCD	Beberapa Bulan	Tidak diketahui	5	5
Q3 1998	Aug	Provinsi - provinsi di timur RDK	Kelompok pemberontak mulai melakukan serangan diawali dengan direbutnya kota Goma.	Pasukan Pemberontak, Rwanda vs FAC	2 - 4 hari	243 korban jiwa	5	31
		Provinsi - provinsi di timur RDK	Sebagian tentara Kongo dari etnis Tutsi Banyamulenge kemudian memberontak melawan tentara reguler FAC	Pasukan pemberontak vs FAC	2 hari	>100	4	
	2 Aug		Pertempuran terjadi antara tentara Kongo beretnis Tutsi melawan tentara Kongo beretnis Katanga	RDK, Banyamulenge	1 hari	Tidak diketahui	3	
			Dalam beberapa bulan pertama pemberontakan daerah Goma, Bukavu dan Uvira diambil alih.	Pasukan pemberontak, Rwanda vs FAC	3 - 4 bulan	Tidak diketahui	6	
	4-5 Aug	Kitona	Pasukan pemberontak menyerang Kitona dan berbagai kota lain di front barat Kongo sebelum akhirnya berhasil dikalahkan	Zimbabwe, Namibia, Angola, RDK vs pemberontak	2 - 3 minggu	>1200	8	

			oleh intervensi gabungan Angola, Zimbabwe dan Namibia.					
	23 Aug	Kisangani	Kisangani jatuh ke tangan pasukan pemberontak.	RCD, Rwanda, Uganda vs FAC	1 minggu	Tidak diketahui	5	
Q4 1998	12 Okt	Kindu	Kejatuhan daerah Kindu.	RCD, Rwanda, Uganda vs FAC	1 - 2 minggu	Tidak diketahui	5	11
	Nov	Propinsi Equateur	Sebuah kelompok pemberontak baru (MLC) yang dipimpin oleh Jean-Pierre Bemba muncul di Gombo dan mulai menyerang pasukan pemerintah	MLC, Uganda vs RDK	1 - 2 minggu	>100	6	
Q1 1999	Jan	Desa Makobla (Selatan Kivu)	Pertentangan terjadi antara tentara Rwanda dan penduduk Kongo beretnis Banyamulenge.	Rwanda vs Banyamulenge	tidak diketahui	500 warga sipil dibunuh	4	6
	Feb		Dilaporkan adanya peningkatan konflik antara pemberontak MLC dan RCD	RCD vs MLC	tidak diketahui	132 jiwa dari keduanya	2	
Q2 1999	5 Apr	Kisangani	RCD memindahkan basisnya dari Goma ke Kisangani dan ketegangan dalam RDK meningkat. Pertentangan yang terjadi antara faksi RDK semakin meruncing	RDK	beberapa hari	Tidak diketahui	3	6
	Mei		Chad mulai menarik mundur pasukannya dari RDK. Beberapa friksi terjadi	RDK vs Chad				
	16 Mei		Emile Ilunga ditunjuk sebagai pimpinan baru RCD (Goma). Goma diasosiasikan dengan Rwanda dan golongan Kisangani diasosiasikan dengan Uganda.	RCD Goma vs RCD-Kisangani				

	<i>Mei-Jun</i>	Kisangani	RCD terpecah menjadi dua fraksi. RCD Goma yang dipimpin oleh Emile Ilunga, dan didukung oleh Rwanda; serta RCD-Kisangani yang kemudian berganti nama menjadi RCD-ML yang dipimpin oleh Wanba-dia-Wanba dan didukung oleh Uganda. Pecah konflik terbuka antara RPA dan UPDF di Kisangani didahului upaya Uganda untuk mendukung Wamba Dia Wamba merekrut pendukung di wilayah Kisangani.	RPA vs UPDF	Beberapa hari	Tidak diketahui	3	
<b>Q3 1999</b>	<i>Jul-Aug</i>	Lusaka	Setelah tiga minggu mengadakan pembicaraan berkelanjutan, perjanjian gencatan senjata DRC akhirnya disepakati pada tanggal 10 Juli oleh 6 negara. MLC menandatangani perjanjian pada tanggal 1 Agustus. Ke-50 anggota pendiri RCD menandatangani perjanjian ini pada tanggal 31 Agustus.					<b>22</b>
	<i>Jul</i>	Ituri	Permulaan dari kekerasan masal di Ituri antara Etnis Lendu vs Hema yang dimotori persaingan Uganda vs Rwanda	Hema vs Lendu	< 1 minggu	400 - 600	4	
	<i>15 Jun</i>	Gema	Kota Gema telah jatuh ke tangan MLC	MLC				
	<i>27 Jul</i>	Djombolo & Lusengo	Bemba memprotes pemboman pasukan pemerintah terhadap MLC di dua kota tersebut. MLC kemudian melakukan sergapan terhadap tentara FAC	FAC		176 korban jiwa		
	<i>Aug.</i>	Kisangani	Pertempuran sengit selama antara Rwanda dan Uganda di Kisangani akibat pertentangan di kubu RCD.	Rwanda vs Uganda	10 hari	>600	5	
	<i>4 Aug</i>	Beberapa kota di provinsi Equateur	Pasukan MLC dan Uganda dibombardir oleh serangan intensif udara dari pasukan koalisi pemerintah	Sudan, RDK, Zimbabwe vs MLC, Uganda	2 Minggu	600 orang tentara Uganda & MLC	7	

	Aug	Ituri	Pecahnya konflik antara etnis Hema dan Lendu di daerah Ituri selama 7 bulan kedepan	Etnis Hema vs Lendu	> 6 bulan	7000 korban jiwa dan 150.000 pengungsi	6		
	Sep	Bunia	Golongan RDK-Kisangani berganti nama menjadi RCD-ML. Wambia dia Wamba ditunjuk sebagai presiden dengan Bunia sebagai ibukota negara						
<b>Q4 1999</b>	Nov	Bukungu	Terjadi di Ikela, sebelah selatan Equateur, Tentara Rwanda, RCD mengepung beberapa ribu penduduk Zimbabwe, Namibia dan tentara FAC. Serangan dilakukan dari udara dan perahu senjata dari sungai, 64 km dari Bukungu ke arah Barat laut, serta melibatkan 3 perahu, 4 helikopter, dan pengebom Antonov.	Zimbabwe, Rwanda, Namibia, DRC, FAC	Beberapa hari	Beberapa ribu	7	<b>7</b>	
	30 Nov		DK PBB mengeluarkan Resolusi 1279 untuk menggelar operasi MONUC						
<b>Q1 2000</b>	Feb	Ikela	Pertempuran di sekitar ikela terjadi saat pasukan gabungan antara Zimbabwe, Namibia dan Kongo, dilaporkan mengepung suplai makanan	Zimbabwe, Namibia, Kongo	beberapa minggu	Ribuan kelaparan	7	<b>17</b>	
	Mar	Kasai	Bagian barat Kasai mengalami pertempuran hebat setelah tentara Rwanda yang tertangkap di Idumbe, Mashala, Demba, akibat pura-pura meluncurkan bom setelah FAC melakukan provokasi.	Rwanda vs FAC	beberapa hari	puluhan	3		
	Mar	Area Haut-Plauteu	Kota - kota sekitar Fizi dan Uvira yang dikuasai RCD Goma dan Rwanda diserang oleh gabungan pasukan Mayi-Mayi dan Alir	Mayi-Mayi, AliR vs RCD-Goma, Rwanda	>2 minggu	>500	7		
<b>Q2 2000</b>	5-Mei	Kisangani	Pecahnya baku tembak intensif antara Pasukan Uganda dan Rwanda di kota	Rwanda vs Uganda	2 hari	<100	4	<b>27</b>	

		Kisangani yang berlangsung selama 2 hari				
9-Mei	Kisangani	Kembali pecahnya pertempuran antara tentara Uganda dan Rwanda di Kisangani untuk kedua kalinya yang pada akhirnya berhenti akibat desakan dari AS	Uganda vs Rwanda	8 hari	>170	5
Summer	Utara Katanga	Pertempuran hebat terjadi pada musim panas tahun 2000 di sebelah utara Katanga antara Kabalo dan Nyunzu. Pemimpin pasukan Rwanda dipercaya telah melakukan serangan serius di daerah terbuka untuk merebut daerah Danau tanganyika. 2 batalion pasukan menjadi korban	Rwanda (FPA)-RDC	beberapa minggu	2 batalion	6
4-10 Jun	Kisangani	Terjadi pertempuran besar antara tentara Uganda dan Rwanda di Kisangani untuk Ketiga kalinya	Uganda, RCD-ML vs Rwanda, RCD-Goma	Lebih dari 1 minggu	1862 korban jiwa, 60000 pengungsi	7
12 Jun	Tshopo Commune	Pertempuran antara Rwanda dan Uganda di garis depan Tshopo Commune sebagai lanjutan dari pertempuran di Kisangani	Uganda & Rwanda	2 hari	600 warga sipil dan 170 tentara	5
16 Jun	DK PBB mengeluarkan Resolusi 1304 yang mengutuk Rwanda dan Uganda untuk aksi yang terjadi di Kisangani. Resolusi tersebut mengakibatkan Uganda dan Rwanda harus menarik mundur pasukannya dari RDK					
Jun	Kibarizo, Nyabyondo, Pinga, Gichanga & Zona Masisi	tentara RPA meningkatkan serangan kepada ALiR dengan mengincar daerah hutan dan kamp pelatihan ALiR. Terjadi penyusupan kepada ALiR Limpopo Brigade	RPA vs ALiR	3 hari	> 200	4

Q3 2000	9-Jul		FDLR melakukan pelanggaran HAM, bekerja sama dengan RCD dan Rwanda, tentara Hutu melakukan serangan ke sebuah kamp pengungsian dan mengakibatkan 370 korban	FDLR, RCD, Rwanda	1 hari	370	5	32
	27-Jul	Ikela	Pertempuran menjadi semakin intensif antara pasukan pemerintah yang ingin merebut kota Ikela menghadapi pasukan Rwanda dan RCD-Goma. Akhirnya pasukan pemerintah berhasil merebut kota tersebut.	Zimbabwe, RDK, Alir vs Rwanda, RCD-Goma	5 hari	>400	6	
	1-Aug	Ruhenge	Serangan milisi Alir terhadap komunitas penduduk sipil Rwanda	Alir vs Rwanda	1	120	4	
	9-Aug	Sekitar Kota Libenge	Pasukan Pemberontak MLC berhasil menangkal serbuan utama pasukan koalisi pemerintah yang merupakan momen kritis kampanye militer pasukan pemerintah di provinsi Equateur.	MLC, Uganda vs RDK, Zimbabwe, Sudan	> 1 minggu	300 - 500 korban jiwa	7	
	28-Aug	Bukavu	Serangan granat pada sebuah perkumpulan sosial menyebabkan kepanikan dan kekerasan susulan	RCD-Goma vs Penduduk Bukavu	1 hari	56 korban jiwa	3	
	3-Sep	Dongo	Pertempuran dibelantara sekitar area sungai Ubungi antara pemerintah dan MLC selama dua minggu	MLC, Uganda vs RDK	2 Minggu	1170 (kedua belah pihak +raky	7	

			sebelum akhirnya dimenangkan pasukan pemberontak			at sipil)			
<b>Q4 2000</b>	Pertengahan Okt	Kalemie & Moba	Serangan FAC yang terjadi di pertengahan ptktober terjadi karena penangkapan terhadap Pepa, sehingga dilakukan pengeboman di daerah Kalemie dan Moba. Terjadi pula penyerangan lewat udara oleh angkatan udara Tanzania.	FAC, Tentara Pepa, Tanzania, Interahamwe, Burundi (FDD)	Beberapa hari	Puluhan	5		
	Pertengahan hingga akhir tahun 2000	Kivu Selatan	Desa-desa di sekitar Kalonge dan Bunyakiri dikosongkan untuk memudahkan produksi Coltan. Demikian juga dengan kawasan masisi, dimana populasi etnis Nyanga dan Hunde dihabisi di area dekat daerah Pinga (berbatasan dengan wilayah Walikale).	RCD, Mai-Mai dan FLDR	Beberapa bulan	Tidak diketahui	6	<b>17</b>	
	4 Des	Pweto	Pasukan RCD dan Rwanda berhasil menguasai Pweto yang merupakan kota strategis bagi pasukan pemerintah	RCD-Goma, Rwanda vs Zimbabwe, FAC	3 hari	>800 + 10.000 penguksi	6		
<b>Q1 2001</b>	16 Jan		Pembunuhan terhadap Laurent-Désiré Kabila. Joseph Kabila mengambil alih pimpinan					<b>10</b>	
	Jan	Northeast	Pecahnya kembali kekerasan antara etnis Lendu and Hema groups, dengan indikasi dukungan Uganda terhadap etnis Hema.	Lendu vs Hema (didukung oleh) Uganda	3 minggu	> 2500 korban	7		



	6 Mar.		Rwanda diumumkan berstatus sebagai “negara musuh” oleh pemerintah Uganda						
	15 - 18 Mar	Bolomba	Terjadi baku tembak yang berubah menjadi konflik terbuka antara pasukan pemerintah RDK dan MLC di selatan provinsi Eucateur.	RDK vs MLC	3 hari	100 - 200	3		
<b>Q2 2001</b>	23-Apr	Mwenga	Terjadi serangan disebuah pusat kesehatan di Ilange commune di Mwenga (Sebelah selatan Kivu)	RDK, Mai-Mai dan FDLR	1 hari	Puluhan	4	<b>8</b>	
	29-Apr	Kakelo, Bakano, kawasan Walikale	Tentara yang dipimpin oleh Komandan Manyoanyoa berperang untuk memperebutkan Coltan	Mai-Mai	beberapa hari	>100	4		
<b>Q3 2001</b>	Jul akhir-awal Aug	Beni, Butembo and Lubero	Pertempuran terbuka antara Mai Mai, Milisi Nyamwisi dan MLC (Bemba) di Beni, Butembo	Mai Mai, Milisi Nyamwisi dan MLC (Bemba)	1 minggu	Puluhan	6	<b>6</b>	
	20-24 Aug		‘Pre-Dialogue’ ICD dilaksanakan di Gaborone.						0
<b>Q4 2001</b>	25 Des 2001	Kivu Selatan	NGO Héritiers de la Justice, melaporkan adanya pembantaian di desa Kalama, Kivu Selatan pada 25 Desember 2001 yang merupakan gabungan Mai-Mai dan Interahamwe	Tentara Mai-Mai & Interahamwe	1 hari	>100	5	<b>5</b>	
<b>Q1 2002</b>	Feb	Moliro, katanga	Tentara Nasional dengan kelompok pemberontak dan sekutunya setelah pembicaraan terjadi di Sun City	FAC vs Tentara Burundi (FDD) vs RCD vs tentara Rwanda	Beberapa hari	Tidak diketahui	5	<b>5</b>	

<b>Q2 2002</b>	<i>Mei-Jun 2002</i>	Daerah-daerah militer	Dalam proses penarikan pasukan Uganda, Zimbabwe, Angola, Rwanda sempat terjadi bentrokan dengan milisi lokal. Sebanyak 25.000-30.000 pasukan ditarik mundur	Uganda, Zimbabwe, Angola, Rwanda	2 bulan	Tidak diketahui	6	<b>6</b>
<b>Q3 2002</b>	<i>30 Jul.</i>		Persetujuan antara RDK dan Rwanda ditandatangani di Pretoria.				0	<b>3</b>
	6-Sep		Persetujuan antara RDK dan Uganda ditandatangani di Luanda. Program berjangka waktu 100 hari disepakati untuk menarik mundur pasukan UPDF setelah didirikannya Komite Perdamaian Ituri					
	13-Sep	Kivu Selatan	Koalisi Militer Mai-mai mengambil alih kota Kongo bagian timur, Uvira, di Kivu Selatan dari kekuasaan RCD	Mai-Mai vs RCD	1 minggu	Belasan	3	
<b>Q4 2002</b>	31 Okt	Kamina	Tentara Nasional Kongo menyerang sisa tentara FDLR untuk menyelamatkan muka dan menunjukkan iktikad baik dalam DRRR	RDC vs FDLR	1 hari	433	4	<b>4</b>
	<i>17 Des</i>	Pretoria	Global and Inclusive Accord (AGI) ditandatangani				0	

#### 4. Daftar Lengkap Periodisasi Munculnya Faktor Kematangan Konflik di RDK

Tabel 3.1 Kematangan Konflik Paska Perjanjian Lusaka						
Variabel	MHS (kalkulasi politik)		Redefinisi Kepentingan		Persetujuan Proses & Mekanisme Perdamaian	
	<i>Ekonomi</i>	<i>Militer</i>	<i>Pernyataan</i>	<i>Tindakan</i>	<i>Pernyataan</i>	<i>Tindakan</i>
RDK	Q1 - 2001	Q1 - 2001	Q2 - 2001	Q3 - 2001	Q3 - 2002	Q1 - 2003
Zimbabwe	Q3 - 1999	Q3 - 2001	Q2 - 2001	Q3 - 2001	Q1 - 2002	Q1 2002
Angola	Q1 - 2002	Q1 - 2002	Q2 - 2001	Q3 - 2001	Q1 - 2002	Q1 2002
Namibia	Q3 - 1999	Q3 - 1999	Q1 - 2001	Q2 - 2001	Q1 - 2002	Q1 2002
Rwanda	Q2 - 2002	Q3 - 2001	Q3 - 2002	Q3 - 2002	Q4 - 2003	Q4 - 2002
Uganda	Q1 - 2002	Q2 - 2001	Q2 - 2001	Q3 - 2001	Q4 - 2002	Q1 - 2003
RCD-Goma	Q2 - 2002	Q2 - 2002	Q3 - 2002	Q4 - 2002	Q4 - 2002	Q1 - 2003
MLC	Q2 - 2002	Q2 - 2002	Q1 - 2002	Q2 - 2002	Q3 - 2002	Q4 - 2002